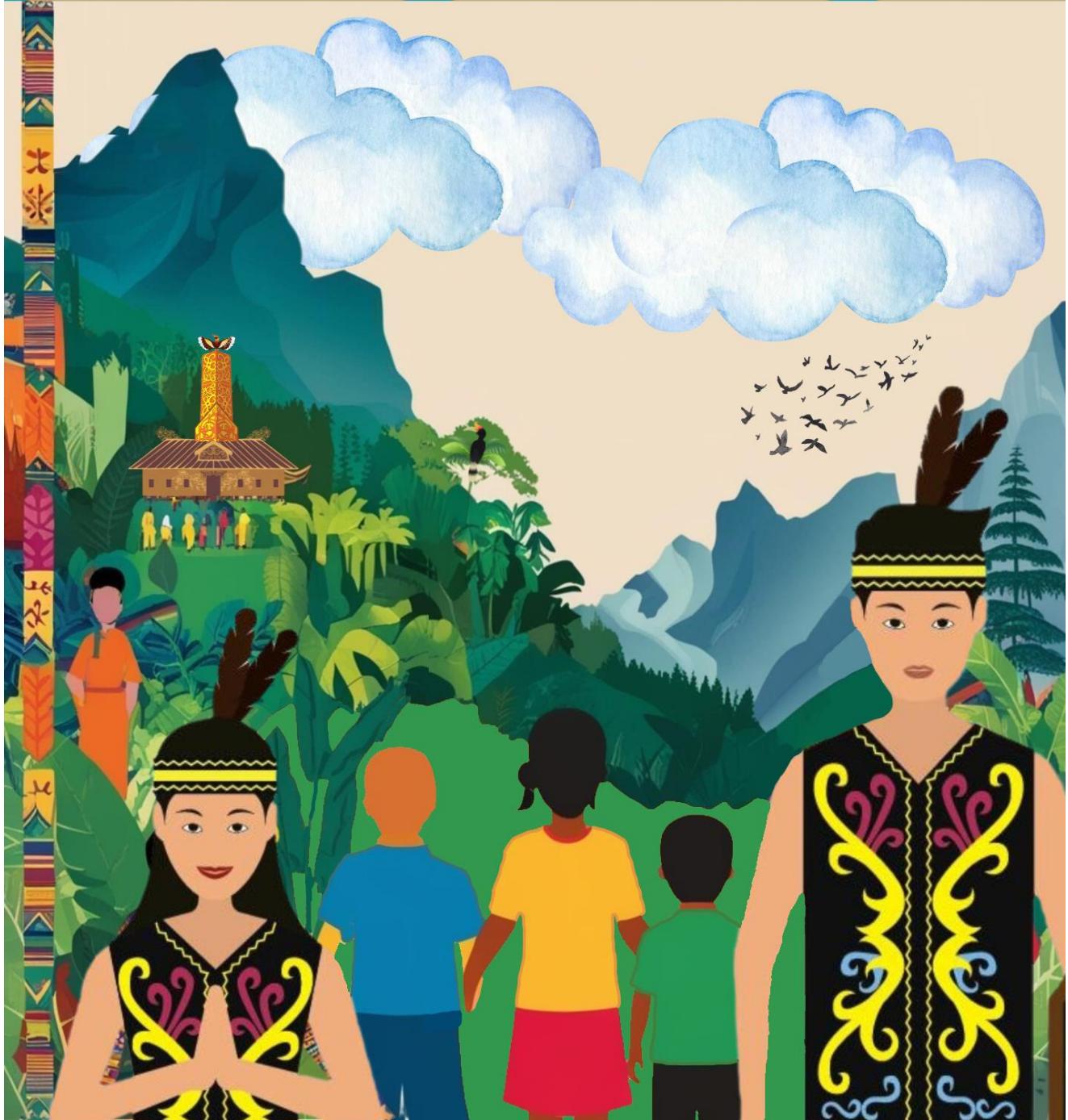


BUKU PROFIL GENDER & ANAK 2023



Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Utara





Kata Sambutan

Puji Syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan hidayahNya, atas tersusunnya Buku Profil Gender dan Anak Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.

Buku Profil ini disusun untuk membantu Informasi tentang kondisi Perempuan, Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana di Provinsi Kalimantan Utara serta sekilas Profil Dinas DPPPAPPKB Provinsi Kalimantan Utara.

Kami berharap semoga Buku Profil ini memberikan informasi yang bermanfaat

Email:
dp3ap2kb.kaltara@gmail.com

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana
Provinsi Kalimantan Utara

Burhanuddin, S.Sos., M.Si



DAFTAR ISI

TIM PENYUSUN	I
KATA SAMBUTAN	I
DAFTAR ISI	III
DAFTAR TABEL	VII
DAFTAR GAMBAR	IX
PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 MAKSDUD DAN TUJUAN	3
1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN	3
GAMBARAN UMUM	5
2.1 VISI	5
2.2 KONDISI GEOGRAFIS	6
2.3 KONDISI IKLIM	8
2.4 DEMOGRAFI	8
2.5 PENDUDUK	9
2.6 PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK	10
2.7 SOSIAL EKONOMI	11
2.7.1 KEMISKINAN	11
2.7.2 RATA – RATA PENGELUARAN PER KAPITA	12
2.7.3 PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN UTAMA	13
2.7.4 PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN	14
INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN PEREMPUAN DAN ANAK KALIMANTAN UTARA	16
3.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)	16
3.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)	20
3.3 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)	23
3.4 INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)	26



PROFIL PEREMPUAN KALIMANTAN UTARA.....	30
4.1 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG SOSIAL	30
4.1.1 KONDISI KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI KALTARA	30
4.1.2 ANALISIS DATA DEPRIVASI PEREMPUAN DI KALIMANTAN UTARA BERDASARKAN REGSOSEK	31
4.1.2.1 PENDIDIKAN.....	32
4.1.2.2 KESEHATAN.....	32
4.1.2.3 DISABILITAS	32
4.1.2.4 INFRASTRUKTUR DASAR	33
4.1.2.5 KETENAGAKERJAAN	33
4.2 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG KESEHATAN	34
4.2.1 UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) PEREMPUAN.....	34
4.2.2 PENDUDUK YANG MENGALAMI KELUHAN KESEHATAN DALAM SEBULAN TERAKHIR	35
4.2.3 ANGKA KESAKITAN	36
4.2.4 AKSES KESEHATAN MASYARAKAT.....	37
4.2.5 KELUARGA BERENCANA.....	40
4.3 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG PENDIDIKAN	41
4.3.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN SD, SLTP DAN SLTA	41
4.3.2 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDUDUK BERUMUR 5-18 TAHUN	42
4.3.3 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN SD, SMP DAN SMA	43
4.3.4 ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS.....	45
4.3.5 PENDUDUK PEREMPUAN MENURUT JENIS PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN.....	45
4.3.6 RATA-RATA LAMA SEKOLAH	46
4.4 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN	47
4.4.1 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR).....	47
4.4.2 PEREMPUAN PELAKU USAHA PERIKANAN	48
4.4.3 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT).....	49



4.4.4	TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)	51
4.4.5	PEREMPUAN PEKERJA TENAGA MANAJER, PROFESIONAL, ADMINISTRASI DAN TEKNISI.....	52
4.4.6	PEREMPUAN MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA.....	52
4.4.7	PEREMPUAN MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA.....	53
4.5	PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN	54
4.5.1	PARTISIPASI DI LEMBAGA LEGISLATIF	54
4.5.2	PARTISIPASI DI LEMBAGA EKSEKUTIF	55
4.5.3	PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN POLITIK	56
4.6	PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG HUKUM DAN HAM	58
PROFIL ANAK KALIMANTAN UTARA	63
5.1	PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG SOSIAL.....	63
5.1.1	PENDUDUK USIA ANAK.....	63
5.1.2	STATUS PERKAWINAN ANAK	64
5.1.3	HAK SIPIL KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ANAK.....	65
5.1.4	ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS	66
5.1.5	ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)	67
5.2	PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG KESEHATAN.....	68
5.2.1	ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DAN ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA)	68
5.2.2	PERSENTASE ANAK USIA 0-59 BULAN DIIMUNISASI	69
5.2.3	PERSENTASE BAYI LAHIR DENGAN BERAT BADAN RENDAH	70
5.2.4	PERSENTASE PREVALENSI BALITA STUNTING	71
5.2.5	RATA-RATA LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI	71
5.3	PROFIL ANAK KALIMANTAN UTARA BIDANG PENDIDIKAN	73
5.3.1	PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR FORMAL DAN JALUR NON FORMAL / PENDIDIKAN PRASEKOLAH	73
5.3.2	PESERTA PENDIDIKAN SD, SMP, SMA DAN SMK	74
5.3.3	SISWA PUTUS SEKOLAH	75
5.4	PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG HUKUM DAN HAM	76
5.4.1	ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT UMUR (0-17 TAHUN).....	76



5.4.2	ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT STATUS PENDIDIKAN	77
5.4.3	ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN	78
5.4.4	ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM	78
5.4.5	ANAK PENGHUNI LEMABAGA PEMASYARAKATAN	80



DAFTAR TABEL

Tabel 1	Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	7
Tabel 2	Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2022-2023	9
Tabel 3	Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2023	11
Tabel 4	Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2023	12
Tabel 5	Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	15
Tabel 6	IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023	17
Tabel 7	Umur Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota	18
Tabel 8	Harapan Lama Sekolah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021-2023	18
Tabel 9	Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten/Kota	19
Tabel 10	Pengeluaran Perkapita Pertahun (Rp.000) Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021-2023	19
Tabel 11	IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023	21
Tabel 12	Umur Harapan Hidup Laki-laki & Perempuan Kab/Kota Tahun 2021-2023	21
Tabel 13	Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Kab/Kota	22
Tabel 14	Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Kab/Kota Tahun 2021-2023	22
Tabel 15	Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Perempuan (Rp.000) Kab/Kota Tahun 2021-2023	23
Tabel 16	IDG Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021-2023	24
Tabel 17	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kab/Kota Tahun 2021-2023	25
Tabel 18	Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kab/Kota 2021-2023	25
Tabel 19	Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan	26
Tabel 27	Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023	35
Tabel 32	Persentase Persentase Perempuan Pernah Kawin	41
Tabel 36	Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Kab/Kota	45
Tabel 37	Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023	47
Tabel 38	Jumlah Perempuan Penerima Kredit Usaha Rakyat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2023	48
Tabel 39	Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota...	49
Tabel 40	TPT Penduduk Berdasarkan Kabupaten Kota	50
Tabel 41	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)	51
Tabel 42	Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional	52
Tabel 43	Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	53
Tabel 44	Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status	53



Tabel 45 Persentase Keterlibatan Perempuan	55
Tabel 46 Jumlah Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Eksekutif Menurut Pemda Tahun 2023	56
Tabel 47 Jumlah Pengurus Harian/Kader Partai Politik.....	57
Gambar 29 Persentase Anggota Legislatif Terhadap Jumlah.....	58
Tabel 49 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2023	59
Tabel 50 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Berdasarkan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara	59
Tabel 51 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023.....	60
Tabel 52 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan	60
Tabel 53 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian	62
Tabel 57 Jumlah Penduduk usia 0-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin	63
Tabel 58 Jumlah Penduduk Anak Bestatus Kawin	65
Tabel 59 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota	65
Tabel 60 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023	67
Tabel 61 Jumlah Pelajar/Mahasiswa Pengguna Narkotika,	68
Tabel 62 Persentase Imunisasi Pada Anak Usia 0-59 Bulan	70
Tabel 63 Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah	70
Tabel 64 Sebaran Data Stunting di Provinsi Kalimantan Utara	71
Tabel 65 Persentase penduduk berumur 0-23 bulan yang Pernah.....	72
Tabel 66 Rata-rata Lama Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi.....	72
Tabel 67 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan prasekolah tahun 2023	73
Tabel 68 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah Tahun 2023	73
Tabel 69 Jumlah Peserta Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota	74
Tabel 70 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut	75
Tabel 71 Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	76
Tabel 72 Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan	77
Tabel 73 Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan	78
Tabel 74 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan	79
Tabel 75 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Jenis Pidana di dan Pegadilan Negeri di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	79
Tabel 76 Jumlah Anak Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Kelamin.....	80



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1	Persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	9
Gambar 2	Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	10
Gambar 3	Persebaran Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2023	10
Gambar 4	Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan Dan Bukan Makanan Kalimantan Utara Tahun 2023	13
Gambar 5	Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah) Menurut Kab/Kota	13
Gambar 6	Persentase Penduduk Usia 15 Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama	14
Gambar 7	Persentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kalimantan Utara Tahun 2023	14
Gambar 8	Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2023	30
Gambar 12	Angka Kesakitan Memurut Jenis Kelamin	37
Gambar 13	Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan	38
Gambar 14	Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap	40
Gambar 15	Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Dan Partisipasi KB Di Provinsi Kalimantan Utara 2023	40
Gambar 20	Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, Dan Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki Tahun 2023	46
Gambar 21	Persentase Pelaku Usaha Perikanan Menurut Jenis Profesi	49
Gambar 22	TPT Penduduk Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 – 2023	50
Gambar 23	TPAK Penduduk Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023	51
Gambar 24	Proporsi Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas	52
Gambar 25	Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	54
Gambar 26	Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2021-2023	55
Gambar 27	Persentase Perempuan Di Lembaga Eksekutif	56
Gambar 28	Persentase Anggota Pengurus /	57
Gambar 30	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia	58
Gambar 31	Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan	59
Gambar 32	Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Pekerjaan	60
Gambar 33	Jumlah Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan	61
Gambar 34	Jumlah Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian	61
Gambar 35	Persentase Penduduk usia 0-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	64



Gambar 36	Proporsi Perempuan Umur 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Umur 18 Tahundi Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023	65
Gambar 37	Jumlah Anak Berumur 0 - 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan	66
Gambar 38	Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus	67
Gambar 39	Jumlah Pelajar/Mahasiswa Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza).....	68
Gambar 40	Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Utara Hasil Long Form SP2020 ...	69
Gambar 41	Persentase Prevalensi Balita Stunting Berdasarkan	71
Gambar 42	Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah Tahun 2023	74
Gambar 43	Jumlah Peserta Pendidikan Menurut Jenis Pendidikan 2023	75
Gambar 44	Persentase Siswa Putus Sekolah Jenis Pendidikan Tahun 2023.....	76
Gambar 45	Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin	77
Gambar 46	Persentase Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Status Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	77
Gambar 47	Persentase Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023	78
Gambar 47	Jumlah Anak Sebagai Pelaku Berstatus Pelajar	78



PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak adalah hal yang mutlak mesti dilakukan dalam pembangunan. Pengarusutamaan Gender dan Hak Anak merupakan strategi pembangunan yang dilakukan untuk memastikan 5 kelompok rentan dalam masyarakat yang terdiri dari perempuan, lansia, kaum disabilitas, perempuan hamil dan anak-anak dapat memiliki akses yang sama dalam pembangunan, partisipasi yang sama dalam pelaksanaan pembangunan, kontrol yang sama dalam pembangunan serta menerima dan merasakan manfaat pembangunan yang sama pula. Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak merupakan salah satu isu yang menjadi pokok bahasan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (2005-2025) Provinsi Kalimantan Utara. Gender dan anak adalah isu lintas sektor yang melibatkan stakeholder berbagai bidang pembangunan.

Isu gender dan anak bukanlah merupakan hal yang baru saja mengemuka. Secara global sudah ada konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan (CEDAW) yang di Indonesia sudah dirafikasi dengan UU No. 7 Tahun 1984 dan juga Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Nasional; serta Penandatangan Konvensi Hak-Hak Anak PBB pada tanggal 20 November 1989 yang sudah diratifikasi dengan Keputusan Presiden No. 6 Tahun 1990 dan juga dengan menetapkan Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang telah diubah menjadi UU 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas UU 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang mendeklarasikan menghormati dan menjamin hak-hak setiap anak tanpa diskriminasi dalam bentuk apapun tanpa dipandang ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, keyakinan politik dan pendapat-pendapat lain, kebangsaan, asal etnik atau sosial, kekayaan, ketidakmampuan, kelahiran atau kedudukan lain dari anak atau orangtua anak atau pengasuhnya yang sah. CEDAW (*Committee on the Elimination of Discrimination Against Women*) dan Konfensi Hak Anak sebagai suatu komitmen global seharusnya menjadi payung pembentukan perundang-undangan disemua negara dalam meniadakan diskriminasi terhadap perempuan dan pemenuhan hak anak.

Pentingnya Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) diakui sebagai persoalan penting oleh Indonesia dan tercermin pada dokumen – dokumen Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) Tahun 1978, 19993, 1988, 1993 dan 19999. GBHN dan Program Pembangunan Nasional (PROOPENAS) 1999-2004 menyebutkan secara khusus kesetaraan gender sebagai



salah satu tujuan khusus pembangunan dan GBHN menambahkan pentingnya perbaikan status perempuan untuk mencapai kesetaraan gender. Tonggak lain dalam upaya meniadakan diskriminasi terhadap perempuan adalah kesepakatan Beijing yang dikenal dengan Beijing Platform For Action (BPFA) pada tahun 1995. Ada dua belas wilayah kritis yang harus mendapat perhatian Negara jika ingin menghapus diskriminasi terhadap perempuan menegakkan Keadilan dan Kesetaraan Gender (KKG). Saat Millenium Development Goals (MDGs) disepakati lebih satu dekade lalu, persoalan kesetaraan gender telah menjadi fokus perhatian. Kesetaraan gender menjadi salah satu Tujuan yang harus dicapai dalam MDGs. Sekarang di era Sustainable Development Goals (SDGs), kesetaraan gender masih menjadi Tujuan (*Goals*) yang harus dicapai pada tahun 2030.

Dalam perspektif gender, penyediaan data, analisis dan pelaporan terpisah menurut jenis kelamin dimaksudkan untuk menyajikan data dan informasi tentang pengalaman khusus dalam kehidupan sebagai perempuan dan laki-laki. Data terpisah berdasarkan jenis kelamin menjadi inti dalam menghasilkan Statistik Gender yaitu informasi yang mengandung isu gender termasuk didalamnya isu anak, sebagai hasil dari analisis gender. Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pemenuhan hak anak diberbagai bidang pembangunan agar responsif gender dan responsif terhadap pemenuhan hak anak. Isu gender dan anak selama ini kurang diperhitungkan dalam berbagai proses kebijakan pembangunan. Masalah utama yang selalu mengemuka adalah ketersedian data terpisah kurang memadai. Sebagai akibatnya kebijakan, program, kegiatan pembangunan tidak responsif terhadap kebutuhan, kesulitan sebagai perempuan dan/atau sebagai laki-laki dan tidak memihak bagi kepentingan terbaik bagi anak, dan disebut buta gender. Hasilnya ketidaksetaraan antara perempuan dan laki-laki dalam berbagai bidang pembangunan dan kehidupan masih terus berlanjut. Untuk mengatasi permasalahan di atas diperlukan data terpisah menurut jenis kelamin dan umur sebagai pembuka wawasan adanya kesenjangan/ketimpangan antara laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.

Data gender dan anak menjadi elemen pokok bagi terselenggaranya pengarusutamaan gender (PUG) dan pengarusutamaan hak anak (PUHA). Data gender dan anak dapat membantu para pengambil keputusan antara lain untuk:

- (i) mengidentifikasi perbedaan (kondisi/ perkembangan) keadaan perempuan dan laki-laki, termasuk anak, dalam dimensi tempat dan waktu
- (ii) mengevaluasi dampak dari intervensi pembangunan terhadap perempuan dan laki-laki;



(iii) mengidentifikasi masalah, membangun opsi dan memilih opsi yang paling efektif untuk kemaslahatan perempuan dan laki-laki yang responsif terhadap masalah, kebutuhan, pengalaman perempuan dan laki-laki.

Data Gender dan Anak diharapkan dapat menjadi media bagi seluruh OPD dan Instansi Vertikal untuk bersinergi terkait data-data terpisah yang berkaitan dengan isu gender. Data ini selanjutnya menjadi bahan dasar bagi OPD dan Instansi Vertikal dalam merencanakan kegiatan atau program yg responsif gender.

Data terpisah adalah data berdasarkan jenis kelamin (*sex-disaggregated data*) berupa data kuantitatif atau data kualitatif yang dikumpulkan dan dipresentasikan berdasarkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan, anak laki-laki dan anak perempuan.

Data terpisah menggambarkan peran, kondisi umum dari laki dan perempuan dalam setiap aspek kehidupan di masyarakat yang meliputi politik, ekonomi, sosial budaya, hukum, dan lain-lain.

1.2 MAKSUD DAN TUJUAN

Secara umum, publikasi ini disusun bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai kondisi perempuan dan anak dan capaian pembangunan manusia berdasarkan gender dan anak. Oleh karena itu, penyajian informasi dalam publikasi ini disajikan dalam bentuk data terpisah menurut jenis kelamin dan umur, sehingga dapat diperoleh gambaran keterbandingan kondisi perempuan terhadap laki-laki serta kondisi anak di Provinsi Kalimantan Utara. Termasuk didalamnya adalah indikator pembangunan manusia berbasis gender, yaitu Indeks Pembangunan Gender (IPG) dan Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Selain itu, publikasi ini juga bertujuan untuk memberikan gambaran dan informasi tentang kondisi anak-anak di Kalimantan Utara yang dilihat dari indikator Indeks Komposit Kesejahteraan Anak (IKKA) serta dari aspek demografi, pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, kekerasan terhadap anak dan beberapa informasi lainnya terkait perilaku bepergian, tindak kejahatan dan teknologi informasi.

1.3 SISTEMATIKA PENYAJIAN

Penyajian publikasi ini dibagi dalam lima bab, yaitu:

Bab I **Pendahuluan**; yang berisi latar belakang, maksud dan tujuan serta sistematika penyajian;

Bab II **Gambaran Umum Provinsi Kalimantan Utara**; yang membahas tentang letak geografis dan demografi;

Bab III **Indikator Kinerja Pembangunan Provinsi Kalimantan Utara**; yang mencakup gambaran pencapaian pembangunan manusia, pencapaian pembangunan gender dan pencapaian pemberdayaan gender;



Bab IV **Profil Perempuan;** yang mencakup gambaran pencapaian pembangunan manusia, pencapaian pembangunan gender dan pencapaian pemberdayaan gender;

Bab V **Profil Anak;** yang membahas tentang pendidikan, kesehatan dan ketenagakerjaan;



GAMBARAN UMUM

2.1 VISI

Visi Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara yang ingin diwujudkan pada periode 2021-2025 adalah “TERWUJUDNYA PROVINSI KALIMANTAN UTARA YANG BERUBAH, MAJU DAN SEJAHTERA”. Unsur visi yang terkait dengan tugas dan fungsi perangkat daerah adalah Maju dan sejahtera yang berarti mewujudkan masyarakat Kalimantan Utara yang memiliki semangat berubah dan maju dalam memenuhi kebutuhan hidup serta mewujudkan masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan di seluruh sektor pembangunan. Dalam rangka pencapaian visi diatas, misi yang dijalankan yakni :

1. Mewujudkan Kalimantan Utara, yang aman, nyaman dan damai melalui penyelenggaraan pemerintahan yang baik;
2. Mewujudkan sistem Pemerintahan provinsi yang di topang oleh Tata Kelola Pemerintah Kabupaten/Kota sebagai pilar utama secara profesional, efisian, efektif, dan fokus pada sistem penganggaran yang berbasiskan kinerja;
3. Mewujudkan pembangunan Sumber Daya Manusia yang sehat, cerdas, kreatif, inovatif, berakhhlak mulia, produktifitas dan berdaya saing dengan berbasiskan Pendidikan wajib belajar 16 Tahun dan berwawasan;
4. Mewujudkan pemanfaatan dan pengelolaan Sumber Daya Alam dengan nilai tambah tinggi dan berwawasan lingkungan yang berkelanjutan, secara efisien, terencana, menyeluruh, terarah, terpadu, dan bertahap dengan berbasiskan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi;
5. Mewujudakan peningkatan pembangunan infrastruktur pedesaan, pedalaman, perkotaan, pesisir dan perbatasan untuk meningkatkan mobilisasi dan produktifitas daerah dalam rangka pemerataan pembangunan;
6. Mewujudkan peningkatan ekonomi yang berdaya saing, dan mengurangi kesenjangan antar wilayah serta meningkatkan ketahanan pangan dengan berorientasi pada kepentingan rakyat melalui sektor perdagangan, jasa, industri, pariwisata, dan pertanian dalam arti luas dengan pengembangan infrastruktur yang berkualitas dan merata serta meningkatkan koneksi antar kabupaten/kota;
7. Mewujudkan kualitas kerukunan kehidupan beragama dan etnis dengan berbagai latar belakang budaya dalam kerangka semangat Kebhinnekaan di provinsi Kalimantan Utara;



8. Mewujudkan ketahanan Energi dan pengembangan PLTA serta energi terbarukan dengan pemanfaatan potensi daerah;
9. Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan;
10. Mewujudkan perlindungan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM;
11. Meningkatkan kinerja Pembangunan dan Investasi Daerah dengan melibatkan Pengusaha dan investor Lokal serta Nasional.
12. Memberi bantuan pengembangan sektor produktif dan potensi strategis di setiap desa dan kelurahan melalui Pengembangan Produk lokal masing-masing Kabupaten/Kota;
13. Mewujudkan pembangunan yang berbasiskan RT/Komunitas dalam upaya gerakan membangun desa menata kota, serta memberi Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota sebagai pilar provinsi sesuai kemampuan APBD setiap Tahun.
14. Mewujudkan Tanjung Selor menjadi DOB sebagai Ibu Kota Provinsi Kalimantan Utara serta Beberapa DOB yang telah diusulkan yaitu; Kota Sebatik, Kabupaten Kabudaya, Kabupaten Kerayan, Kabupaten Apo Kayan.

Sesuai dengan tugas dan fungsinya, perangkat daerah mendukung pencapaian misi ke 9 yaitu **“Mewujudkan peningkatan kualitas kesetaraan gender dan Milenial dalam pembangunan”** yang dimplementasikan melalui kegiatan Pemberdayaan ekonomi perempuan dalam mendukung peningkatan indeks pemberdayaan perempuan; Penguatan kelompok Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga Sejahtera (UPPKS) dalam upaya penurunan keluarga pra sejahtera.

2.2 KONDISI GEOGRAFIS

Provinsi Kalimantan Utara yang merupakan provinsi ke 34 di Indonesia dan merupakan provinsi termuda dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Provinsi Kalimantan Utara terdiri dari 4 (empat) Kabupaten dan 1(satu) kota, yaitu :

1. Kabupaten Malinau dengan ibukota Malinau Kota;
2. Kabupaten Bulungan dengan ibukota Tanjung Selor;
3. Kabupaten Tana Tidung dengan ibukota Tideng Pale;
4. Kabupaten Nunukan dengan ibu kota Nunukan;
5. Kota Tarakan dengan ibukota Tarakan.

Provinsi Kalimantan Utara merupakan dataran rendah dengan ketinggian rata-rata 56 meter diatas permukaan laut, terletak pada posisi 1°21'36"-4°24'55" Lintang Utara dan 114°35'22"-118°03'00" bujur Timur. Provinsi Kalimantan Utara merupakan hasil pemekaran dari Provinsi induknya yaitu Provinsi Kalimantan Timur, menjadi salah satu pintu gerbang



pembangunan di wilayah Indonesia bagian tengah, berbatasan langsung dengan negara bagian tetangga Malaysia yaitu bagian Sabah dan Sarawak.

Secara geostrategis Provinsi Kalimantan Utara berbatasan dengan :

1. Batas Utara : Negara Malaysia Bagian Sabah
2. Batas Selatan : Kabupaten Kutai Barat, Kutai Timur, Kutai Kertanegara dan Kab. Berau Provinsi Kalimantan Timur
3. Batas Timur : Laut Kalimantan
4. Batas Barat : Negara Malaysia Bagian Sarawak

Letaknya yang sangat strategis dan menguntungkan, karena daerahnya dilewati oleh alur pelayaran yang termasuk dalam kategori alur laut kawasan Indonesia II (ALKI II) yang sering dilewati oleh kapal-kapal yang berlayar dari perairan Indonesia ke alur pelayaran Internasional meliputi Kawasan Malaysia, Filipina, Brunei, Singapore, dan negara-negara ASEAN, serta negara-negara Asia Pasific seperti Hongkong, Korea Selatan dan Jepang. Provinsi Kalimantan Utara memiliki sumber daya alam yang melimpah berupa hasil bumi minyak dan gas alam, batubara, emas, batu gamping, sirtu, pasir kuarsa, mineral lainnya, kehutanan, perkebunan, perikanan dan kelautan, peternakan dan industri serta kekayaan budaya dan pariwisata. Secara geografis Provinsi Kalimantan Utara berbatasan langsung dengan Negara bagian Malaysia, Laut Kalimantan di sebelah timur dan Kalimantan Timur di sebelah selatan.

Tabel 1 Wilayah Administrasi Pemerintahan Menurut Kecamatan, Desa/Kelurahan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/kota	Luas (km ²)	Jml Kec	Jml Desa	Jml Kel
Malinau	38.902,00	15	109	0
Bulungan	13.880,00	10	74	7
Tana tidung	3.504,0	5	32	0
Nunukan	13.564,00	21	234	8
Tarakan	251,00	4	0	20
Kalimantan utara	70.101,00	55	449	35

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Provinsi Kalimantan Utara merupakan provinsi yang berbatasan langsung dengan negara tetangga Malaysia, tepatnya dengan Bagian Sabah dan Sarawak, Malaysia. Untuk daerah daratan terdapat + 1.038 km garis perbatasan antara Provinsi Kalimantan Utara dengan Negara Malaysia.



Luas wilayah administrasi ± 75.467,70 Km2, terdiri dari :

1. Kabupaten Malinau	: ± 38.902,00 Km ²
2. Kabupaten Bulungan	: ± 13.880,00 Km ²
3. Kabupaten Tana Tidung	: ± 3.504,00 Km ²
4. Kabupaten Nunukan	: ± 13.564,00 Km ²
5. Kota Tarakan	: ± 251,00 Km ²

Provinsi Kalimantan Utara memiliki luas wilayah 70.101,00 Km2 dengan 55 kecamatan, 49 desa, 35 kelurahan yang tersebar di 5 kabupaten/kota.

2.3 KONDISI IKLIM

Kondisi iklim di Provinsi Kalimantan Utara pada umumnya sama dengan kondisi iklim pada provinsi lainnya di Indonesia, yakni beriklim tropis dengan mempunyai dua musim, yaitu musim kemarau dan musim hujan. Durasi penyinaran matahari di Provinsi Kalimantan Utara mencapai 1.422 jam sementara jumlah curah hujan sebesar 2.878,70 mm³ dengan rata-rata jumlah hari hujan adalah 252 hari selama tahun 2023.

Suhu udara rata-rata di Provinsi Kalimantan Utara selama tahun 2022 sekitar 27,40°C dengan suhu udara maksimal mencapai 34,20°C dan temperatur minimal hingga 21,40°C. Kondisi tekanan udara di Provinsi Kalimantan Utara adalah 1.007,90 mb dengan rata-rata kecepatan angin 3,00 m/detik.

2.4 DEMOGRAFI

Penduduk dapat berperan sebagai subyek sekaligus obyek pembangunan. Bila pembangunan bertujuan untuk kesejahteraan masyarakat, maka penduduk dalam hal ini sebagai obyek pembangunan yang menikmati hasil pembangunan tersebut. Pada sisi lain, penduduk juga dapat dipotensikan sebagai penggerak pembangunan yang berarti peran penduduk sebagai subyek pembangunan yang tidak hanya menikmati hasilnya akan tetapi juga berperan aktif dalam proses pembangunan.

Jumlah penduduk yang besar dan berkualitas tentu menjadi impian sebagai salah satu modal dasar dalam pembangunan. Kualitas penduduk dapat dilihat dari beberapa sisi; pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Selanjutnya keadaan dan kondisi kependudukan yang ada sangat mempengaruhi dinamika pembangunan. Jumlah penduduk yang besar diikuti dengan kualitas penduduk yang memadai maka akan menjadi penopang bagi pembangunan. Sebaliknya jumlah penduduk yang besar namun diikuti dengan tingkat kualitas penduduk yang rendah, maka penduduk tersebut akan menjadi beban bagi pembangunan dan akan menghambat jalannya proses pembangunan.



2.5 PENDUDUK

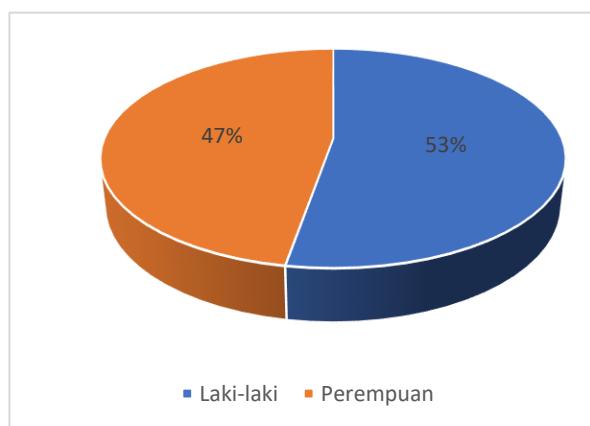
Jumlah penduduk di suatu daerah selalu mengalami perubahan karena adanya faktor kelahiran, kematian, dan migrasi atau perpindahan penduduk. Di Kalimantan Utara perkembangan penduduknya dari tahun ke tahun semakin meningkat. Pada tahun 2023 jumlah penduduk di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 743,1 ribu jiwa yang tersebar di lima kabupaten/kota. Jumlah penduduk yang paling banyak terdapat di Kota Tarakan, yaitu sekitar 246,9 ribu jiwa. Selanjutnya adalah Kabupaten Nunukan, Bulungan, Malinau masing-masing jumlah penduduknya 217,6 ribu jiwa, 165 ribu jiwa dan 84,8 ribu jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit berada di Kabupaten Tana Tidung yang merupakan kabupaten baru hasil pemekaran Kabupaten Bulungan, yaitu sebanyak 28,6 ribu jiwa.

Tabel 2 Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2022-2023

Kab/kota	Jumlah penduduk (ribu)		Laju pertumbuhan penduduk (%)	
	2022	2023	2022	2023
Malinau	85,3	84,8	1,94	1,32
Bulungan	157,6	165	2,16	1,48
Tana tidung	27,6	28,6	4,33	2,60
Nunukan	208,3	217,6	2,62	1,58
Tarakan	249	246,9	1,44	1,23
Kalimantan utara	727,8	743,1	2,10	1,44

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 1 Persentase penduduk berdasarkan jenis kelamin Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

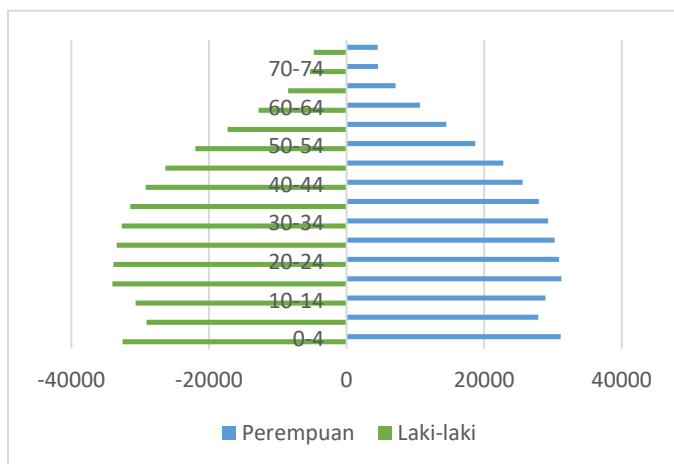


Pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara komposisi penduduk terbanyak pada penduduk Laki-Laki sebesar 53 persen (384.010 Jiwa) sedangkan penduduk perempuan sebesar 47 persen (346.000 Jiwa).

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 2 Piramida Penduduk Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



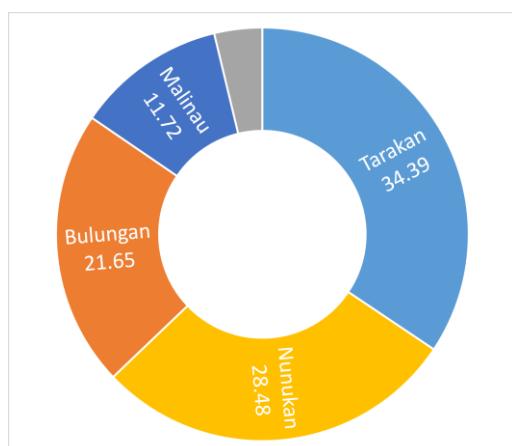
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

dari saat ini untuk peningkatan kualitas SDM di berbagai bidang. Begitu juga dengan cukup tingginya usia produktif di Kalimantan Utara perlu dibarengi dengan peningkatan kualitas SDM agar dapat menjadi SDM yang handal terutama dalam memasuki era 4.0 saat ini.

2.6 PERSEBARAN DAN KEPADATAN PENDUDUK

Persebaran penduduk menggambarkan distribusi jumlah penduduk dimasing-masing suatu wilayah. Sedangkan kepadatan penduduk suatu wilayah adalah perbandingan jumlah penduduk dengan luas wilayah yang memperlihatkan rata-rata jumlah penduduk setiap kilometer persegi.

Gambar 3 Persebaran Penduduk Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

28,48 persen, Bulungan 21,65 persen dan Malinau 11,72 persen. Wilayah yang sebaran

Dilihat dari piramida penduduk pada tahun 2023 maka kelompok penduduk usia produktif menempati proporsi penduduk terbesar di Provinsi Kalimantan Utara. Tentu hal tersebut perlu disikapi secara bijak. Dimana jumlah penduduk usia produktif yang cukup besar tersebut jangan sampai menjadi beban pembangunan di masa mendatang. Perlunya dimulai

Persebaran penduduk yang tidak merata perlu mendapat perhatian karena berkaitan dengan daya dukung terhadap lingkungan. Persebaran penduduk di Kalimantan Utara secara geografis dapat dikatakan belum merata sehingga menyebabkan terjadinya perbedaan tingkat kepadatan penduduk antar daerah yang cukup besar. Pada tahun 2023 di Kalimantan Utara sebaran penduduk yang terbanyak di Kota Tarakan, yaitu sekitar 34,39 persen dari seluruh total penduduk. Selanjutnya adalah di Kabupaten Nunukan



penduduknya paling kecil adalah Kabupaten Tana Tidung hanya 3,76 persen merupakan wilayah kabupaten baru hasil pemekaran dari Kabupaten Bulungan.

Tabel 3 Penduduk, Luas Wilayah dan Kepadatan menurut Kabupaten/Kota Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/Kota	Penduduk (Ribu Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan Penduduk/ Km ²
Malinau	85,53	38.902,00	2
Bulungan	158,05	13.880,00	11
Tana Tidung	27,47	3.504,0	8
Nunukan	207,87	13.564,00	15
Tarakan	251,09	251,00	1000
Kalimantan Utara	730,01	70.101,00	10

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

2.7 SOSIAL EKONOMI

2.7.1 KEMISKINAN

BPS menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*) untuk mengukur kemiskinan. Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Standar minimum yang digunakan untuk menentukan apakah penduduk dianggap telah mampu memenuhi kebutuhan dasar tersebut adalah garis kemiskinan.

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Garis Kemiskinan Makanan (GKM) merupakan nilai pengeluaran kebutuhan minimum makanan yang disetarakan dengan 2.100 kkalori per kapita per hari. Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM) adalah kebutuhan minimum untuk perumahan, sandang, pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya.

Garis kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara tahun 2018 – 2023 terus mengalami peningkatan setiap tahunnya. Pada Tahun 2023, garis kemiskinan di wilayah Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp 851.133. Jumlah penduduk miskin di Provinsi Kalimantan pada Tahun 2023 mencapai 47,97 ribu penduduk (6,45 persen). Indeks Kedalaman Kemiskinan di Provinsi Kalimantan Utara pada Maret 2023 adalah 0,56 (perkotaan), 0,78 (perdesaan), dan 0,64 (perkotaan dan perdesaan). Sementara Indeks Keparahan Kemiskinan di Provinsi



Kalimantan Utara kondisi Maret 2024 adalah 0,11 (perkotaan), 0,10 (perdesaan), dan 0,11 (perkotaan dan perdesaan).

Tabel 4 Jumlah dan Persentase Penduduk Miskin Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2023

Kab/Kota	Jumlah Penduduk Miskin (Ribu)		Persentase Penduduk Miskin	
	2022	2023	2022	2023
Malinau	5,93	5,95	6,64	6,54
Bulungan	12,58	12,19	9,32	8,99
Tana Tidung	1,35	1,47	4,45	4,62
Nunukan	12,86	11,88	6,13	5,33
Tarakan	16,75	16,49	6,30	6,10
Kalimantan Utara	50,58	47,97	6,77	6,45

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Dilihat Dari tabel di atas terjadi penurunan persentase penduduk miskin di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023. Apabila dilihat dari segi jumlah, terjadi penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2023. Penurunan tersebut dapat dilihat terjadi pada sebagian Kabupaten Kota di wilayah Kalimantan Utara.

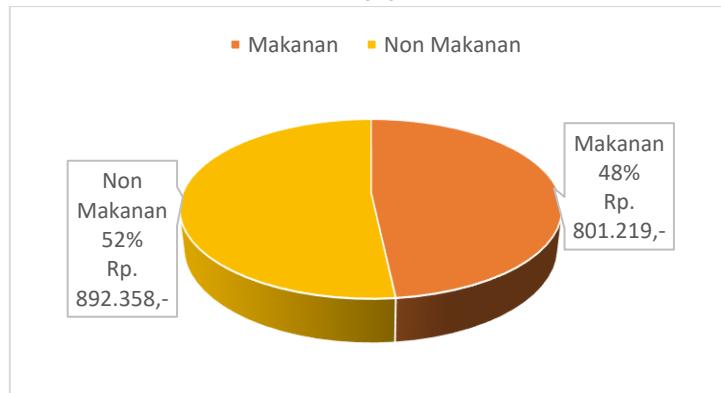
2.7.2 RATA – RATA PENGELOUARAN PER KAPITA

Rata-rata pengeluaran per kapita adalah salah satu indikator yang dapat memberikan gambaran keadaan kesejahteraan penduduk. Di Provinsi Kalimantan Utara, proporsi rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok bukan makanan lebih besar dibandingkan rata-rata pengeluaran per kapita sebulan untuk kelompok makanan.

Pada tahun 2023, rata-rata pengeluaran per kapita selama satu bulan untuk kelompok bukan makanan sebesar Rp. 892.358,- sedangkan untuk kelompok makanan sebesar Rp. 801.219,-. Sehingga, total rata-rata pengeluaran per kapita sebesar Rp. 1.693.577,-. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan Tahun 2022 sebesar Rp. 1.570.185,98. Proporsi terbesar untuk kelompok pengeluaran bukan makanan adalah perumahan dan fasilitas rumah tangga sebesar 30,06 persen. Proporsi terbesar untuk kelompok pengeluaran makanan adalah makanan dan minuman jadi sebesar 13,45 persen.

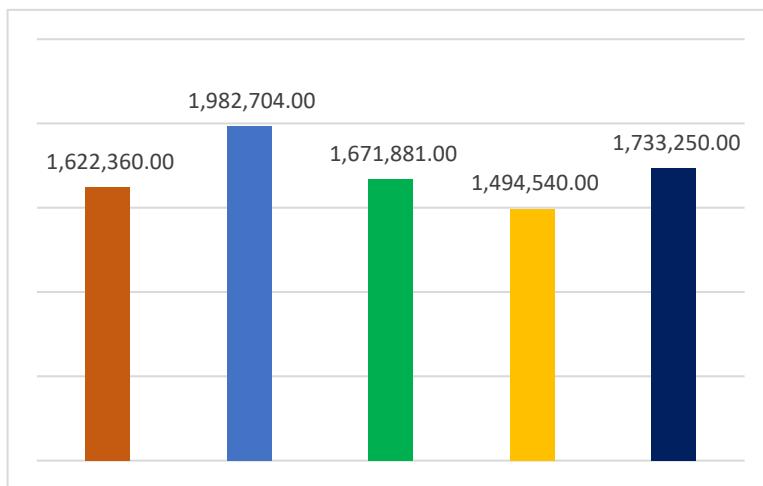


Gambar 4 Persentase Pengeluaran Per Kapita Sebulan Makanan Dan Bukan Makanan Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 5 Rata-Rata Pengeluaran Per Kapita (Rupiah) Menurut Kab/Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Jika dilihat menurut kabupaten / kota, maka rata-rata pengeluaran perkapita sebulan penduduk di Kab Bulungan merupakan yang tertinggi di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023, adapun yang terendah pada Kabupaten Nunukan.

2.7.3 PENDUDUK BERDASARKAN STATUS PEKERJAAN UTAMA

Status/kedudukan pekerjaan adalah jenis kedudukan kepala rumah tangga /anggota rumah tangga dalam pekerjaan utama. Pada Tahun 2023 status pekerjaan utama penduduk Prov. Kalimantan Utara terbanyak sebagai Buruh/ Karyawan/ Pegawai sebanyak 165.558 jiwa, lalu diikuti oleh Berusaha Sendiri sebanyak 69.897 jiwa dan Berusaha dibantu pekerja tidak tetap/pekerja keluarga/tidak dibayar sebanyak 50.756 jiwa.



Gambar 6 Persentase Penduduk Usia 15 Keatas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Kalimantan Utara tahun 2023

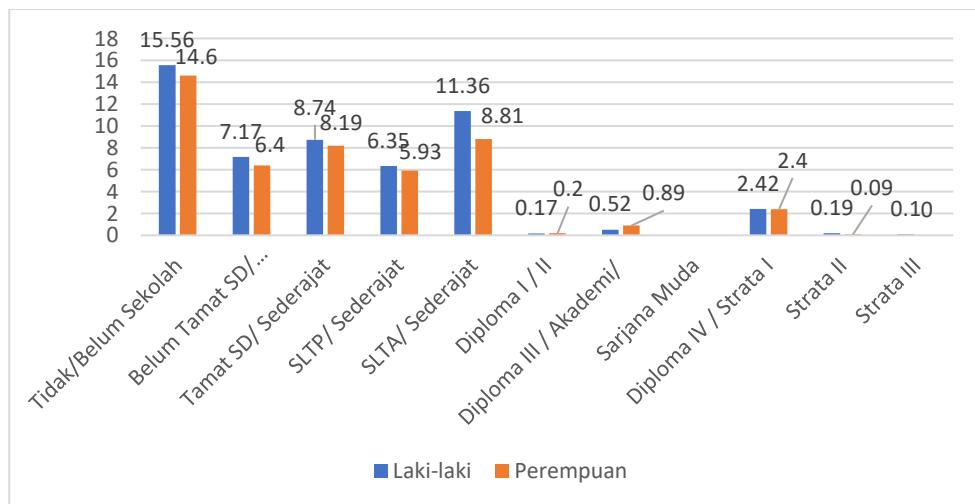


Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

2.7.4 PENDUDUK BERDASARKAN TINGKAT PENDIDIKAN

Tingkat Pendidikan menjadi salah satu ukuran untuk melihat kualitas penduduk. Semakin tinggi tingkat Pendidikan yang diselesaikan maka semakin baik kualitas penduduk di suatu wilayah. Pada tahun 2023 komposisi penduduk Provinsi Kalimantan Utara terbanyak pada Penduduk yang Tidak/Belum Sekolah sebesar 29,31 persen, lalu diikuti oleh Penduduk dengan Tingkat Pendidikan SLTA/Sederajat sebesar 19,58 persen.

Gambar 7 Persentase Penduduk Berdasarkan Tingkat Pendidikan di Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: Dsdukcapil Prov. Kaltara



Tabel 5 Jumlah Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Pendidikan	Laki-Laki		Perempuan		Total	%
	N	%	N	%		
Tidak/Belum Sekolah	116.287	15,56	109.115	14,60	225.402	30,16
Belum Tamat SD/ Sederajat	53.588	7,17	47.825	6,40	101.413	13,57
Tamat SD/ Sederajat	65.299	8,74	61.207	8,19	125.506	16,93
SLTP/ Sederajat	47.497	6,35	44.346	5,93	91.843	12,29
SLTA/ Sederajat	84.902	11,36	65.884	8,81	150.786	20,17
Diploma I / II	1.303	0,17	1.466	0,20	2.769	0,37
Diploma III / Akademi/ Sarjana Muda	3.898	0,52	6.618	0,89	10.516	1,41
Diploma IV / Strata I	18.087	2,42	17.909	2,40	35.996	4,82
Strata II	1.418	0,19	686	0,09	2.104	0,28
Strata III	60	0,10	20	0,00	80	0,01
Kalimantan Utara	392.339	52	355.076	48	747.415	100

Sumber: Disdukcapil Prov. Kaltara



INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMBANGUNAN PEREMPUAN & ANAK KALIMANTAN UTARA

3.1 INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA (IPM)

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia. IPM menjelaskan bagaimana penduduk dapat mengakses hasil pembangunan dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya. Angka IPM dibentuk oleh tiga dimensi dasar, yaitu umur panjang dan hidup sehat (*a long and healthy life*), pengetahuan (*knowledge*), dan standar hidup layak (*decent standard of living*). Umur panjang dan hidup sehat digambarkan oleh Umur Harapan Hidup saat lahir (UHH), yaitu jumlah tahun yang diharapkan dapat dicapai oleh bayi yang baru lahir untuk hidup, dengan asumsi bahwa pola angka kematian menurut umur pada saat kelahiran sama sepanjang usia bayi. Pengetahuan diukur melalui indikator Rata-rata Lama Sekolah dan Harapan Lama Sekolah. Rata-rata Lama Sekolah (RLS) adalah rata-rata lamanya (tahun) penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal. Sementara Harapan Lama Sekolah (HLS) didefinisikan sebagai lamanya (tahun) sekolah formal yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang. Standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan, yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli (*purchasing power parity*). Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan, yaitu kecepatan dan status pencapaian.

1. Manfaat IPM

- IPM merupakan indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya membangun kualitas hidup manusia (masyarakat/penduduk)
- IPM merupakan salah satu indikator target pembangunan pemerintah dalam pembahasan asumsi makro di DPR-RI
- IPM juga digunakan sebagai salah satu alokator dalam penentuan Dana Alokasi Umum (DAU)
- Komponen IPM (HLS, RLS, dan Pengeluaran) merupakan indikator yang digunakan dalam penghitungan Dana Insentif Daerah (DID)



2. Status IPM

Status IPM menggambarkan level pencapaian pembangunan manusia dalam suatu periode:

- Sangat tinggi : IPM ≥ 80
- Tinggi : $70 \leq \text{IPM} < 80$
- Sedang : $60 \leq \text{IPM} < 70$
- Rendah : $\text{IPM} < 60$

Pembangunan manusia di Kalimantan Utara terus mengalami kemajuan. Pada tahun 2023, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kalimantan Utara mencapai 72,88. Angka ini meningkat sebesar 0,67 poin atau tumbuh sebesar 0,93 persen dibandingkan tahun 2022. Status capaian pembangunan manusia Kalimantan Utara berstatus “tinggi”.

Angka IPM yang terus meningkat menggambarkan Kualitas kesehatan, pendidikan, dan pemenuhan kebutuhan hidup penduduk Kalimantan Utara yang terus mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Tabel 6 IPM Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	73,12	73,55	74,00
Bulungan	72,27	72,56	73,20
Tana Tidung	68,59	69,45	70,06
Nunukan	67,18	67,88	68,43
Tarakan	76,30	76,75	77,61
Kalimantan Utara	71,57	72,21	72,88
Nasional	73,16	73,77	74,39

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

IPM tertinggi di Kota Tarakan dan IPM terendah di Kabupaten Nunukan.

Kesenjangan juga ditunjukkan dengan memperhatikan posisi relatif antara IPM kab/kota terhadap rata-rata IPM Provinsi, terlihat bahwa IPM Kota Tarakan, Kabupaten Malinau dan Kabupaten Bulungan yang berada diatas IPM Provinsi, sementara IPM kabupaten lainnya berada dibawah nilai IPM Provinsi. Sementara IPM Provinsi Kalimantan Utara masih dibawah Nasional sehingga perlu langkah-langkah yang komprehensif untuk meningkatkan IPM terutama dari sisi pendapatan yang identik dengan pengeluaran perkapita yang masih berada jauh dari pengeluaran perkapita Nasional.

Meski secara umum pembangunan manusia di Kalimantan Utara mengalami kemajuan, namun kesenjangan pembangunan manusia antar kabupaten / kota masih terjadi. Disparitas kesenjangan pembangunan manusia yang digambarkan dengan besaran IPM pada tahun 2023 bervariasi antara 68,43 s/d 77,61 dengan



Berdasarkan komponen pembentuk IPM, dari dimensi kesehatan, Bayi yang lahir pada tahun 2023 memiliki harapan untuk dapat hidup hingga 73,54 tahun, lebih lama 0,03 tahun dibandingkan tahun 2022. Dari Dimensi Pendidikan, Anak-anak yang pada tahun 2023 berusia 7 tahun memiliki harapan dapat menikmati pendidikan selama 13,2 tahun, lebih lama 0,14 tahun dibandingkan tahun 2022, dan Penduduk usia 25 tahun ke atas secara rata-rata telah menempuh pendidikan selama 9,34 tahun, lebih lama 0,07 tahun dibandingkan tahun 2022. Dari dimensi pemenuhan kebutuhan hidup, Rata-rata pengeluaran per kapita penduduk pada tahun 2023 sebesar 9,734 juta rupiah per tahun, meningkat 384 ribu rupiah dibandingkan tahun 2022.

Dilihat dari komponen Umur Harapan Hidup maka UHH Provinsi kalimantan Utara dalam tiga tahun terakhir mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2021 Umur Harapan Hidup penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar 73,49 tahun meningkat pada tahun 2023 menjadi 73,54 tahun. Dan jika dibandingkan dengan capaian nasional maka Umur Harapan Hidup penduduk Provinsi Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan dengan Umur Harapan Hidup nasional.

Adapun Kota Tarakan merupakan wilayah dengan Umur Harapan Hidup tertinggi di provinsi Kalimantan Utara, dan satu satunya yang memiliki UHH di atas nasional pada tahun 2023.

Tabel 7 Umur Harapan Hidup Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	73,22	73,23	73,25
Bulungan	73,78	73,80	73,83
Tana Tidung	73,42	73,44	73,47
Nunukan	73,08	73,09	73,11
Tarakan	74,18	74,21	74,24
Kalimantan Utara	73,49	73,51	73,54
Nasional	73,46	73,70	73,93

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 8 Harapan Lama Sekolah Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	13,31	13,33	13,34
Bulungan	13,01	13,03	13,04
Tana Tidung	12,22	12,38	12,39
Nunukan	12,65	12,67	12,68
Tarakan	14,03	14,04	14,21
Kalimantan Utara	12,94	13,06	13,20
Nasional	13,08	13,10	13,15

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



Trend Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dimana pada tahun 2021 Harapan Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 12,94 tahun meningkat menjadi 13,2 tahun pada tahun 2023. Adapun posisi Provinsi Kalimantan Utara berada sedikit diatas angka nasional. Terdapat dua kabupaten/kota yang capaian Harapan Lama Sekolahnya di atas capaian nasional yaitu Kota Tarakan dan Kabupaten Malinau.

Tabel 9 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	9,40	9,41	9,43
Bulungan	9,19	9,20	9,21
Tana Tidung	8,80	8,97	9,04
Nunukan	8,17	8,24	8,26
Tarakan	9,98	10,08	10,36
Kalimantan Utara	9,11	9,27	9,34
Nasional	8,54	8,69	8,77

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dimana pada tahun 2021 Rata-Rata Lama Sekolah Provinsi Kalimantan Utara sebesar 9,11 tahun meningkat menjadi 9,34 tahun pada tahun 2023. Adapun posisi Provinsi Kalimantan Utara berada di atas angka nasional. Namun terdapat satu kabupaten/kota yang capaian Rata-

Tabel 10 Pengeluaran Perkapita Pertahun (Rp.000) Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	9.928	10.304	10.708
Bulungan	9.423	9.641	10.205
Tana Tidung	7.676	8.012	8.386
Nunukan	7.064	7.446	7.787
Tarakan	11.261	11.596	11.992
Kalimantan Utara	9.075	9.350	9.734
Nasional	11.156	11.479	11.899

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pengeluaran Perkapita Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dimana pada tahun 2021 pengeluaran perkapita penduduk Provinsi Kalimantan Utara sebesar Rp. 9.075.000,- kemudian pada tahun 2023 meningkat menjadi Rp. 9.734.000,-. Meskipun posisi Provinsi Kalimantan Utara masih berada di bawah



capaian nasional, namun terdapat satu kabupaten/kota yang capaian Pengeluaran Perkapitanya di atas capaian nasional yaitu Kota Tarakan.

3.2 INDEKS PEMBANGUNAN GENDER (IPG)

Istilah Gender digunakan untuk menjelaskan perbedaan peran perempuan dan laki-laki yang bersifat bawaan sebagai ciptaan Tuhan. Gender adalah perbedaan peran, kedudukan, tanggung jawab, dan pembagian kerja antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh masyarakat berdasarkan sifat perempuan dan laki-laki yang dianggap pantas menurut norma, adat istiadat, kepercayaan atau kebiasaan masyarakat.

Gender tidak sama dengan kodrat. Kodrat adalah sesuatu yang ditetapkan oleh Tuhan YME, sehingga manusia tidak mampu untuk merubah atau menolak. Sementara itu, kodrat bersifat universal, misalnya melahirkan, menstruasi dan menyusui adalah kodrat bagi perempuan, sementara mempunyai sperma adalah kodrat bagi laki-laki.

Ketidakadilan gender merupakan kondisi tidak adil akibat dari sistem dan struktur sosial, sehingga perempuan maupun laki-laki menjadi korban dari pada sistem tersebut. Laki-laki dan perempuan berbeda hanya karena kodrat antara laki-laki dan perempuan berbeda. Keadilan gender akan dapat terjadi jika tercipta suatu kondisi di mana porsi dan siklus sosial perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis.

IPG digunakan untuk mengukur pencapaian dimensi dan variabel yang sama seperti IPM, tetapi mengungkapkan ketidakadilan pencapaian well-being laki-laki dan perempuan.

Metodologi penghitungan IPG mengacu pada metodologi baru yang digunakan oleh UNDP tahun 2010 menggambarkan rasio IPM Perempuan dengan IPM Laki-laki.

Selama periode 2021-2023, terdapat peningkatan positif pada nilai IPG, baik di level Nasional maupun di wilayah Kalimantan Utara. Jika dibandingkan, terlihat bahwa isu kesetaraan gender masih merupakan suatu tantangan yang harus dihadapi oleh Pemerintah Daerah Kalimantan Utara. Ukuran pembangunan manusia berbasis gender di wilayah Kalimantan Utara masih berada dibawah rata-rata Nasional. Pada tahun 2023 pencapaian pembangunan gender di Kalimantan Utara mencapai 88,73. Hal ini menunjukkan bahwa IPM perempuan lebih rendah dibandingkan IPM laki-laki. Kondisi yang terjadi di wilayah Kalimantan Utara tersebut juga merupakan gambaran kondisi yang dialami secara umum pada level nasional. Namun demikian, jika diperhatikan besaran tingkat capaian pembangunan manusia perempuan di Kalimantan Utara masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata pembangunan manusia perempuan di level nasional. Artinya, tingkat ketimpangan pembangunan manusia antara perempuan dan laki-laki relatif lebih tinggi di Kalimantan Utara dibandingkan rata-rata nasional.



Dengan memperhatikan masing-masing komponen pembentuk IPG, terlihat bahwa secara umum capaian aspek pendidikan dan kesehatan baik untuk laki-laki dan perempuan di Kalimantan Utara lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi nasional. Hal ini ditunjukkan oleh besaran nilai indikator pendidikan yang lebih tinggi dibandingkan besaran nilai rata-rata nasional dari tahun ke tahun. Namun demikian, komponen kesehatan dan pengeluaran menunjukkan kondisi sebaliknya.

Tabel 11 IPG Provinsi dan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	83,63	84,29	84,54
Bulungan	86,18	86,31	86,81
Tana Tidung	80,06	80,61	80,82
Nunukan	84,50	85,20	85,41
Tarakan	93,26	93,31	94,00
Kalimantan Utara	87,67	88,20	88,73
Nasional	91,60	92,05	92,29

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Secara spasial dengan merinci Indeks Pembangunan Gender menurut kabupaten/kota, terlihat bahwa terdapat variasi besaran nilai capaian pembangunan berbasis gender. Pada tahun 2023, indeks tertinggi dicapai oleh Kota Tarakan sebesar 94,00, sementara yang terendah ada di Kabupaten Tana Tidung sebesar 80,82. Jika dibandingkan dengan rata-rata Provinsi Kalimantan Utara, terlihat bahwa hanya Tarakan

berada diatas rata-rata Provinsi, jauh mengungguli empat kabupaten lainnya dalam hal pembangunan manusia berbasis gender.

Tabel 12 Umur Harapan Hidup Laki-laki & Perempuan Kab/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	71,94	75,39	71,95	75,41	71,96	75,43
Bulungan	72,25	76,16	72,26	76,19	72,27	76,23
Tana Tidung	71,28	75,67	71,29	75,70	71,31	75,74
Nunukan	71,06	75,21	71,07	75,22	71,08	75,25
Tarakan	73,47	76,71	73,49	76,75	73,52	76,78
Kalimantan Utara	71,32	75,76	71,34	75,79	71,36	75,83
Nasional	71,30	75,72	71,46	76,05	71,61	76,37

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2023 Umur Harapan Hidup perempuan di Provinsi Kalimantan Utara berada di bawah capaian nasional. Dimana jika dilihat dari capaian antar waktu dapat



dilihat bahwa Umur Harapan Hidup perempuan di Provinsi Kalimantan Utara mengalami kenaikan dalam periode dua tahun terakhir dengan laju kenaikan lebih tinggi dibandingkan penduduk laki-laki. Adapun kabupaten/kota yang capaian Umur Harapan Hidup perempuannya diatas capaian nasional yaitu Kota Tarakan.

Trend Harapan Lama Sekolah penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dimana pada tahun 2021 Harapan Lama Sekolah penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 13,26 tahun meningkat menjadi 13,63 tahun pada tahun 2023.

Tabel 13 Harapan Lama Sekolah Laki-laki dan Perempuan Kab/Kota Tahun 2021-2023

Adapun posisi Trend Harapan Lama Sekolah penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara berada pada posisi diatas nasional. Walaupun terdapat tiga kabupaten/kota yang capaian Harapan Lama

Kab /Kota	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	13,19	13,73	13,20	13,85	13,22	13,86
Bulungan	13,20	12,78	13,22	12,80	13,23	13,02
Tana Tidung	12,42	12,22	12,58	12,23	12,59	12,27
Nunukan	12,64	12,71	12,66	12,72	12,67	12,74
Tarakan	13,54	14,45	13,55	14,47	13,56	14,76
Kalimantan Utara	12,94	13,26	12,95	13,42	12,97	13,63
Nasional	12,95	13,22	12,96	13,28	12,98	13,33

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

perempuannya dibawah capaian nasional yaitu Kabupaten Tana Tidung, Kabupaten Nunukan dan Kabupaten Bulungan.

Tabel 14 Rata-Rata Lama Sekolah Perempuan Kab/Kota Tahun 2021-2023

Kabupaten/ Kota	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	9,56	8,70	9,57	8,89	9,63	8,90
Bulungan	9,76	8,80	9,77	8,82	9,78	8,83
Tana Tidung	9,32	8,20	9,42	8,50	9,63	8,51
Nunukan	8,59	7,92	8,60	8,18	8,62	8,20
Tarakan	10,54	9,91	10,64	9,99	10,65	10,29
Kalimantan Utara	9,76	8,93	9,77	9,09	9,78	9,17
Nasional	8,92	8,17	8,99	8,39	9,07	8,48

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Lama Sekolah penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,93 tahun meningkat menjadi 9,17 tahun pada tahun 2023.

Rata-Rata Lama Sekolah penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara menunjukkan kenaikan dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Dimana pada tahun 2021 Rata-Rata



Adapun kondisi Rata-Rata Lama Sekolah penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara telah berada di atas nasional. Namun terdapat satu kabupaten/kota yang capaian Rata-Rata Lama Sekolah penduduk perempuannya di bawah capaian nasional yaitu Kabupaten Nunukan. Secara umum Rata-Rata Lama Sekolah penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara masih lebih rendah jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki.

Secara umum, level pengeluaran per kapita penduduk di Kalimantan Utara relatif lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Jika dirinci menurut jenis kelamin, maka terlihat pula bahwa level pengeluaran per kapita, baik laki-laki dan perempuan, di wilayah Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Lebih lanjut, terdapat perbedaan kecepatan perubahan komponen pengeluaran antar gender. Untuk Kalimantan Utara, peningkatan pendapatan laki-laki (yang diukur dengan nilai pengeluaran) lebih cepat dibandingkan peningkatan pada pendapatan perempuan.

Tabel 15 Pengeluaran Perkapita Disesuaikan Perempuan (Rp.000) Kab/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	14.735	5.234	15.283	5.443	15.742	5.655
Bulungan	14.477	6.460	14.802	6.600	15.398	6.886
Tana Tidung	11.420	3.880	11.912	4.058	12.309	4.228
Nunukan	10.236	4.376	10.797	4.605	11.299	4.788
Tarakan	15.655	9.887	16.132	10.170	16.675	10.425
Kalimantan Utara	12.859	5.989	13.239	6.161	13.703	6.384
Nasional	15.770	9.050	16.215	9.281	16.736	9.579

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Secara nasional pendapatan laki-laki dan perempuan secara rata-rata meningkat lebih cepat sehingga nilai IPG Kalimantan Utara lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional, yang mengindikasikan bahwa isu gender masih merupakan tantangan yang harus dijawab dalam pembangunan manusia di Kalimantan Utara.

3.3 INDEKS PEMBERDAYAAN GENDER (IDG)

IDG menunjukkan apakah wanita dapat secara aktif berperan serta dalam kehidupan ekonomi dan politik, IDG menitikberatkan pada partisipasi, dengan cara mengukur ketimpangan gender di bidang ekonomi, partisipasi politik, dan pengambilan keputusan. Metode penghitungan IDG masih mengacu pada metodologi lama sampai Indeks Ketidaksetaraan Gender (IKG) bisa dihitung.



Indeks Pemberdayaan Gender merupakan indeks komposit yang tersusun dari beberapa variabel yang mencerminkan tingkat keterlibatan wanita dalam proses pengambilan keputusan dibidang politik dan ekonomi. Untuk mengukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci pada partisipasi ekonomi dan politik, serta pengambilan keputusan. Nilainya berkisar antara 0-100 persen, Bila nilai IDG semakin tinggi (mendekati angka 100) maka perempuan semakin mengambil peran aktif yang penting dalam kehidupan ekonomi dan politik atau makin sempurna pemberdayaannya.

Komponen Pembentuk IDG

- Keterlibatan Perempuan di Parlemen
- Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi
- Sumbangan Pendapatan Perempuan

Capaian pemberdayaan gender diukur melalui indeks komposit yang disebut Indeks Pemberdayaan Gender (IDG). Indeks tersebut digunakan untuk mengkaji sejauh mana persamaan peranan perempuan dalam proses pengambilan keputusan serta kontribusinya dalam aspek ekonomi maupun sosial.

Tabel 16 IDG Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	70,11	69,10	72,55
Bulungan	64,45	65,72	65,55
Tana Tidung	60,52	60,82	61,54
Nunukan	77,67	77,41	78,68
Tarakan	58,92	59,15	58,61
Kalimantan Utara	61,70	61,92	58,86
Nasional	76,26	75,59	76,90

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

rata-rata nasional, yaitu sebesar 76,90. Hal ini hendaknya mendapat perhatian yang serius oleh pemerintah agar dapat meningkatkan pemberdayaan perempuan Kalimantan Utara dimasa mendatang.

Pemberdayaan perempuan juga diukur melalui indikator persentase perempuan sebagai tenaga profesional. Komponen ini menangkap informasi mengenai kondisi wanita dalam berperan aktif untuk pengambilan keputusan di masyarakat. Gambaran keterlibatan perempuan pada dunia pekerjaan sebagai tenaga profesional juga secara tidak langsung mengindikasikan kemampuan wanita turut berpartisipasi dalam aktivitas ekonomi.

IDG Kalimantan Utara pada periode tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi dalam capaiannya. Hal ini ditunjukkan oleh kenaikan nilai IDG dari 61,70 di tahun 2021 meningkat menjadi 61,92 di tahun 2022 kemudian menurun menjadi 58,86 di tahun 2023. Nilai tersebut masih berada dibawah



Secara umum terlihat bahwa peran dan partisipasi perempuan Kalimantan Utara baik dalam pengambilan keputusan atau memberikan kontribusi secara aktif dalam bidang ekonomi, sosial dan politik masih perlu ditingkatkan. Pada aspek politik, indikator proporsi anggota parlemen perempuan di Kalimantan Utara relatif lebih baik jika dibandingkan dengan proporsi perempuan yang aktif dalam politik pada level nasional.

Tabel 17 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kab/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	20,00	20,00	20,00
Bulungan	20,00	20,00	20,00
Tana Tidung	15,00	15,00	15,00
Nunukan	32,00	32,00	32,00
Tarakan	10,00	10,00	10,00
Kalimantan Utara	11,43	11,43	8,57
Nasional	21,89	21,74	22,14

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2023, dari total anggota DPRD Provinsi Kalimantan Utara, 8,57 persen berjenis kelamin perempuan. Sementara itu, keterlibatan perempuan didalam parlemen di level kabupaten/kota lebih tinggi dibanding Provinsi Kalimantan Utara.

Pada persentase perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi dan teknisi, terlihat bahwa peran perempuan dalam pengambilan keputusan relatif lebih rendah jika dibandingkan dengan rata-rata nasional. Terdapat kecenderungan kenaikan partisipasi perempuan.

Dari tabel disamping terlihat bahwa peranan wanita dalam aktivitas pengambilan keputusan sudah cukup baik dengan kabupaten/kota memiliki besaran nilai yang relatif homogen.

Tabel 18 Persentase Perempuan sebagai tenaga Manager, Profesional, Administrasi, Teknisi Kab/Kota 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	37,30	33,57	45,63
Bulungan	43,51	43,79	46,16
Tana Tidung	37,32	43,66	50,45
Nunukan	38,43	37,91	49,12
Tarakan	48,82	48,38	45,92
Kalimantan Utara	42,91	43,18	46,97
Nasional	49,99	48,65	49,53

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara



Komponen ketiga memberikan ukuran partisipasi perempuan dalam penciptaan pendapatan bagi keluarganya, sekaligus mengukur peran aktif wanita dalam aktivitas ekonomi. Indikator sumbangan pendapatan wanita menunjukkan bahwa relatif sedikit perubahan yang berarti selama tiga tahun terakhir. Selain itu, besaran nilai proporsi sumbangan pendapatan perempuan di Kalimantan Utara

lebih rendah dibandingkan rata-rata nasional. Sementara itu, pada level nasional peran perempuan dalam kegiatan ekonomi cenderung menurun.

Gambaran tersebut senada dengan kondisi yang digambarkan oleh komponen pendapatan pada indikator IPG, dimana kecepatan peningkatan pendapatan perempuan relatif lebih rendah dibandingkan dengan peningkatan pendapatan laki-laki. Akibatnya, posisi perempuan secara ekonomi dapat tertinggal lebih jauh apabila tidak dilakukan upaya untuk mendorong peran dan pemberdayaan perempuan dalam aktivitas ekonomi. Oleh karena itu, kebijakan terkait penciptaan lapangan kerja, khususnya bagi perempuan, perlu ditingkatkan untuk memberikan peluang bagi perempuan untuk dapat terlibat aktif dalam kegiatan ekonomi.

3.4 INDEKS KETIMPANGAN GENDER (IKG)

Indeks Ketimpangan Gender merupakan Indeks yang menjelaskan sejauh mana kehilangan pencapaian keberhasilan pembangunan dalam tiga aspek pembangunan manusia (kesehatan reproduksi, pemberdayaan, dan partisipasi ekonomi) sebagai akibat adanya ketimpangan gender. Besaran Indeks Ketimpangan Gender antara 0 s/d 1. Semakin tinggi indeks (mendekati 1) maka semakin timpang capaian keberhasilan pembangunan antara laki-laki dan perempuan.

IKG Kalimantan Utara pada periode tahun 2021-2023 mengalami fluktuasi dalam capaiannya. Hal ini ditunjukkan oleh penurunan nilai IKG dari 0,472 di tahun 2021 menurun menjadi 0,444 di tahun 2022 kemudian meningkat menjadi 0,452 di tahun 2023. Nilai pada tahun 2023 kembali berada diatas rata-rata nasional yang sebelumnya di tahun 2022 sempat berada di bawah rata-rata nasional. Hal ini hendaknya mendapat perhatian yang serius oleh

Tabel 19 Persentase Sumbangan Pendapatan Perempuan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	28,60	28,38	28,98
Bulungan	21,63	22,13	22,10
Tana Tidung	22,96	22,96	24,22
Nunukan	27,47	27,28	27,25
Tarakan	25,90	25,91	25,89
Kalimantan Utara	26,92	26,91	26,88
Nasional	37,22	37,17	37,09

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



pemerintah agar dapat menurunkan ketimpangan untuk mencapai keberhasilan pembangunan.

Tabel 20 IKG Provinsi dan Kab/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	0,515	0,511	0,491
Bulungan	0,439	0,453	0,388
Tana Tidung	0,472	0,496	0,480
Nunukan	0,429	0,370	0,370
Tarakan	0,410	0,244	0,367
Kalimantan Utara	0,472	0,444	0,452
Nasional	0,465	0,459	0,447

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan komponen pembentuk IKG, dari dimensi kesehatan reproduksi, proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup tidak di fasilitas kesehatan pada tahun 2023 sebesar 0,054, Artinya dari 1000 perempuan usia 15-49 tahun yang melahirkan anak lahir hidup, 54 diantaranya melahirkan tidak di fasilitas kesehatan. Angka tahun 2023 ini menurun 0,002 dibandingkan tahun 2022.

Tabel 21 Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Pernah Melahirkan Anak Lahir Hidup dalam 2 Tahun Terakhir Tidak di Fasilitas Kesehatan Menurut Kab/Kota, 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	0,188	0,207	0,168
Bulungan	0,091	0,074	0,045
Tana Tidung	0,093	0,157	0,130
Nunukan	0,079	0,039	0,045
Tarakan	0,038	0,001	0,023
Kalimantan Utara	0,080	0,056	0,054
Nasional	0,154	0,140	0,126

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat Kota Tarakan memiliki angka terendah yakni di angka 0,023, sedangkan tertinggi di kabupaten Malinau yakni di angka 0,168. Jika dibandingkan dengan angka Nasional, Kabupaten Bulungan, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan sudah berada di bawah angka Nasional, sedangkan Kabupaten Malinau dan Kabupaten Tana Tidung masih berada di Atas Angka Nasional.

Masih pada dimensi kesehatan reproduksi, Proporsi perempuan usia 15-49 tahun yang saat melahirkan anak lahir hidup pertama berusia kurang dari 20 tahun pada tahun 2023 sebesar 0,289, Artinya dari 1000 perempuan usia 15-49 tahun yang pernah melahirkan anak lahir hidup, 289 diantaranya melahirkan anak lahir hidup pertama saat berusia kurang dari 20 tahun. Angka tahun 2023 ini menurun 0,003 dibandingkan tahun 2022.



Tabel 22 Proporsi Perempuan Pernah Kawin 15-49 tahun yang Melahirkan Anak Lahir Hidup Yang Pertama Kali Berumur Kurang dari 20 tahun Menurut Kab/Kota, 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	0,375	0,390	0,359
Bulungan	0,293	0,336	0,330
Tana Tidung	0,341	0,277	0,297
Nunukan	0,352	0,343	0,335
Tarakan	0,221	0,191	0,209
Kalimantan Utara	0,295	0,292	0,289
Nasional	0,262	0,265	0,258

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat Kota Tarakan memiliki angka terendah yakni di angka 0,209, sedangkan tertinggi di kabupaten Malinau yakni di angka 0,359. Jika dibandingkan dengan angka Nasional, Hanya Kota Tarakan yang sudah berada di bawah angka Nasional, sedangkan 4 Kabupaten Lainnya masih berada di Atas Angka Nasional.

Berdasarkan dimensi pemberdayaan, persentase perempuan yang menjadi anggota legislative pada tahun 2023 sebesar 8,57 persen, Angka tahun 2023 ini menurun 2,86 persen dibandingkan tahun 2022.

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat Kabupaten Nunukan memiliki persentase tertinggi yakni di angka 32 persen, sedangkan terendah di Kota Tarakan yakni di angka sepuluh persen. Angka di Kabupaten/Kota seluruhnya berada di atas Angka Provinsi yang hanya di angka 8,57 persen, akan tetapi hanya Kabupaten Nunukan yang sudah lebih tinggi dari angka Nasional.

Tabel 23 Keterlibatan Perempuan di Legislatif Menurut Kab/Kota Tahun 2021-2023 (persen)

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	20,00	20,00	20,00
Bulungan	20,00	20,00	20,00
Tana Tidung	15,00	15,00	15,00
Nunukan	32,00	32,00	32,00
Tarakan	10,00	10,00	10,00
Kalimantan Utara	11,43	11,43	8,57
Nasional	21,89	21,74	22,14

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Masih pada dimensi pemberdayaan, Persentase Penduduk Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA pada tahun 2023 sebesar 41,95 persen. Angka ini terus



mengalami peningkatan dari tahun 2021-2023. Dari tahun 2022 ke tahun 2023 peningkatannya sebesar 0,47 persen poin.

Tabel 24 Persentase Penduduk Perempuan dengan Pendidikan Minimal SMA Menurut Kab/Kota, 2021-2023

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	32,37	42,61	43,08
Bulungan	40,28	39,73	41,29
Tana Tidung	36,33	40,76	38,64
Nunukan	28,69	33,61	32,87
Tarakan	47,64	48,27	49,47
Kalimantan Utara	38,66	41,48	41,95
Nasional	34,87	36,95	37,60

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat Kota Tarakan memiliki angka tertinggi yakni di angka 49,47 persen, sedangkan terendah di Kabupaten Nunukan yang hanya di angka 32,87 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, hanya Kabupaten Nunukan yang masih berada di bawah angka nasional, sedangkan 4 kabupaten/kota lainnya sudah berada di atas angka nasional.

Berdasarkan dimensi Pasar Tenaga Kerja, Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan pada tahun 2023 berada di angka 53,60 persen, Artinya dari 100 perempuan usia kerja, 53 – 54 diantaranya masuk dalam kelompok angkatan kerja. Angka tahun 2023 ini meningkat 4,3 persen poin dibandingkan tahun 2022.

Tabel 25 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Perempuan Menurut Kab/Kota, 2021-2023

Apabila dilihat berdasarkan kabupaten/kota, dapat dilihat Kabupaten Tana Tidung memiliki angka tertinggi yakni di angka 61,90 persen, sedangkan terendah di Kota Tarakan yang hanya di angka 47,90 persen. Jika dibandingkan dengan angka nasional, Kabupaten Nunukan dan Kota Tarakan masih berada di bawah angka nasional, sedangkan 3 kabupaten/kota lainnya sudah berada di atas angka nasional.

Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	55,75	59,10	59,97
Bulungan	53,04	42,24	57,19
Tana Tidung	50,63	55,17	61,09
Nunukan	46,53	48,51	54,36
Tarakan	45,12	49,62	47,90
Kalimantan Utara	48,44	49,30	53,60
Nasional	53,34	53,41	54,52

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA

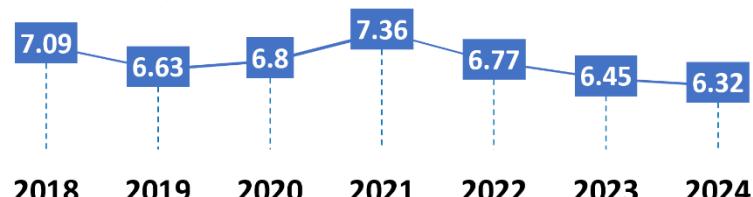
4.1 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG SOSIAL

Kemiskinan merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh Provinsi Kalimantan Utara, terutama di wilayah pedesaan dan kawasan terpencil. Namun, kemiskinan bukan hanya soal rendahnya pendapatan atau kurangnya akses terhadap kebutuhan dasar, melainkan juga terkait erat dengan ketimpangan gender yang masih melekat di masyarakat. Perempuan sering kali menjadi kelompok yang paling rentan terhadap dampak kemiskinan akibat posisi sosial, ekonomi, dan budaya yang kurang mendukung mereka untuk berpartisipasi secara penuh dalam pembangunan.

Perempuan di Kalimantan Utara, terutama di wilayah pedalaman, menghadapi berbagai hambatan struktural. Mereka memiliki akses yang terbatas terhadap pendidikan, kesehatan, dan peluang kerja yang layak. Dalam banyak kasus, perempuan juga berperan sebagai kepala keluarga, baik karena suaminya bekerja di luar daerah, meninggal, atau karena perceraian. Meski demikian, kontribusi perempuan dalam perekonomian keluarga sering kali tidak diakui secara formal. Pekerjaan mereka di sektor informal atau sebagai pengelola rumah tangga jarang dihitung sebagai bagian dari pembangunan ekonomi.

Dari data diketahui bahwa penurunan angka kemiskinan di provinsi Kalimantan utara relative stabil, walaupun sempat terjadi kenaikan angka kemiskinan pada tahun 2021, hal tersebut terjadi diakibatkan oleh situasi covid-19, setelah tahun 2021 terjadi penurunan yang konstan hingga mencapai angka 6,32%.

Gambar 8 Angka Kemiskinan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2018 – 2023



Sumber: EPS Provinsi Kalimantan Utara

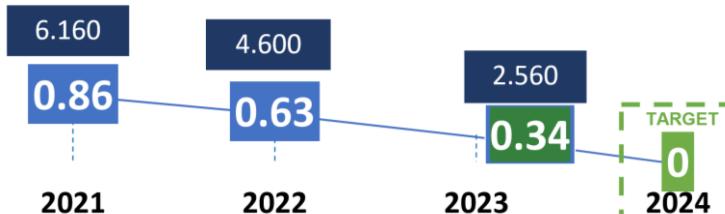
4.1.1 KONDISI KEMISKINAN EKSTREM DI PROVINSI KALTARA

Kemiskinan ekstrem adalah kondisi di mana seseorang hidup dengan pendapatan di bawah ambang batas minimum yang ditetapkan untuk memenuhi kebutuhan dasar



hidupnya. Berdasarkan standar internasional Bank Dunia, kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai individu yang hidup dengan pengeluaran kurang dari \$1,90 per kapita per hari dalam paritas daya beli (PPP). Kriteria ini mencakup ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan mendasar seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan. Di Indonesia, penghitungan kemiskinan ekstrem disesuaikan dengan kondisi lokal berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS).

Gambar 9 Angka Kemiskinan Ekstrem Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2018 – 2023



Sumber: Satgas KEMENKO PMK

Di Kalimantan Utara, tantangan pengentasan kemiskinan ekstrem menjadi salah satu prioritas pembangunan daerah. Berdasarkan data yang ditampilkan pada

grafik, jumlah penduduk yang berada dalam kategori kemiskinan ekstrem menunjukkan tren penurunan yang signifikan dari tahun ke tahun. Pada tahun awal yang dicatat, terdapat 6.160 jiwa atau setara dengan 0,86% dari total populasi yang hidup dalam kemiskinan ekstrem.

Berbagai upaya pemerintah daerah, seperti pemberdayaan ekonomi, peningkatan akses terhadap layanan dasar, dan program perlindungan sosial, berhasil menurunkan angka tersebut menjadi 4.600 jiwa (0,63%) pada periode berikutnya, dan kemudian turun lebih lanjut menjadi 2.560 jiwa (0,34%). Penurunan yang konsisten ini menunjukkan efektivitas program yang telah dijalankan, meskipun tantangan tetap ada untuk mencapai target nol kemiskinan ekstrem dalam jangka waktu yang telah ditetapkan.

Capaian ini memberikan optimisme, namun juga menuntut kerja sama yang lebih intensif antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Penghapusan kemiskinan ekstrem tidak hanya berbicara soal bantuan langsung, tetapi juga tentang pemberdayaan masyarakat secara berkelanjutan, peningkatan infrastruktur di daerah terpencil, serta kebijakan yang inklusif untuk kelompok rentan seperti perempuan, anak-anak, dan masyarakat adat.

4.1.2 ANALISIS DATA DEPRIVASI PEREMPUAN DI KALIMANTAN UTARA BERDASARKAN REGSOSEK

Berdasarkan data Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek), terdapat beberapa aspek utama yang menggambarkan deprivasi perempuan di Kalimantan Utara. Analisis berikut ini memerinci kondisi di masing-masing aspek:



Tabel 26 Data Deprivasi Perempuan Berdasarkan REGSOSEK

Aspek	Deprivasi Variabel	Jumlah Total Perempuan	Jumlah Perempuan Miskin
Pendidikan	Perempuan dengan Ijazah Tertinggi SD/Setara/Tidak Punya Ijazah SD	9.916	2.188
Kesehatan	Perempuan dengan Keluhan Kesehatan Kronis/Menahun	23.281	2.327
	Disabilitas	5.085	814
Infrastruktur Dasar	Kepala Keluarga Perempuan yang Tidak Memiliki Rumah	10.150	1.058
Ketenagakerjaan	Perempuan Tidak Bekerja Usia 15 Tahun ke Atas	111.600	7.963

Sumber: Data Registrasi Sosial Ekonomi – Bappenas & BPS

4.1.2.1 PENDIDIKAN

Data menunjukkan bahwa terdapat 9.916 perempuan yang tingkat pendidikannya hanya mencapai SD, setara, atau bahkan tidak memiliki ijazah sama sekali. Dari jumlah tersebut, sebanyak 2.188 perempuan tergolong miskin. Rendahnya tingkat pendidikan pada kelompok perempuan ini menjadi hambatan utama dalam akses ke pekerjaan formal dan kesempatan ekonomi yang lebih baik. Hal ini memperkuat hubungan antara pendidikan rendah dan kemiskinan, di mana minimnya pengetahuan dan keterampilan mempersempit peluang mereka untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga.

4.1.2.2 KESEHATAN

Dalam aspek kesehatan, sebanyak 23.281 perempuan mengalami keluhan kesehatan kronis atau menahun. Dari angka tersebut, 2.327 perempuan berada dalam kondisi miskin. Perempuan dengan masalah kesehatan kronis menghadapi dua tantangan utama, yaitu kehilangan produktivitas dan beban biaya perawatan yang tinggi. Kondisi ini sering kali berdampak pada anggota keluarga lainnya, terutama jika perempuan yang sakit merupakan pencari nafkah atau pengelola rumah tangga.

4.1.2.3 DISABILITAS

Sebanyak 5.085 perempuan terdata sebagai penyandang disabilitas, dan 814 perempuan di antaranya berada dalam kondisi miskin. Disabilitas pada perempuan



menambah dimensi kerentanan, mengingat adanya hambatan sosial dan ekonomi yang lebih besar dalam mengakses pendidikan, pekerjaan, atau layanan dasar. Ketidakmampuan untuk berpartisipasi penuh dalam kehidupan sosial dan ekonomi memperburuk kondisi perempuan penyandang disabilitas yang sudah rentan secara struktural.

4.1.2.4 INFRASTRUKTUR DASAR

Pada aspek infrastruktur dasar, terdapat 10.150 kepala keluarga perempuan yang tidak memiliki rumah layak huni, dengan 1.058 perempuan di antaranya berada dalam kategori miskin. Perempuan yang menjadi kepala keluarga tanpa akses terhadap rumah yang memadai tidak hanya menghadapi kerentanan fisik tetapi juga ketidakstabilan ekonomi. Kondisi ini juga berpotensi memperburuk situasi anak-anak yang mereka tanggung, baik dari segi kesehatan maupun pendidikan.

4.1.2.5 KETENAGAKERJAAN

Data ketenagakerjaan mencatat bahwa 111.600 perempuan berusia 15 tahun ke atas tidak bekerja, dengan 7.963 perempuan di antaranya berada dalam kategori miskin. Ketiadaan pekerjaan di kalangan perempuan ini mencerminkan minimnya akses ke lapangan kerja yang layak atau kendala lain seperti beban kerja domestik yang tidak seimbang. Kondisi ini menunjukkan adanya keterkaitan langsung antara pengangguran perempuan dan kemiskinan, yang dapat memperburuk ketergantungan ekonomi pada pasangan atau anggota keluarga lainnya.

Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa perempuan di Kalimantan Utara menghadapi tantangan signifikan pada berbagai aspek kehidupan yang saling berhubungan, mulai dari pendidikan hingga ketenagakerjaan. Tingkat kerentanan yang tinggi pada kelompok perempuan ini memerlukan pemahaman mendalam mengenai akar permasalahan di setiap aspek untuk menentukan intervensi yang paling efektif

Pendekatan berbasis gender dalam penanganan kemiskinan menjadi penting untuk memastikan bahwa perempuan mendapatkan kesempatan yang setara dalam mengakses sumber daya dan peluang. Langkah-langkah strategis yang diambil oleh pemerintah daerah, seperti pemberdayaan ekonomi perempuan melalui pelatihan keterampilan, fasilitasi akses permodalan, dan pengembangan UMKM, telah membantu perempuan untuk menjadi lebih mandiri secara finansial. Fokus khusus diberikan kepada perempuan kepala keluarga dan pelaku usaha mikro di sektor informal, yang sering kali menjadi tulang punggung ekonomi keluarga.

Di samping itu, penyediaan layanan kesehatan yang responsif gender, termasuk akses terhadap kesehatan reproduksi, menjadi prioritas penting dalam upaya mengurangi kemiskinan. Kesehatan perempuan tidak hanya berpengaruh terhadap kesejahteraan mereka sendiri tetapi juga terhadap kualitas hidup keluarga dan masyarakat. Selain itu,



penguatan pendidikan dan pelatihan keterampilan bagi perempuan muda di Kalimantan Utara juga merupakan investasi jangka panjang untuk memutus siklus kemiskinan lintas generasi.

Kemiskinan dengan perspektif gender bukan hanya tanggung jawab perempuan itu sendiri, tetapi juga membutuhkan komitmen bersama dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Melalui kebijakan yang responsif gender, alokasi anggaran yang berpihak kepada perempuan, dan partisipasi aktif berbagai pihak, Kalimantan Utara dapat menciptakan pembangunan yang lebih inklusif. Dengan memberdayakan perempuan, kita tidak hanya memperbaiki kondisi individu, tetapi juga memperkuat fondasi sosial dan ekonomi masyarakat secara keseluruhan.

Menyadari bahwa pemberdayaan perempuan adalah kunci untuk mencapai keadilan sosial, pendekatan berbasis gender dalam penanganan kemiskinan harus terus diutamakan. Provinsi Kalimantan Utara memiliki peluang besar untuk menjadi contoh bagaimana keadilan gender dapat berkontribusi langsung pada pengentasan kemiskinan dan keberlanjutan pembangunan.

4.2 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG KESEHATAN

4.2.1 UMUR HARAPAN HIDUP (UHH) PEREMPUAN

Kesehatan adalah hal yang sangat mendasar dalam kehidupan manusia, yang tercermin dari kondisi fisik yang senantiasa sehat. Untuk mencapai hal tersebut, berbagai langkah telah diupayakan oleh pemerintah salah satunya melalui pembangunan kesehatan. Pembangunan kesehatan adalah bagian integral dari pembangunan nasional yang bertujuan agar semua lapisan masyarakat memperoleh pelayanan kesehatan secara mudah, leluasa dan murah. Bersama angka kesakitan dan angka kematian bayi, angka harapan hidup (AHH) di suatu negara merupakan elemen kunci yang sering dijadikan tolak ukur dari kinerja pemerintah dalam upayanya melaksanakan pembangunan kesehatan.

Definisi dari Angka Harapan Hidup (AHH) adalah rata-rata jumlah tahun hidup yang diperkirakan dapat ditempuh oleh seseorang. AHH merupakan indikator penting yang mencerminkan taraf kesehatan masyarakat di suatu wilayah sebagai dampak dari pelaksanaan hasil pembangunan khususnya di bidang kesehatan. Kata kesehatan dapat dimaknai sebagai keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomis (UU RI Nomor 23 Tahun 1992 Tentang Kesehatan). Semakin tinggi AHH atau semakin lama umur hidup yang dijalani merupakan gambaran semakin tinggi derajat kesehatan dan kualitas hidupnya. Indikator ini juga dapat digunakan untuk mengevaluasi pembangunan dalam bidang kesehatan.

Umur Harapan Hidup saat Lahir perempuan (UHH perempuan) didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang perempuan sejak



lahir. Umur harapan hidup perempuan di Provinsi Kalimantan Utara dalam periode tiga tahun terakhir mengalami peningkatan. Untuk melihat rata-rata perkiraan umur perempuan di Kalimantan Utara pada Tabel berikut yang menyajikan perkembangan AHH perempuan Kalimantan Utara tahun 2021-2023.

Tabel 20 Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

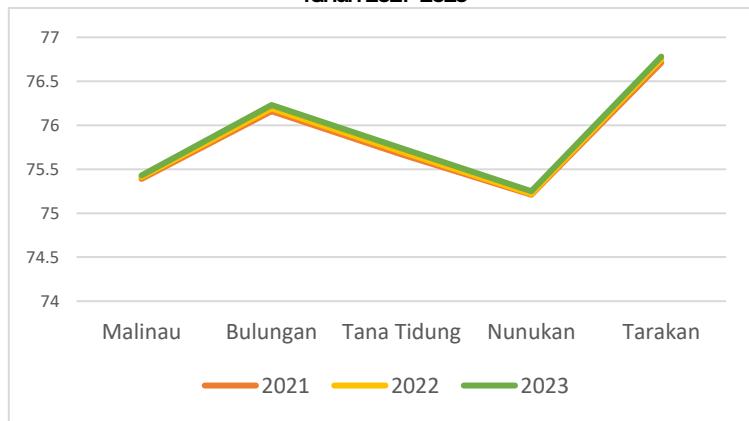
Kab/Kota	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	71,94	75,39	71,95	75,41	71,96	75,43
Bulungan	72,25	76,16	72,26	76,19	72,27	76,23
Tana Tidung	71,28	75,67	71,29	75,7	71,31	75,74
Nunukan	71,06	75,21	71,07	75,22	71,08	75,25
Tarakan	73,47	76,71	73,49	76,75	73,52	76,78
Kalimantan Utara	71,32	75,76	71,34	75,79	71,36	75,83

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Umur harapan hidup perempuan di Provinsi Kalimantan Utara dalam dua tahun terakhir mengalami kenaikan. Dimana pada tahun 2021 umur harapan hidup perempuan di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 75,76 tahun mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 75,83 tahun. Adapun Kota Tarakan, pada

Tahun 2022 menempati urutan pertama dengan umur harapan hidup tertinggi se Kalimantan Utara yaitu sebesar 76,78 tahun, menyusul Kabupaten Bulungan di posisi kedua dengan umur harapan hidup perempuan sebesar 76,23 tahun.

Gambar 10 Trend Umur Harapan Hidup Perempuan Berdasarkan Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.2.2 PENDUDUK YANG MENGALAMI KELUHAN KESEHATAN DALAM SEBULAN TERAKHIR

Keluhan kesehatan didefinisikan oleh Badan Pusat Statistik sebagai gangguan terhadap kondisi fisik maupun jiwa, termasuk karena kecelakaan, atau hal lain yang menyebabkan terganggunya kegiatan sehari-hari. Gangguan kesehatan fisik dapat berupa sesak nafas, panas, diare, sakit kepala, penyakit kronis dan akut, atau gangguan kesehatan

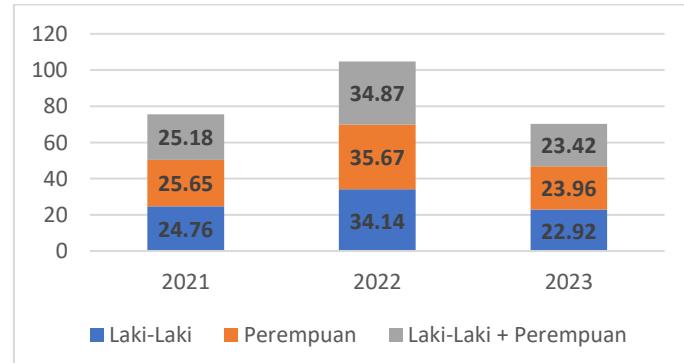


karena kecelakaan. Sedangkan gangguan jiwa atau psikis dapat berupa rasa tertekan atau depresi, gelisah, ketakutan, trauma, skizofrenia, atau gangguan psikis lain yang berkaitan dengan gangguan cara berpikir (cognitive), kemauan (volition), emosi (affective), dan perilaku (psychomotor).

Kualitas kesehatan masyarakat dapat dipengaruhi oleh faktor biologis dan gaya hidup. Daya tahan perempuan lebih baik dibanding laki-laki. Menurut berbagai penelitian, laki-laki lebih rentan terhadap infeksi prenatal atau masalah lain di dalam kandungan dari sejak masa di dalam kandungan hingga lahir. Dilihat dari kromosomnya, sejak lahir wanita dibekali sepasang kromosom X yang mengandung sekitar 1100 gen, selain berperan penting dalam pengaturan hormone. Kromosom X juga berperan dalam fungsi vital tubuh lainnya, sementara pada laki-laki yang memiliki kromosom Y hanya mengandung sekitar 100 gen.

Gambar 11 Persentase Penduduk Yang Mengalami Keluhan Kesehatan Dalam Sebulan Terakhir Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023

Statistik mengenai usia harapan hidup di berbagai belahan dunia menunjukkan bahwa usia harapan hidup perempuan lebih tinggi daripada laki-laki. Namun Meski perempuan memiliki usia harapan hidup yang lebih tinggi dari laki-laki, secara umum perempuan lebih



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

sensitif terhadap rasa sakit. Kondisi ini terlihat dari data keluhan kesehatan pada Gambar disamping. Dalam periode tahun 2021-2023, persentase perempuan yang mempunyai keluhan kesehatan lebih banyak dibanding laki-laki. Selama kurun waktu tersebut, penduduk yang mengalami keluhan kesehatan baik pada penduduk perempuan

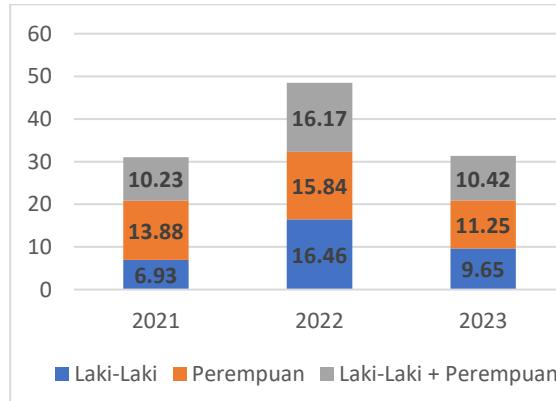
4.2.3 ANGKA KESAKITAN

Merujuk pada konsep yang diterapkan oleh BPS dalam Susenas, Morbiditas (angka kesakitan) menunjukkan adanya gangguan/keluhan kesehatan yang mengakibatkan terganggunya aktivitas sehari-hari, baik dalam melakukan pekerjaan, bersekolah, mengurus rumah tangga maupun melakukan aktivitas lainnya. Pada umumnya keluhan kesehatan yang mengindikasikan adanya suatu penyakit yang biasa dialami oleh penduduk adalah panas, batuk, pilek, asma/napas sesak, diare, sakit kepala berulang, sakit gigi, campak, dll. Semakin banyak penduduk yang mengalami gangguan kesehatan berarti derajat kesehatan



di wilayah tersebut semakin rendah atau menunjukkan bahwa angka kesakitan di wilayah tersebut tinggi (penduduknya banyak yang mengalami sakit).

Gambar 9 Angka Kesakitan Menurut Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Angka kesakitan penduduk Kalimantan Utara tahun 2023 mencapai 10,42 persen, angka tersebut berfluktuasi dalam 3 tahun terakhir. Angka kesakitan penduduk Kalimantan Utara baik penduduk perempuan maupun penduduk laki-laki juga berfluktuasi dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2023 angka kesakitan laki-laki sebesar 9,65 persen lebih rendah dibandingkan perempuan yang mencapai 11,25 persen.

4.2.4 AKSES KESEHATAN MASYARAKAT

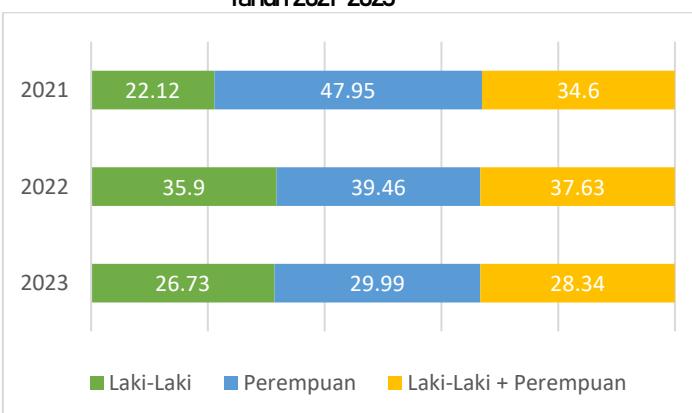
Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan / kemudahan mencapai fasilitas / tempat dan tenaga kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat. Beberapa faktor yang menjadi pertimbangan penduduk dalam akses fasilitas kesehatan antara lain jarak tempat tinggal dengan letak sarana pelayanan kesehatan, kualitas pelayanan, sosial ekonomi penduduk yaitu kemampuan penduduk untuk membiayai pengobatannya, serta jenis pelayanan kesehatan. Ketersediaan serta keterjangkauan fasilitas dan sarana kesehatan merupakan salah satu faktor yang penting untuk diperhatikan. Ketersediaan fasilitas kesehatan seperti rumah sakit dan puskesmas dalam pelayanan kesehatan penduduk menjadi hal penting yang harus diperhatikan dan merupakan suatu keharusan. Selain jumlah fasilitas kesehatan yang tersedia, derajat kesehatan penduduk tercermin dari persentase penduduk yang berobat ke fasilitas kesehatan. Akses penduduk dalam memanfaatkan tenaga kesehatan dapat dilihat dari ketersediaan/kemudahan mencapai fasilitas kesehatan sebagai rujukan penduduk jika mengalami keluhan sakit hingga harus pergi berobat.

Pada tahun 2023 persentase penduduk yang mempunyai keluhan kesehatan dan berobat jalan dalam satu bulan terakhir, tercatat sebesar 28,34 persen penduduk perempuan yang berobat jalan lebih rendah dibanding penduduk laki-laki sebesar 37,63 persen.



Gambar 10 Persentase Penduduk yang Mempunyai Keluhan Kesehatan dan Berobat Jalan dalam Sebulan Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023

Dalam kurun waktu 2021-2023, baik penduduk laki-laki maupun perempuan yang mempunyai kesehatan dan berobat jalan memiliki kecenderungan berfluktuasi yang melakukan berobat jalan dalam satu bulan terakhir. Pada tahun 2023, terjadi penurunan persentase penduduk yang melakukan berobat jalan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 28,34 persen.



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

berobat jalan dibanding tahun-tahun sebelumnya yaitu sebesar 28,34 persen.

Tabel dibawah ini menunjukkan persentase penduduk Kalimantan Utara yang mengaku melakukan rawat jalan menurut fasilitas kesehatan yang digunakan. Dari tabel tersebut dapat diketahui bahwa puskemas/puskemas pembantu masih menjadi pilihan utama masyarakat untuk melakukan rawat jalan sebesar 48,06 persen di 5 Kab/kota, dimana Kab. Malinau tercatat dengan masyarakat yang terbanyak melakukan rawat jalan di puskesmas/pustu sebesar 68,74 persen, sedangkan yang terkecil melakukan rawat jalan di Kota Tarakan sebesar 30,11 persen. Pilihan kedua terbanyak masyarakat Kalimantan Utara untuk melakukan rawat jalan ketika mengalami keluhan kesehatan adalah RS Pemerintah sebesar 22,55 persen, dimana Kota Tarakan yang tercatat dengan masyarakat yang terbanyak melakukan rawat jalan sebesar 28,36, sedangkan yang terkecil melakukan rawat jalan RS Swasta yaitu sebesar 1,59 persen, ini disebabkan karena RS Swasta yang ada di Provinsi Kalimantan Utara masih sedikit.

Tabel 28 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Kab/Kota dan Tempat Berobat Jalan Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik dokter/ bidan	Klinik/ Praktik dokter bersama	Puskesmas /Pustu	UKBM	Praktik pengobatan tradisional/ alternatif
Malinau	17,56	0,00	6,65	4,21	68,74	1,34	4,32
Bulungan	22,91	3,11	10,82	7,63	57,52	0,16	0,00
Tana Tidung	21,56	0,13	16,86	5,07	62,10	2,76	0,92
Nunukan	20,23	0,00	23,42	11,50	44,83	3,32	1,60
Tarakan	28,36	3,98	22,70	14,75	30,11	0,00	2,45
Kalimantan Utara	22,55	1,59	17,98	10,08	48,06	1,55	1,98

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



Tabel 29 Persentase Penduduk yang Berobat Jalan menurut Tempat Berobat Jalan berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Tempat Berobat	Laki-Laki	Perempuan	Laki-Laki + Perempuan
Rumah Sakit Pemerintah	20,95	0,00	22,55
Rumah Sakit Swasta	2,20	3,11	1,59
Praktik dokter/bidan	18,91	0,13	17,98
Klinik/Praktik dokter bersama	11,48	0,00	10,08
Puskesmas/Pustu	45,90	3,98	48,06
UKBM	1,89	1,59	1,55

Tabel disamping menunjukkan indikator statistik yang menggambarkan proporsi penduduk yang telah menjalani pengobatan rawat jalan dalam kurun waktu tertentu, diklasifikasikan berdasarkan jenis fasilitas atau tempat layanan kesehatan yang mereka pilih. Pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa Penduduk Provinsi Kalimantan Utara lebih banyak memilih Puskesmas/Pustu sebagai tempat layanan kesehatan berobat jalan.

yang mereka pilih. Pada Tahun 2023 menunjukkan bahwa Penduduk Provinsi Kalimantan Utara lebih banyak memilih Puskesmas/Pustu sebagai tempat layanan kesehatan berobat jalan.

Tabel disamping menunjukkan indikator statistik yang menggambarkan proporsi penduduk yang pernah menjalani perawatan di fasilitas kesehatan dengan menginap selama minimal satu malam dalam jangka waktu satu tahun terakhir, dibandingkan dengan total populasi penduduk. Pada Tahun 2020 - 2023 menunjukkan bahwa Penduduk Provinsi Kalimantan Utara khususnya perempuan lebih banyak menerima layanan kesehatan dengan cara menginap di fasilitas kesehatan untuk mendapatkan perawatan medis.

Tabel 30 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Jenis Kelamin	2020	2021	2022	2023
Laki - Laki	4,41	2,73	2,77	3,14
Perempuan	7,22	4,96	5,06	5,47
Laki - Laki + Perempuan	5,73	3,79	3,86	4,26

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 30 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/kota	RS Pemerintah	RS Swasta	Praktik bidan	Klinik/Praktik dokter bersama	Puskesmas
Malinau	94,15	1,50	1,17	0,00	3,76
Bulungan	89,18	2,01	0,00	0,00	11,06
Tana Tidung	92,33	6,89	0,00	0,00	0,77
Nunukan	89,59	1,04	1,13	7,35	9,36
Tarakan	80,21	10,44	4,87	2,45	3,04
Kalimantan Utara	86,66	5,08	2,29	2,88	6,20

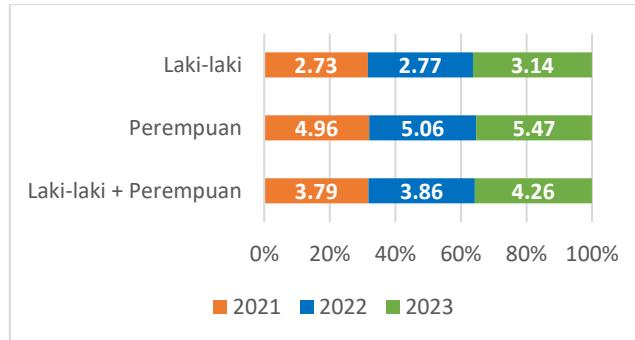
Dari Tabel disamping dapat diketahui bahwa RS pemerintah masih menjadi pilihan utama masyarakat ketika melakukan rawat inap sebesar 86,66 persen. Kemudian di Puskesmas sebesar 6,20 persen dan yang terendah di praktik bidan sebesar 2,29 persen.

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



Profil kesehatan penduduk di Kalimantan Utara juga dapat dilihat dari persentase penduduk menurut tempat rawat inap setahun terakhir pada tahun 2023. Selain berobat jalan perawatan inap juga merupakan upaya yang ditempuh untuk memperoleh kesembuhan dari sakit. Pada tahun 2023 persentase penduduk yang pernah rawat inap dalam satu tahun terakhir, tercatat sebesar 5,47 persen penduduk perempuan yang pernah rawat inap lebih tinggi dibanding penduduk laki-laki sebesar 3,14 persen.

Gambar 11 Persentase Penduduk yang Pernah Rawat Inap dalam Setahun Terakhir di Provinsi Kalimantan Utara 2023



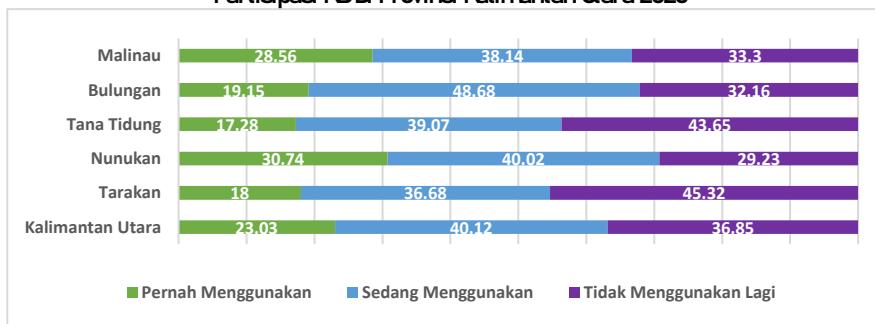
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.2.5 KELUARGA BERENCANA

Keluarga berencana merupakan salah satu upaya pemerintah dalam memastikan terwujudnya keluarga yang sehat dan berkualitas. Di Indonesia, salah satu badan negara yang secara khusus melaksanakan pembangunan keluarga berencana adalah Badan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN). Melalui program keluarga berencana, kesehatan ibu dan bayi dapat dipantau secara lebih baik, pengasuhan dan pendidikan anak lebih berkualitas, menghindari atau mencegah terjadinya kehamilan yang beresiko, kehamilan yang tidak diinginkan, serta mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Dengan keluarga berencana, diharapkan dapat mendorong risiko angka kematian pada ibu dan bayi.

Penggunaan alat kontrasepsi yang tepat dan aman merupakan salah satu bentuk kegiatan dalam keluarga berencana. Alat kontrasepsi ini dapat menjadi salah satu upaya dalam mengatur kehamilan yang direncanakan dengan matang dan pencegahan terhadap risiko penyakit menular seksual.

Gambar 12 Persentase Perempuan Yang Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Kabupaten/Kota Dan Partisipasi KBDI Provinsi Kalimantan Utara 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



Pada tahun 2023 menunjukkan banyaknya perempuan berumur 15-49 tahun dan berstatus kawin menurut status pemakaian alat/cara KB dan daerah tempat tinggal. Perempuan yang pernah menggunakan KB sebesar 23,03 persen, sedang menggunakan KB 40,12 persen dan tidak menggunakan lagi 36,85 persen.

Tabel 21 Persentase Persentase Perempuan Pernah Kawin Berumur 15-49 Tahun Menurut Alat/Cara KB Yang Digunakan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

Alat/Cara KB Yang Digunakan	Persentase
Sterilisasi /tubektomi/MOW	2,59
Sterilisasi pria/vasektomi/MOP	0,00
IUD/AKDR/spiral	12,70
Suntikan	46,61
Susuk KB/implant	9,64
PII	26,03
Kondom pria/karet KB	0,69
Intravag/kondom wanita/diafragma	0,01
Metode menyusui alami	0,00
Pantang berkala/kalender	1,38
Lainnya	0,36

Menurut alat/cara KB yang digunakan oleh paling banyak berupa suntikan yaitu sebesar 46,61 persen, kemudian pil sebesar 26,03 persen, IUD/AKDR/Spiral sebesar 12,70 persen, susuk KB/implant sebesar 9,64 persen. Sedangkan untuk alat/cara KB terendah yaitu sterilisasi pria/vasektomi/MOP sebesar 0 persen dan metode menyusui alami sebesar 0 persen.

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.3 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG PENDIDIKAN

4.3.1 ANGKA PARTISIPASI KASAR (APK) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN SD, SLTP DAN SLTA

Angka Partisipasi Kasar (APK) merupakan Perbandingan antara jumlah penduduk yang masih bersekolah di jenjang pendidikan tertentu tanpa memandang usia penduduk tersebut dengan jumlah penduduk yang memenuhi syarat resmi penduduk usia sekolah di jenjang pendidikan tersebut.

Pada tahun 2023 di Provinsi Kalimantan Utara APK untuk jenjang Pendidikan SD/MI sebesar 101,52 mengalami kenaikan dari dua tahun sebelumnya, yaitu 100,70 di Tahun 2023. APK untuk jenjang Pendidikan SMP/MTS sebesar 97,60 sedangkan APK untuk jenjang SMA/SMK/MA sebesar 97,78.



Tabel 33 Angka Partisipasi Kasar (APK) Penduduk Menurut Jenjang Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023

Jenjang Pendidikan	Angka Partisipasi Kasar (APK)					
	2022			2023		
	L	P	L+P	L	P	L+P
SD/M	98,24	103,21	100,70	101,85	101,16	101,52
SMP/MTs	105,04	94,71	99,85	98,87	96,40	97,60
SMA/SMK/MA	86,60	111,57	97,57	89,42	106,28	97,78

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

terdapat beberapa murid pada jenjang Pendidikan SD/MI yang usianya sudah tidak sesuai lagi dengan jenjang pendidikannya.

Gambar 16 Angka Partisipasi Kasar (APK) Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.3.2 ANGKA PARTISIPASI SEKOLAH (APS) PENDUDUK BERUMUR 5-18 TAHUN

Angka Partisipasi Sekolah (APS) merupakan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah (tanpa memandang jenjang pendidikan yang ditempuhi) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Pada tahun 2023 APS perempuan di Provinsi Kalimantan Utara tertinggi pada kelompok umur 7 – 12 tahun sebesar 99,20.

APS Formal penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara pada Tahun 2023 secara umum lebih tinggi dari penduduk laki-laki, kecuali pada kelompok umur 13-15 tahun, dimana APS Formal penduduk perempuan sebesar 95,59 dibanding penduduk laki-laki sebesar 98,48.

Gambar 17 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Formal di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2023 terjadi kenaikan APK pada siswa laki-laki level Pendidikan SD/MI dan SMA/SMK/MA yang tertinggi terdapat jenjang SD/MI yaitu sebesar 101,85 persen. . Kondisi ini menggambarkan bahwa



Tabel 34 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Menurut Kelompok Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Gender	7 - 12 Th	13 - 15 Th	16 - 18 Th
Laki-laki	99,23	97,89	72,86
Perempuan	99,20	96,08	81,26
Laki-Laki dan Perempuan	99,22	96,96	77,03

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2023 Angka partisipasi Sekolah (APS) penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara pada kelompok umur 7-12 tahun atau setingkat SD tertinggi sebesar 99,20, selanjutnya pada kelompok umur 13-15 tahun atau setingkat SMP, Angka Partisipasi Sekolah (APS) penduduk perempuan sebesar 96,08, lebih rendah jika dibandingkan Angka partisipasi Sekolah (APS) penduduk laki-laki yaitu sebesar 95,59.

4.3.3 ANGKA PARTISIPASI MURNI (APM) MENURUT JENJANG PENDIDIKAN SD, SMP DAN SMA

Angka Partisipasi Murni (APM) merupakan Proporsi dari penduduk kelompok usia sekolah tertentu yang sedang bersekolah tepat di jenjang pendidikan yang seharusnya (sesuai antara umur penduduk dengan ketentuan usia bersekolah di jenjang tersebut) terhadap penduduk kelompok usia sekolah yang bersesuaian. Jenjang pendidikan yang dimaksud adalah jenjang SD/MI/sederajat, SMP/MTs/sederajat, SMA/SMK/MA/sederajat.

- **APM SD/MI/SEDERAJAT**

Jumlah murid umur 7-12 tahun yang bersekolah di tingkat SD/MI/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 7-12 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%)

- **APM SMP/MTs/SEDERAJAT**

Jumlah murid umur 13-15 tahun yang bersekolah di tingkat SMP/MTs/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 13-15 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

- **APM SMA/MA/SEDERAJAT**

Jumlah murid umur 16-18 tahun yang bersekolah di tingkat SMA/MA/sederajat dibagi jumlah penduduk umur 16-18 tahun dan dinyatakan dalam satuan persen (%).

Kegunaan : Melihat pencapaian indikator dasar yang telah dicapai oleh suatu daerah, karena membaca merupakan dasar utama dalam memperluas ilmu pengetahuan. AMH merupakan indikator penting untuk melihat sejauh mana penduduk suatu daerah terbuka terhadap pengetahuan.

Interpetasi : Angka melek huruf berkisar antara 0-100. Tingkat melek huruf yang tinggi menunjukkan adanya sebuah sistem pendidikan dasar yang efektif dan atau program keaksaraan yang memungkinkan sebagian besar penduduk untuk memperoleh kemampuan menggunakan kata-kata tertulis dalam kehidupan sehari-hari dan melanjutkan pembelajaran.



Gambar 18 Angka Partisipasi Mumi (APM) Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 dan 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

APM SD penduduk perempuan di Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 sebesar 94,98 persen sedangkan untuk laki-laki sebesar 94,50 persen. Apabila dilihat secara keseluruhan, nilai APM SD dibanding dengan APM SMP dan SMA merupakan APM dengan persentase tertinggi sebesar 94,73 persen, sedangkan APM yang paling rendah berada pada jenjang SMA sebesar 66,70 persen.

APM perempuan Provinsi Kalimantan Utara pada tahun 2023 tertinggi pada jenjang Pendidikan SD/Sederajat pada angka 94,98 persen, sedangkan terendah pada jenjang Pendidikan

Tabel 35 Angka Partisipasi Mumi (APM) Penduduk di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022

APM	Jenis Kelamin	2022		2023	
		L	P	L+P	P
SD	L	92,96	94,50	93,69	94,73
	P	94,44	94,98		
	L+P				
SMP	L	82,60	81,31	79,38	80,53
	P	76,19	79,79		
	L+P				
SMA	L	62,92	62,86	65,65	66,70
	P	69,14	70,6		
	L+P				

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



4.3.4 ANGKA MELEK AKSARA PENDUDUK UMUR 15 TAHUN KE ATAS

Pada tahun 2023 persentase penduduk usia 15 tahun ke atas yang melek aksara sudah mencapai 97,78 persen, dengan capaian penduduk perempuan usia 15 Tahun ke atas yang melek aksara sebesar 97,09 persen masih lebih rendah dibanding capaian penduduk laki-laki usia 15 Tahun ke atas yang melek huruf sebesar 98,26 persen.

Gambar 19 Persentase Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas yang Melek Huruf

Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.3.5 PENDUDUK PEREMPUAN MENURUT JENIS PENDIDIKAN TERTINGGI YANG DITAMATKAN

Penduduk menurut jenis pendidikan tertinggi yang ditamatkan merupakan persentase penduduk usia 15 tahun ke atas menurut ijazah/STTB tertinggi yang dimiliki.

- Kegunaan

Mengetahui tingkat kualitas pendidikan penduduk dengan menggunakan jenjang pendidikan tertentu sebagai batasan minimalnya - Sebagai bahan analisis pasar kerja.

- Interpretasi

Nilai angka tamat berkisar antara 0-100. Semakin tinggi ijazah/STTB yang dimiliki oleh sebagian besar penduduk suatu wilayah maka mencerminkan semakin tinggi taraf intelektualitas masyarakat di wilayah tersebut.

Tabel 22 Persentase Penduduk Berumur 5 Tahun Ke Atas Menurut Kab/Kota dan Status Bersekolah Tahun 2023

Kab/ Kota	Tidak/ Belum Pernah Sekolah	Masih sekolah di SD/ sederajat	Masih sekolah di SMP/ Sederajat	Masih sekolah di SMA/ Sederajat	Masih sekolah di Perguruan Tinggi	Tidak bersekolah lagi
Malinau	5,46	13,15	6,09	4,34	1,88	69,08
Bulungan	6,98	11,75	5,46	5,49	1,04	69,29
Tana Tidung	7,82	13,60	5,10	3,45	0,94	69,08
Nunukan	7,34	12,45	7,02	4,17	1,26	67,76
Tarakan	5,21	11,76	4,81	5,75	2,94	69,53
Kalimantan Utara	6,30	12,21	5,74	4,97	1,88	68,89

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

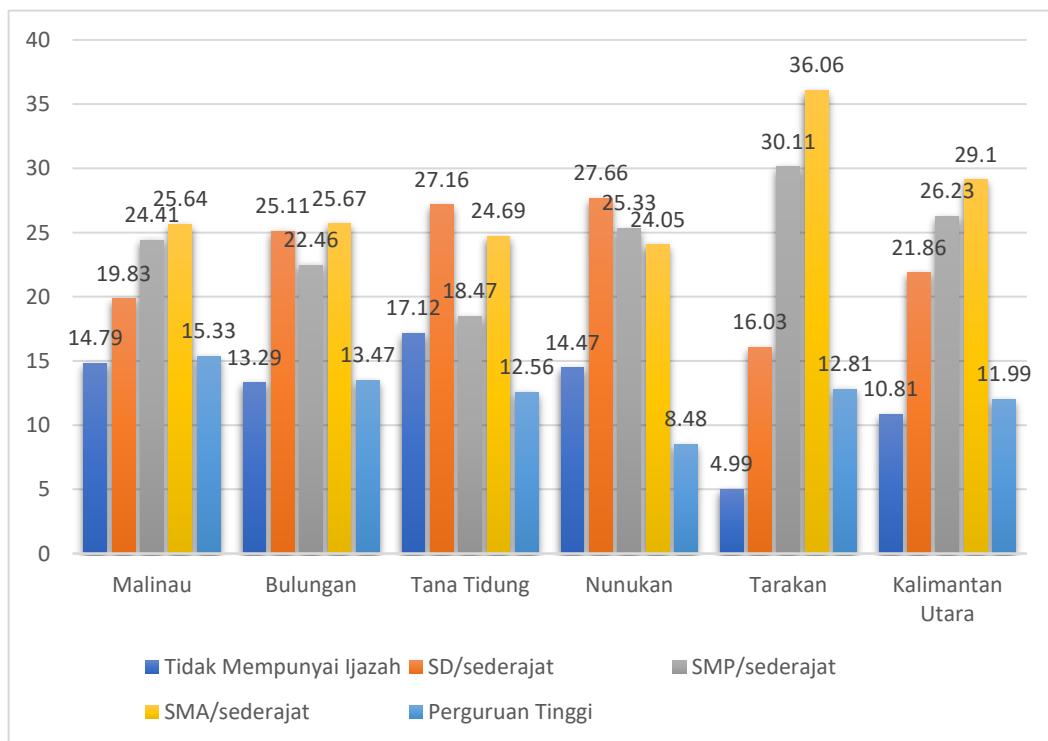
Pada tahun 2023 penduduk usia 5 tahun ke atas di Kalimantan Utara bisa dikatakan sebagian besar masih sekolah pada tingkat Pendidikan SD/Sederajat sebesar 12,21 persen secara



keseluruhan dan yang tertinggi sebesar 13,60 persen berada di Kabupaten Tana Tidung, kemudian diikuti pada tingkat Tidak/Belum pernah sekolah sebesar 6,30 persen secara keseluruhan dan yang tertinggi berada di Kabupaten Tana Tidung sebesar 7,82 persen.

Pada tahun 2023 penduduk perempuan berumur 15 tahun keatas berdasarkan ijazah/STTB tertinggi yang tamatkan pada tingkat SMA/Sederajat Provinsi Kalimantan Utara sebesar 29,10 persen. Dimana ijazah/STTB tertinggi yang tamatkan pada tingkat SMA/Sederajat berada di Kota Tarakan dengan jumlah 36,06 persen, kemudian Kab. Malinau sebesar 25,64 persen, Kab. Tana Tidung sebesar 24,69 persen dan terendah Kab. Bulungan sebesar 25,67 persen.

Gambar 13 Persentase Penduduk Perempuan Berumur 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota, Jenis Kelamin, Dan Ijazah/STTB Tertinggi Yang Dimiliki Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.3.6 RATA-RATA LAMA SEKOLAH

Rata-rata Lama Sekolah (RLS)/ Mean Years School (MYS) didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal.

- Kegunaan

RLS dapat digunakan untuk mengetahui kualitas pendidikan masyarakat dalam suatu wilayah.



- Interpretasi

Penduduk yang tamat SD diperhitungkan lama sekolah selama 6 tahun, tamat SMP diperhitungkan lama sekolah selama 9 tahun, tamat SMA diperhitungkan lama sekolah selama 12 tahun tanpa memperhitungkan apakah pernah tinggal kelas atau tidak.

Tabel 23 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota Tahun 2021-2023

Kab/Kota	2021		2022		2023	
	L	P	L	P	L	P
Malinau	9,56	8,7	9,57	8,89	9,63	8,9
Bulungan	9,76	8,8	9,77	8,82	9,78	8,83
Tana Tidung	9,32	8,2	9,42	8,5	9,63	8,51
Nunukan	8,59	7,92	8,6	8,18	8,62	8,2
Tarakan	10,54	9,91	10,64	9,99	10,65	10,29
Kalimantan Utara	9,76	8,93	9,77	9,09	9,78	9,17

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

RLS Perempuan Kalimantan Utara pada tahun 2023 sebesar 9,17 tahun. Hal ini berarti secara rata-rata penduduk perempuan Provinsi Kalimantan Utara yang berusia 25 tahun ke atas telah menempuh pendidikan selama 9 tahun tahun lebih dan tertinggi pada kota Tarakan yaitu sebesar 10,29 tahun.

4.4 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG EKONOMI DAN KETENAGAKERJAAN

4.4.1 KREDIT USAHA RAKYAT (KUR)

Peran UMKM di Indonesia sangat signifikan bagi perekonomian terutama dalam menciptakan lapangan kerja serta mengurangi pengangguran dan kemiskinan. UMKM di negara berkembang termasuk di Indonesia umumnya memiliki karakteristik dengan jumlah yang sangat banyak, tersebar di seluruh daerah dan menyerap tenaga kerja atau padat karya. Hingga saat ini, Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) masih merupakan salah satu sektor unggulan yang dapat menopang perekonomian Indonesia.

Pemerintah telah mencanangkan upaya peningkatan akses sumber pembiayaan bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi (UMKKM) guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR). Skema pelaksanaan KUR berdasarkan Permenko 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan KUR sebagaimana diubah dalam Permenko Perekonomian No 15 Tahun 2020 menjadi supermikro (plafon 0-10 jt) , mikro (plafon > 10-50 jt) dan kecil (plafon > 100-500 .

Berdasarkan data tabel dibawah, perempuan penerima KUR Provinsi Kalimantan Utara terbanyak pada skema KUR Mikro yang diberikan oleh Bank BUMN sebanyak 5.270 orang. Dimana Jumlah penerima KUR tertinggi di Kota Tarakan sebanyak 1.663 orang dengan skema mikro pada Bank BUMN. Secara total di wilayah Kalimantan Utara perempuan penerima skema KUR terbanyak pada Bank BUMN.



Tabel 24 Jumlah Perempuan Penerima Kredit Usaha Rakyat Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2023

Kab/Kota	Bank BUMN			BPD			Bank Swasta		
	Super mikro	Mkro	Kecil	Super mikro	Mkro	Kecil	Super mikro	Mkro	Kecil
Tarakan	161	161	63	0	20	4	0	0	0
Bulungan	337	827	103	1	52	27	0	0	0
Tana Tidung	96	125	7	1	10	1	0	0	0
Malinau	341	1.206	259	0	40	31	0	0	0
Nunukan	741	1.301	206	0	61	42	0	0	6
Kalimantan Utara	1.676	3.620	638	2	183	105	0	0	6

Sumber: Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara

4.4.2 PEREMPUAN PELAKU USAHA PERIKANAN

Perempuan pelaku usaha perikanan di Provinsi Kalimantan Utara memainkan peran yang sangat penting dalam mengembangkan sektor perikanan, baik dalam usaha tangkap maupun budidaya. Sebagai provinsi yang memiliki garis pantai panjang dan kekayaan sumber daya laut, Kaltara menawarkan potensi besar bagi para perempuan untuk terlibat dalam industri perikanan. Banyak perempuan yang terlibat dalam pengolahan hasil laut, seperti pembuatan ikan asin, terasi, hingga abon ikan, serta dalam budidaya ikan air tawar dan laut. Selain itu, mereka juga berperan dalam pemasaran dan distribusi produk perikanan, baik di pasar lokal maupun ekspor. Keterlibatan perempuan dalam sektor ini tidak hanya membantu meningkatkan ekonomi keluarga, tetapi juga berkontribusi pada perekonomian daerah. Namun, meskipun memiliki potensi yang besar, perempuan di Kaltara juga menghadapi berbagai tantangan, seperti keterbatasan akses ke modal, pelatihan, serta dukungan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu, pemberdayaan perempuan melalui pelatihan, akses permodalan, dan penguatan jaringan usaha menjadi langkah penting untuk mengoptimalkan peran mereka dalam industri perikanan dan mendorong keberlanjutan usaha yang mereka kelola.

Perempuan pelaku usaha perikanan di Kalimantan Utara memiliki potensi besar dalam meningkatkan ekonomi lokal. Dengan dukungan yang tepat dan akses terhadap sumber daya, mereka dapat berkontribusi lebih signifikan dalam sektor perikanan serta meningkatkan kesejahteraan komunitas mereka. Berdasarkan data Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara peran perempuan pelaku usaha perikanan pada tahun 2023 sebanyak 45 orang sebagai nelayan, 26 orang sebagai pemasar antar pelabuhan, 76



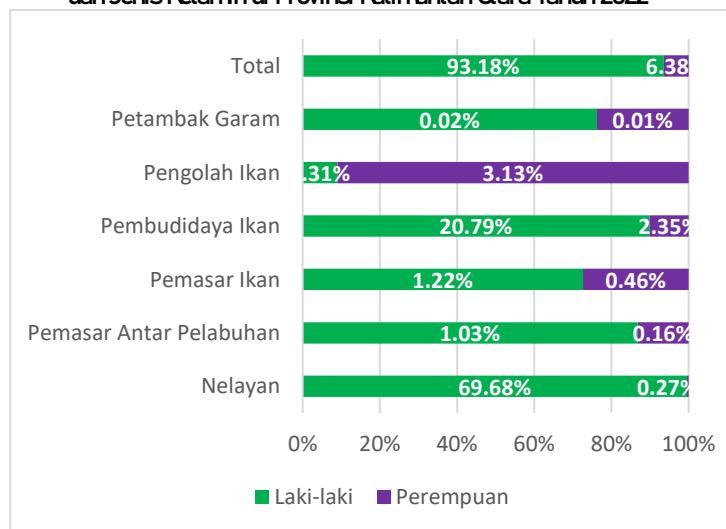
orang sebagai pemasar ikan, 390 orang sebagai pembudidaya ikan, 519 orang sebagai pengolah ikan dan 1 orang sebagai petambak garam.

Tabel 259 Jumlah Pelaku Usaha Perikanan Menurut Jenis Kelamin Dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/Kota	Profesi Utama														Total	
	Nelayan		Pemasar Antar Pelabuhan		Pemasar Ikan		Pembudidaya Ikan		Pengolah Ikan		Petambak Garam					
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
Malinau	291	1	1	0	1	0	129	36	9	47	0	0	431	84		
Bulungan	4.954	25	4	2	58	58	420	38	3	163	0	0	5.439	286		
Tana Tidung	549	5	0	0	12	9	73	8	8	32	0	0	642	54		
Nunukan	1.891	6	16	1	74	5	1.528	226	4	113	1	1	3.534	352		
Tarakan	3.118	8	139	23	44	4	1.054	82	24	164	2	0	4.381	281		
Kalimantan Utara	10.803	45	160	26	189	76	3.224	390	48	519	3	1	14.447	1.057		

Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 14 Persentase Pelaku Usaha Perikanan Menurut Jenis Profesi dan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022



Sumber: Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Kalimantan Utara

Perempuan pelaku usaha perikanan paling banyak sebagai pengolah ikan dengan 3,13 persen terhadap laki-laki yang hanya 0,31 persen dari seluruh pelaku usaha perikanan (laki-laki dan perempuan) di Kalimantan Utara. Dimana Kabupaten Nunukan merupakan wilayah dengan jumlah peran perempuan pelaku usaha perikanan terbanyak

se-Kalimantan Utara yaitu sebanyak 352 orang (33,30 persen) dari seluruh perempuan pelaku usaha perikanan se-Kalimantan Utara. Adapun kaum laki-laki lebih mendominasi terbanyak pada profesi nelayan dan pembudidaya ikan. Secara total peran perempuan pelaku usaha perikanan se-Kalimantan Utara baru sebesar 6,38 persen dibanding kaum laki-laki sebesar 93,18 persen.

4.4.3 TINGKAT PENGANGGURAN TERBUKA (TPT)

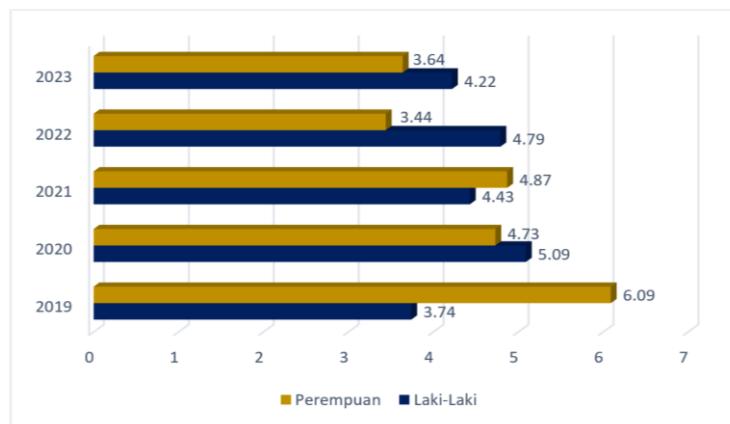
Peningkatan penawaran tenaga kerja perempuan apabila tidak diimbangi dengan peningkatan terhadap permintaan tenaga kerja dan ketersediaan lapangan pekerjaan bagi perempuan dapat menyebabkan terjadinya pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) merupakan perbandingan antara jumlah pengangguran dibandingkan dengan jumlah



angkatan kerja. Mereka yang dikategorikan sebagai pengangguran terbuka adalah mereka yang tidak bekerja dan yang sedang mencari pekerjaan/ mempersiapkan usaha, atau mereka yang sudah diterima bekerja/memiliki usaha tetapi belum mulai bekerja/belum memulai usahanya, dan mereka yang tidak mencari pekerjaan karena sudah putus asa untuk mendapatkan pekerjaan.

Pada tahun 2023, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Kalimantan Utara sebesar 4,01 persen, dimana TPT penduduk perempuan di Kalimantan Utara sebesar 3,64 persen. Hal ini mengalami penurunan TPT kalimantan Utara dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,33 persen di Tahun 2022. Namun untuk TPT penduduk perempuan meningkat menjadi 3,64 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,44 persen di Tahun 2022. Sedangkan TPT penduduk laki-laki justru mengalami penurunan menjadi 4,22 persen dibanding tahun sebelumnya yaitu sebesar 4,79 persen di Tahun 2022.

Gambar 15 TPT Penduduk Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019 – 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Pengangguran Terbuka (TPT) di Kalimantan Utara merupakan salah satu fokus penting dalam upaya peningkatan kesejahteraan ekonomi daerah.

Tabel 26 TPT Penduduk Berdasarkan Kabupaten Kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021 – 2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Malinau	4,14	3,30	3,19
Bulungan	4,54	5,03	4,54
Tana Tidung	5,26	3,33	3,24
Nunukan	4,24	2,74	2,69
Tarakan	4,94	5,76	5,25
Kalimantan Utara	4,58	4,33	4,01

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan data tahun 2023 TPT penduduk tertinggi pada Kota Tarakan sebesar 5,25 persen dan terendah pada Kabupaten Nunukan yaitu sebesar 2,69 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya maka terdapat penurunan TPT di setiap Kab/kota. Penurunan angka Tingkat.



4.4.4 TINGKAT PARTISIPASI ANGKATAN KERJA (TPAK)

Ukuran untuk menunjukkan keterlibatan perempuan dalam dunia ketenagakerjaan adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) bagi perempuan. TPAK merupakan proporsi penduduk yang termasuk angkatan kerja, yakni mereka yang bekerja dan menganggur terhadap penduduk usia kerja.

- Kegunaan

Mengindikasikan besarnya persentase penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/wilayah

- Interpretasi

Semakin tinggi TPAK menunjukkan bahwa semakin tinggi pula pasokan tenaga kerja (*labour supply*) yang tersedia untuk memproduksi barang dan jasa dalam suatu perekonomian.

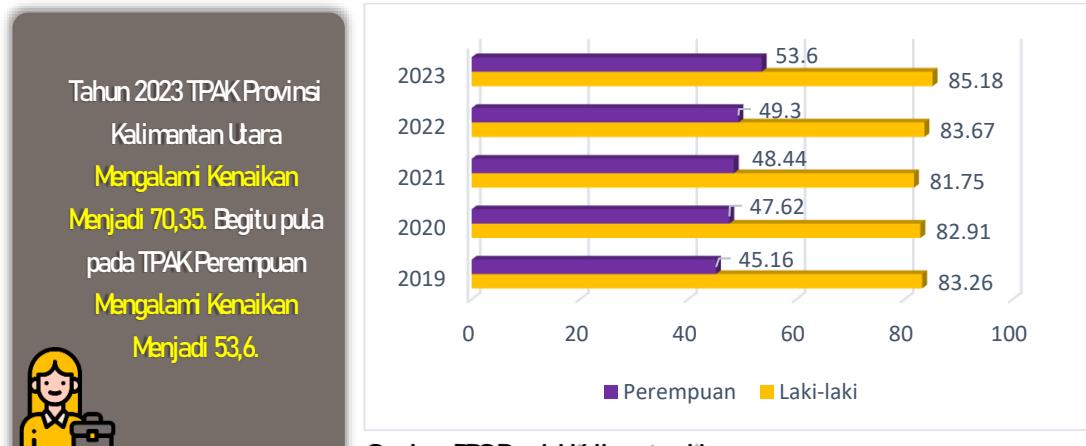
Tabel 27 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK)
Penduduk Usia 15 Tahun Ke Atas Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Malinau	71,49	73,55	74,26
Bulungan	68,62	64,24	71,86
Tana Tidung	67,35	74,49	75,88
Nunukan	66,11	69,10	71,93
Tarakan	63,34	65,49	66,14
Kalimantan Utara	66,24	67,62	70,35

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Berdasarkan tabel dapat dilihat pada tahun 2023 TPAK penduduk tertinggi pada Kabupaten Tana Tidung sebesar 75,88 persen dan terendah pada Kota Tarakan yaitu sebesar 66,14 persen. Jika dibandingkan dengan penduduk laki-laki maka TPAK perempuan jauh di bawah penduduk laki-laki yaitu hanya sebesar 53,60 persen.

Gambar 16 TPAK Penduduk Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2019-2023



Sumber: BPS Provisi Kalimantan Utara



4.4.5 PEREMPUAN PEKERJA TENAGA MANAJER, PROFESIONAL, ADMINISTRASI DAN TEKNISI

Berdasarkan data yang diperoleh menunjukkan bahwa trend perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi dan teknisi cenderung mengalami peningkatan dalam tiga tahun terakhir. Dimana pada tahun 2021 sebesar 42,91 persen perempuan sebagai tenaga manajer, professional, administrasi dan teknisi mengalami peningkatan pada tahun 2023 menjadi 46,97 persen.

Jika dilihat dari tahun sebelumnya di 2022 maka dapat dilihat bahwa terjadi penurunan perempuan sebagai tenaga professional di Kota Tarakan (turun sebesar 2,46 persen). Adapun Kabupaten Bulungan, Tana Tidung, Malinau dan Nunukan justru mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun 2022, dengan laju kenaikan terbesar di Kabupaten Malinau yaitu sebesar 12,06 persen.

Tabel 28 Persentase Perempuan Sebagai Tenaga Profesional Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2020-2023

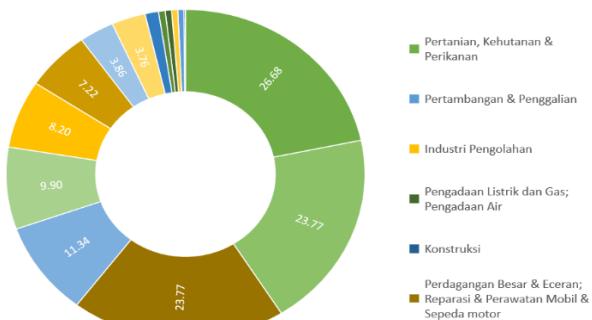
Kab/Kota	2021	2022	2023
Malinau	37,30	33,57	45,63
Bulungan	43,51	43,79	46,16
Tana Tidung	37,32	43,66	50,45
Nunukan	38,43	37,91	49,12
Tarakan	48,82	48,38	45,92
Kalimantan Utara	42,91	43,18	46,97

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.4.6 PEREMPUAN MENURUT LAPANGAN PEKERJAAN UTAMA

Proporsi penduduk yang bekerja menurut lapangan pekerjaan utama biasanya dipakai sebagai salah satu ukuran untuk melihat potensi sektor perekonomian dalam menyerap tenaga kerja, di samping itu juga digunakan untuk mengetahui struktur perekonomian suatu daerah.

Gambar 17 Proporsi Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



Tabel 29 Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Lapangan Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Lapangan Pekerjaan Utama	Laki-laki	Perempuan
Pertanian, Kehutanan & Perikanan	36.69	26.68
Pertambangan & Penggalian	4.03	0.66
Industri Pengolahan	5.68	8.20
Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air	1.27	0.70
Konstruksi	8.08	0.18
Perdagangan Besar & Eceran; Reparasi & Perawatan Mobil & Sepeda Motor	11.62	23.77
transportasi & Pergudangan	6.37	23.77
Penyediaan Akomodasi & Penyediaan Makan Minum	4.21	11.34
Informasi & Komunikasi	0.28	0.69
Aktivitas Keuangan & Asuransi; Real Estate	1.50	0.74
Jasa Profesional & Perusahaan	2.27	1.50
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan & Jaminan Sosial Wajib	9.90	7.22
Pendidikan	3.47	9.90
Aktivitas Kesehatan Manusia & Aktivitas Sosial	2.10	3.86
Jasa Lainnya	2.52	3.76
Total	100	100

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.4.7 PEREMPUAN MENURUT STATUS PEKERJAAN UTAMA

Tabel 30 Penduduk Perempuan 15 Tahun Ke Atas Yang Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2021-2023

Status Pekerjaan Utama	2021	2022	2023
Berusaha sendiri	20.628	24.755	24.426
Berusaha dibantu buruh tidak tetap/buruh tidak dibayar	11.861	7.093	17.691
Berusaha dibantu buruh tetap/buruh dibayar	1.369	2.077	2.634
Buruh/karyawan/pegawai	50.175	50.754	50.729
Pekerja bebas di pertanian	3.268	7.262	6.303
Pekerja bebas di nonpertanian	1.459	273	1.928
Pekerja keluarga/tidak dibayar	26.084	29.395	28.989
Kalimantan Utara	114.844	121.609	133.700

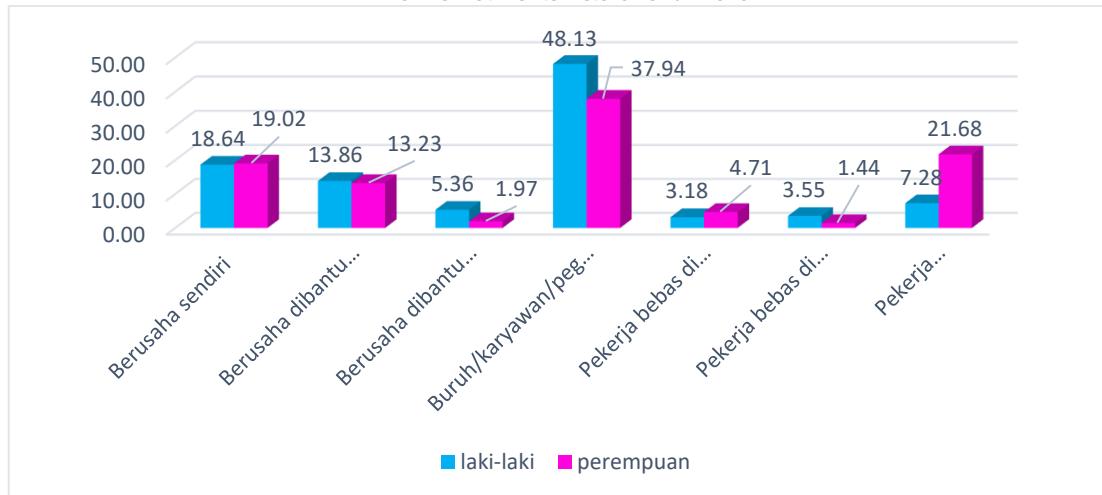
Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk memberikan gambaran tentang kedudukan pekerja adalah status pekerjaan bagi penduduk yang bekerja. Status pekerjaan bagi buruh/karyawan/pegawai merupakan bagian terbesar dari status



penduduk di Kalimantan Utara pada periode Agustus 2021 naik sebanyak 6,88 persen dibandingkan periode Agustus 2020 menjadi 43,69 persen dari total pekerja. Selain sebagai buruh/karyawan/pegawai, bagian yang besar lainnya adalah berstatus berstatus pekerja keluarga/tidak dibayar yang mencapai 22,71 persen, dan status berusaha sendiri sebesar 17,96 persen.

Gambar 18 Persentase Penduduk 15 Tahun Ke Atas Bekerja Menurut Status Pekerjaan Utama dan Jenis Kelamin Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Persentase pekerja yang berstatus buruh/pegawai/karyawan mendominasi baik untuk laki-laki maupun perempuan pada tahun 2023. Kondisi Penduduk diatas 15 tahun bekerja menurut status pekerjaan utama pada tahun 2023, perempuan cenderung bekerja sebagai buruh/pegawai/karyawan yakni sebesar 37,94 persen. Status pekerjaan lain yang cukup mendominasi adalah pekerja keluarga/tidak dibayar yaitu sekitar 21,68 persen. Untuk status pekerjaan berusaha sendiri yakni sekitar 19,02 persen.

Status pekerja keluarga/tidak dibayar kemungkinan besar tidak memiliki kondisi pekerjaan yang layak, jaminan sosial yang memadai atau mempunyai suara dalam serikat pekerja. Tidak dapat dipungkiri bahwa masih belum maksimalnya keterlibatan perempuan dalam dunia kerja berkaitan erat dengan “modal” yang dimiliki oleh tenaga kerja perempuan yang meliputi pendidikan, latihan dan pengalaman yang relatif lebih sedikit bila dibandingkan dengan human capital laki-laki.

4.5 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG POLITIK DAN PENGAMBILAN KEPUTUSAN

4.5.1 PARTISIPASI DI LEMBAGA LEGISLATIF

Berdasarkan penelitian Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menyatakan bahwa jumlah minimum 30 persen perempuan dalam lembaga legislatif memungkinkan terjadinya



suatu perubahan dan membawa dampak pada kualitas keputusan yang diambil dalam lembaga-lembaga publik. Adapun berdasarkan data BPS Provinsi Kalimantan Utara, keterlibatan perempuan di Provinsi Kalimantan Utara dalam Lembaga legislatif dalam tiga tahun terakhir mengalami fluktuasi. Dimana pada tahun 2021 dan 2022 persentase perempuan yang duduk di Lembaga legislatif sebesar 11,43 persen lalu turun menjadi 8,57 persen pada tahun 2023.

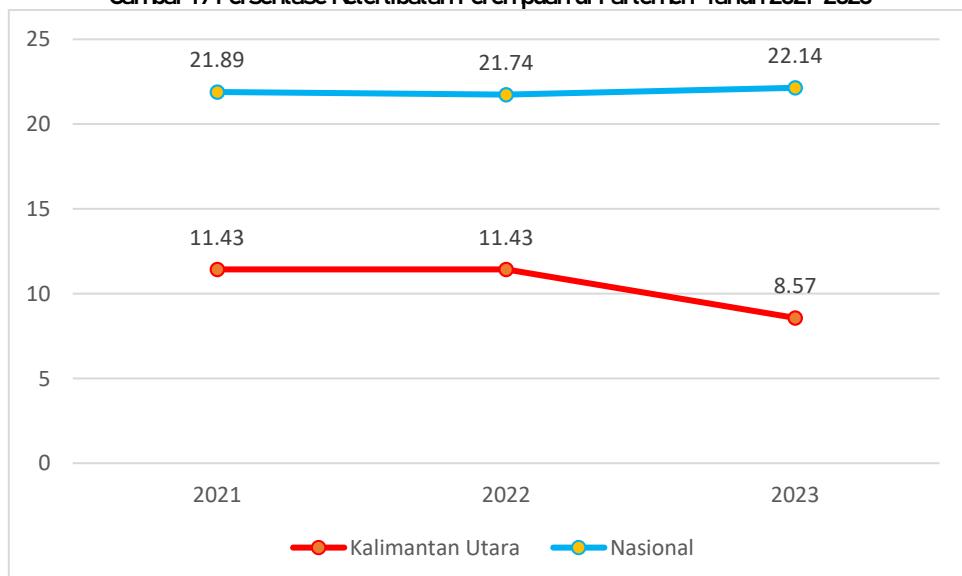
Tabel 31 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Kab/Kota Tahun 2021-2023

Kabupaten/Kota	2021	2022	2023
Malinau	20,00	20,00	20,00
Bulungan	20,00	20,00	20,00
Tana Tidung	15,00	15,00	15,00
Nunukan	32,00	32,00	32,00
Tarakan	10,00	10,00	10,00
Kalimantan Utara	11,43	11.43	8.57
Nasional	21,89	21,74	22.14

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Kabupaten Nunukan menjadi kabupaten dengan persentase keterlibatan perempuan tertinggi yaitu sebesar 32 persen, dimana lebih tinggi dari angka nasional yang hanya sebesar 22,14 persen. Dampak positif yang mungkin terjadi akibat tingginya persentase legislatif perempuan, seperti peningkatan perhatian terhadap isu-isu perempuan dan keluarga, atau kebijakan yang lebih inklusif di kabupaten Nunukan.

Gambar 19 Persentase Keterlibatan Perempuan di Parlemen Tahun 2021-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

4.5.2 PARTISIPASI DI LEMBAGA EKSEKUTIF

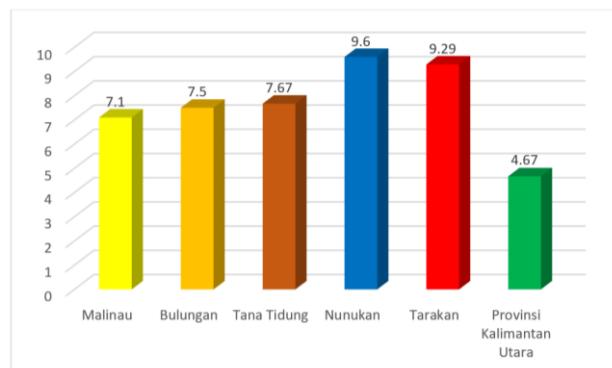
Partisipasi perempuan di lembaga eksekutif merujuk pada keterlibatan perempuan dalam posisi dan jabatan di tingkat pemerintahan yang menjalankan fungsi eksekutif. Capaian PNS perempuan yang menduduki jabatan struktural di Kalimantan Utara



mencerminkan kemajuan dalam pemberdayaan perempuan di sektor publik. Dengan terus meningkatnya representasi perempuan di posisi kepemimpinan, diharapkan akan tercipta lingkungan pemerintahan yang lebih adil dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, khususnya perempuan.

Keterlibatan perempuan di Lembaga eksekutif terutama yang menduduki jabatan struktural di lingkungan pemerintah Provinsi Kalimantan Utara jauh lebih kecil dibandingkan laki-laki. Dimana pada tahun 2023 persentase PNS perempuan yang menduduki jabatan distruktural tertinggi pada Kab. Nunukan sebesar 9,60 persen dan terendah pada Pemprov Kalimantan Utara sebesar 4,67 persen.

Gambar 20 Persentase Perempuan Di Lembaga Eksekutif Menurut Pemda Tahun 2023



Sumber: BKD Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 32 Jumlah Keterlibatan Perempuan Di Lembaga Eksekutif Menurut Pemda Tahun 2023

Pemda	Eselon I	Eselon II	Eselon III	Eselon IV	Non Esselon	Jumlah PNS Perempuan	% PNS Esselon I - IV
Malinau	0	3	40	69	1.464	1.576	7,10
Bulungan	0	6	37	85	1.568	1.696	7,50
Tana Tidung	0	2	23	42	806	873	7,67
Nunukan	0	3	41	106	1.412	1.562	9,60
Tarakan	0	3	30	101	1.307	1.441	9,29
Provinsi Kalimantan Utara	0	4	37	71	2.283	2.395	4,67

Sumber: BKD Provinsi Kalimantan Utara

4.5.3 PENGURUS DAN ANGGOTA ORGANISASI SOSIAL DAN POLITIK

4.5.3.1 PENGURUS HARIAN / KADER PARPOL

Undang-undang nomor 31 tahun 2002 tentang Partai politik pada pasal 13 ayat 3 menyebutkan bahwa kepengurusan partai politik di setiap tingkatan dipilih secara demokratis melalui forum musyawarah partai politik sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga dengan memperhatikan kesetaraan dan keadilan gender. Pengurus atau kader harian partai politik perempuan memegang peran strategis dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan mendorong partisipasi mereka dalam politik. Dengan melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diemban, mereka dapat berkontribusi signifikan terhadap kesetaraan gender dan keberlanjutan partai politik dalam



jangka panjang. Melalui pendidikan, advokasi, dan pengorganisasian, mereka berusaha untuk menciptakan lingkungan yang mendukung keberadaan perempuan dalam arena politik.

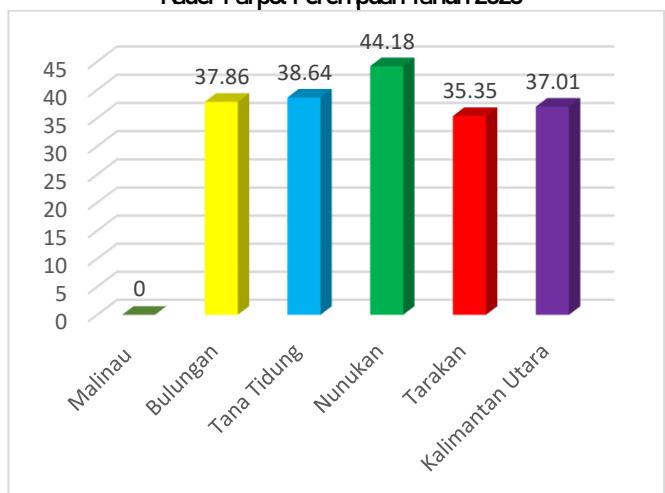
Tabel 33 Jumlah Pengurus Harian/Kader Partai Politik Berdasarkan Jenis Kelamin dan Wlayah Tahun 2023

Wlayah	Jumlah Anggota			% Anggota
	Laki-laki	Perempuan	Total	Pengurus/kader Parpol Perempuan
Malinau
Bulungan	302	184	486	37,86
Tana Tidung	208	131	339	38,64
Nunukan	168	133	301	44,18
Tarakan	245	134	379	35,35
Kalimantan Utara	357	208	562	37,01

Sumber: Badan Kesbangpol. Provinsi Kalimantan Utara & KPU Kab/Kota

Secara keseluruhan persentase anggota pengurus / kader parpol perempuan diatas 30 persen, dimana yang terendah di Kota Tarakan sebesar 35,5 persen. Kab Nunukan memiliki persentase anggota pengurus / kader parpol perempuan tertinggi sebesar 44,18 persen.

Gambar 21 Persentase Anggota Pengurus / Kader Parpol Perempuan Tahun 2023



Sumber: Badan Kesbangpol. Provinsi Kaltara & KPU Kab/Kota

4.5.3.2 JUMLAH PENGURUS HARIAN/KADER TERPILIH MENJADI ANGGOTA LEGISLATIF

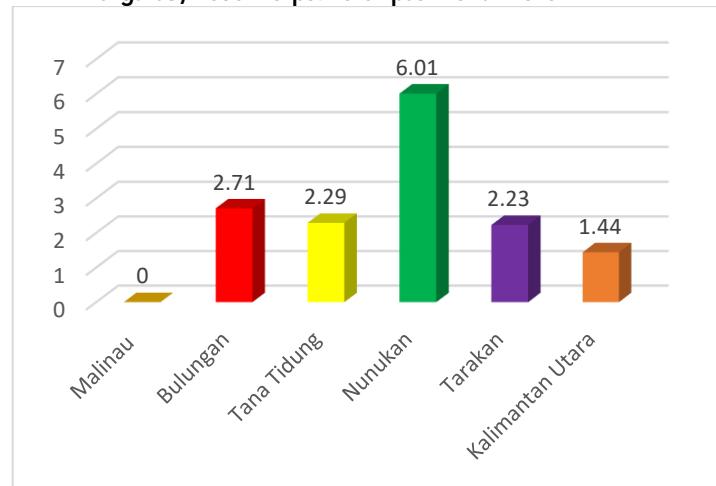
Anggota legislatif perempuan di Kalimantan Utara memainkan peran vital dalam memperjuangkan kepentingan perempuan dan anak di tingkat provinsi. Dengan latar belakang yang beragam, mereka membawa perspektif yang unik dalam proses pembuatan kebijakan, terutama dalam isu-isu seperti perlindungan sosial, pendidikan, kesehatan, dan pemberdayaan ekonomi. Meskipun masih menghadapi tantangan seperti stereotip gender



dan keterbatasan akses sumber daya, anggota legislatif perempuan tetap aktif dalam mendorong kebijakan yang mendukung kesetaraan gender dan partisipasi perempuan dalam politik. Melalui berbagai program dan inisiatif, mereka berusaha untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya peran perempuan dalam pengambilan keputusan serta berkontribusi pada pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan di Kalimantan Utara. Upaya mereka tidak hanya mendukung keterwakilan perempuan, tetapi juga memperkuat demokrasi dan menciptakan lingkungan yang lebih adil bagi semua warga.

Gambar 34 Persentase Anggota Legislatif Terhadap Jumlah Pengurus / Kader Parpol Perempuan Tahun 2023

Berdasarkan data tahun 2023 persentase anggota legislatif perempuan terhadap jumlah anggota pengurus harian parpol terbanyak di Kab Nunukan yaitu sebesar 6,01 persen. Artinya dari jumlah 134 orang pengurus harian parpol perempuan Kota Tarakan (pada Tabel 4.37) yang kemudian terpilih dan duduk di anggota legislatif sebesar 6,01 persen (8 orang).

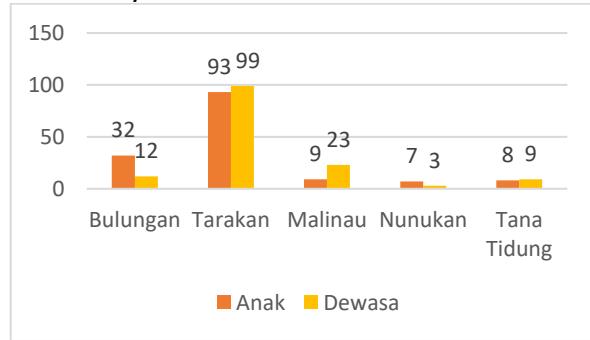


Sumber: Badan Kesbangpol. Provinsi Kalimantan Utara

4.6 PROFIL PEREMPUAN PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG HUKUM DAN HAM

4.6.1 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT UMUR: ANAK (0<18 TAHUN), DEWASA (25 TAHUN KE ATAS)

Gambar 22 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Usia Menurut Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: UPTD DPPA Provinsi Kalimantan Utara

Dari tahun 2022 hingga tahun 2023 tren jumlah korban kekerasan perempuan dan kekerasan anak mengalami kenaikan. Pada tahun 2023 jumlah korban kekerasan perempuan tertinggi di Kota Tarakan dengan jumlah korban sebanyak 99 orang, sedangkan kekerasan anak tertinggi juga berada di Kota Tarakan dengan korban sebanyak 93 orang.



Tabel 35 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Umur di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022-2023

Kab/Kota	2022				2023			
	Anak		Dewasa		Anak		Dewasa	
	L	P	L	P	L	P	L	P
Bulungan	7	8	0	4	3	29	0	12
Tarakan	58	68	2	100	33	60	0	99
Malinau	0	9	0	12	4	5	0	23
Nunukan	2	13	0	0	1	6	0	3
Tana Tidung	1	3	1	7	2	6	0	9
Jumlah	68	101	3	123	43	108	0	146

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

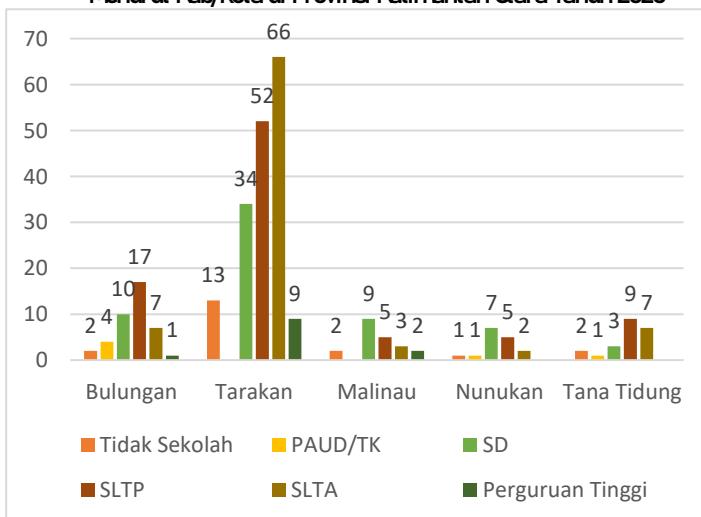
4.6.2 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT TINGKAT PENDIDIKAN

Tabel 36 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Berdasarkan Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/Kota	Tidak Sekolah	PAUD/TK	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	Jumlah
Bulungan	2	4	10	17	7	1	16
Tarakan	13	0	34	52	66	9	143
Malinau	2	0	9	5	3	2	21
Nunukan	1	1	7	5	2	0	15
Tana Tidung	2	1	3	9	7	0	12
Total	20	6	63	88	85	12	274

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 23 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Pendidikan Menurut Kab/kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Pada tahun 2023 angka korban kekerasan perempuan tertinggi di Kota Tarakan dengan jumlah korban 174 orang pada pendidikan SLTA dan 63 orang pada Perguruan Tinggi. Berdasarkan data 146 korban kekerasan perempuan menunjukkan bahwa kasus kekerasan lebih banyak terjadi pada perempuan dengan latar belakang pendidikan SLTA.

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara



4.6.3 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT STATUS PEKERJAAN

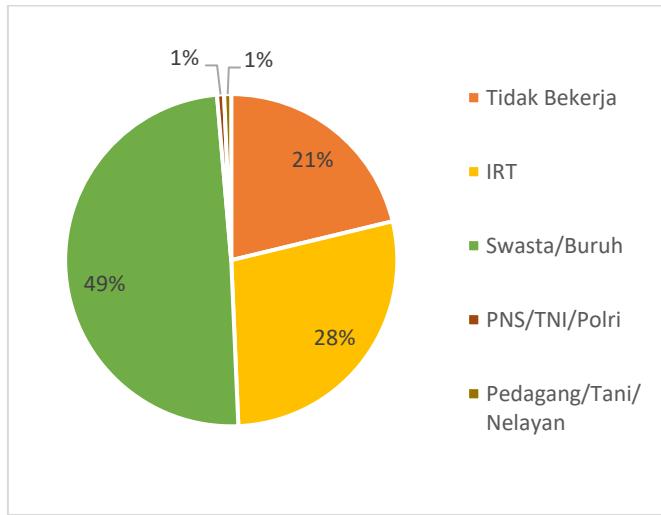
Tabel 37 Jumlah Korban Kekerasan Perempuan Berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/Kota	Tidak Bekerja	IRT	Swasta / Buruh	PNS/TNI /Polri	Pedagang / Tani / Nelayan	Jumlah
Bulungan	6	9	23	1	0	39
Tarakan	46	50	98	1	0	195
Malinau	2	13	7	0	0	22
Nunukan	5	2	6	0	2	15
Tana Tidung	3	8	10	0	0	21
Kalimantan Utara	62	82	144	2	2	136

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 24 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Jenis Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Berdasarkan diagram pada tahun 2023 jumlah korban kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara didominasi oleh korban dengan latar belakang pekerjaan Swasta/Buruh sebesar 49 persen (144 orang) dari jumlah korban kekerasan perempuan. Dimana sebanyak 98 orang perempuan yang mengalami kekerasan sebagai Ibu Rumah Tangga diantaranya berada di Kota Tarakan.



Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

4.6.4 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT BENTUK KEKERASAN

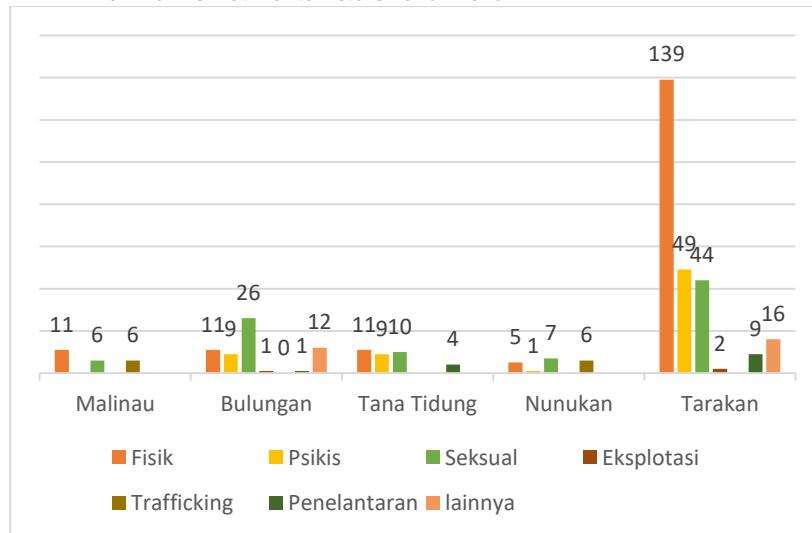
Tabel 38 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Bentuk Kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/Kota	Fisik	Psikis	Seksual	Eksplorasi	Trafficking	Penelantaran	Lainnya	Jumlah
Bulungan	11	9	26	1	0	1	12	60
Tarakan	139	49	44	2	0	9	16	259
Malinau	11	0	6	0	6	0	0	23
Nunukan	5	1	7	0	6	0	0	19
Tana Tidung	11	9	10	0	0	4	0	34
Kalimantan Utara	177	68	93	3	12	14	28	395

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 25 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Bentuk Kekerasan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

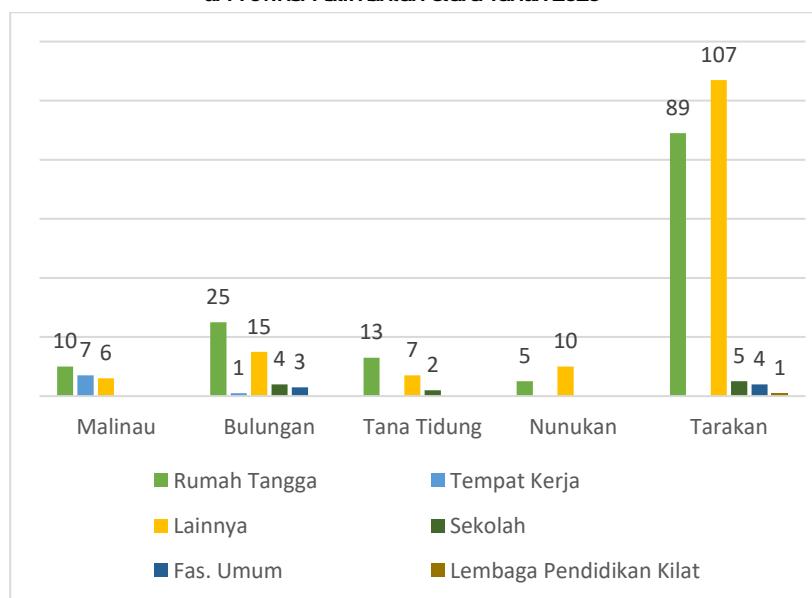


Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

kekerasan terhadap perempuan tertinggi terjadi di Kota Tarakan yang disajikan melalui diagram batang disamping.

4.6.5 PEREMPUAN KORBAN KEKERASAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN

Gambar 26 Jumlah Korban Kekerasan Menurut Tempat Kejadian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), sedangkan 7 korban didalam sekolah Tertinggi Di Kabupaten Malinau yang disajikan melalui diagram batang diatas.

Pada tahun 2023 angka kekerasan fisik menjadi yang tertinggi dengan jumlah total 177 korban, urutan kedua yaitu kekerasan seksual dengan jumlah total 93 korban dan urutan ketiga kekerasan psikis dengan jumlah total 68 korban. Dimana secara umum kasus

Dimana secara umum sebanyak total 311 korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, 145 korban diantarnya mengalami kekerasan dan Pelecehan Seksual. Dimana kasus tertinggi terjadi di Kota Tarakan dengan 107 korban di Tempat Lainnya, 89 korban



Tabel 39 Jumlah Korban Kekerasan Berdasarkan Tempat Kejadian di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/Kota	Rumah Tangga	Tempat Kerja	Lainnya	Sekolah	Fas. Umum	Lembaga Pendidikan Klat	Jumlah
Bulungan	25	1	15	4	0	0	45
Tarakan	89	0	107	5	4	1	206
Malinau	10	7	6	0	0	0	23
Nunukan	5	0	10	0	0	0	15
Tana Tidung	13	0	7	2	0	0	22
Kalimantan Utara	142	8	145	11	4	1	311

Sumber: UPTD PPPA Provinsi Kalimantan Utara

Pada tahun 2023 angka kekerasan ditempat lainnya menjadi yang tertinggi dengan jumlah total 145 korban, urutan kedua yaitu kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) jumlah total 142 korban dan urutan ketiga kekerasan di sekolah dengan jumlah total 11 korban.

4.6.6 PEREMPUAN PENGHUNI LEMBAGA PEMASYARAKATAN

Tabel 54 Jumlah Perempuan Penghuni Lapas di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2022 – 2023

Status	Jenis Kelamin	Kab/Kota			
		Tarakan		Nunukan	
		2022	2023	2022	2023
Penghuni Lapas	Perempuan	93	86	94	86
Jumlah		93	86	94	86

Sumber : Lapas Kelas IIA Tarakan dan Nunukan Kalimantan Utara

Tabel 55 Jumlah Perempuan Penghuni Lapas Berdasarkan Pendidikan di Prov. Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/Kota	Tidak Sekolah	PAUD/TK	SD	SLTP	SLTA	Perguruan Tinggi	Jumlah
Tarakan	1	8	23	24	26	4	86
Nunukan	7	17	14	20	23	5	86
Total	8	25	37	44	49	9	172

Sumber : Lapas Kelas IIA Tarakan dan Nunukan Kalimantan Utara

Tabel 56 Jumlah Perempuan Penghuni Lapas Berdasarkan Pekerjaan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/Kota	Tidak	Tuna Karya	IRT	Swasta /	PNS/TN	Pedagang /	Lain - Lain	Jumlah
	Bekerja			Buruh	/Pdti	Tani / Nelayan		
Tarakan	11	0	49	10	2	14	0	86
Nunukan	20	0	48	0	0	0	18	86
Kalimantan Utara	34	0	97	10	2	14	18	172

Sumber : Lapas Kelas IIA Tarakan dan Nunukan Kalimantan Utara



PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA

5.1 PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG SOSIAL

5.1.1 PENDUDUK USIA ANAK

Penduduk usia anak di Kalimantan Utara memiliki peran yang signifikan dalam demografi provinsi ini, dengan jumlah yang terus meningkat seiring dengan pertumbuhan populasi. Anak-anak di Kaltara, yang mencakup usia 0 hingga 17 tahun, menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Meskipun ada kemajuan dalam pembangunan infrastruktur dan program pemerintah, masih terdapat kesenjangan dalam penyediaan fasilitas pendidikan yang berkualitas, terutama di daerah terpencil. Selain itu, isu gizi dan kesehatan anak menjadi perhatian utama, mengingat pentingnya pertumbuhan fisik dan mental yang optimal. Dengan potensi besar yang dimiliki anak-anak ini, penting bagi semua pihak pemerintah, masyarakat, dan keluarga untuk berkolaborasi dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung, sehingga anak-anak di Kalimantan Utara dapat tumbuh dengan baik dan berkontribusi positif bagi masa depan daerah mereka.

Tabel 40 Jumlah Penduduk usia 0-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Laki-Laki		Perempuan		Total
	Jumlah	%	Jumlah	%	
Malinau	15.771	51,86	14.638	48,14	30.409
Bulungan	29.360	52,07	27.027	47,93	56.387
Tana Tidung	5.407	51,68	5.055	48,32	10.462
Nunukan	35.921	51,63	33.650	48,37	69.571
Tarakan	44.387	51,64	41.566	48,36	85.953
Kalimantan Utara	130.846	51,76	121.936	48,24	252.782

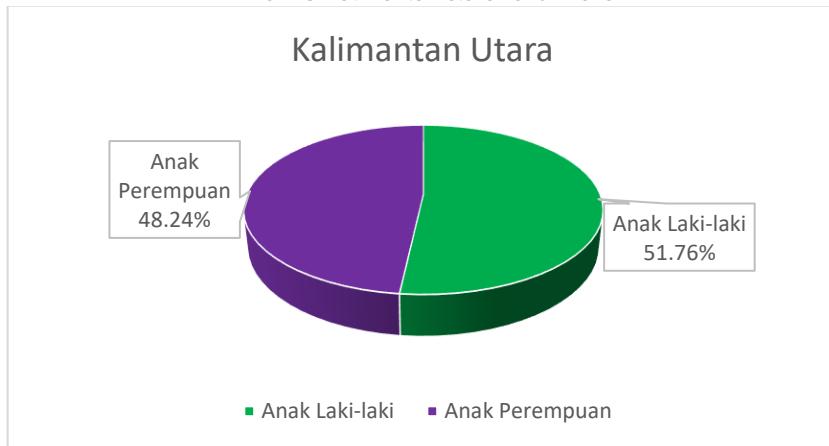
Sumber : Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara

anak berada di Kota Tarakan yaitu sebanyak 85.953 orang.

Persentase penduduk usia anak di Provinsi Kalimantan Utara berdasarkan jenis kelamin anak hampir seimbang di tiap Kab/Kota yaitu anak laki-laki sebanyak 130.846 orang atau 51,76 persen sedangkan anak perempuan 121.936 orang atau 48,24 persen. Sekitar 34 persen jumlah penduduk usia



**Gambar 27 Persentase Penduduk usia 0-17 Tahun Menurut Jenis Kelamin
Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023**



Sumber: Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara

5.1.2 STATUS PERKAWINAN ANAK

Perkawinan anak adalah pernikahan yang terjadi sebelum anak berusia 18 tahun serta belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, dan psikologis untuk mempertanggungjawabkan pernikahan dan anak hasil pernikahan tersebut, serta sah menurut agama dan negara. Perkawinan usia anak di Kalimantan Utara masih menjadi isu yang memprihatinkan, meskipun telah ada upaya untuk menanggulanginya. Di beberapa komunitas, tradisi dan norma sosial sering kali mendorong anak-anak, terutama perempuan, untuk menikah di usia muda. Faktor-faktor seperti kemiskinan, kurangnya akses pendidikan, dan tekanan dari lingkungan sekitar berkontribusi pada fenomena ini. Anak-anak yang dinikahkan biasanya terpaksa meninggalkan pendidikan formal, sehingga menghambat perkembangan mereka di masa depan. Selain itu, perkawinan usia anak meningkatkan risiko kesehatan, termasuk komplikasi saat hamil dan melahirkan, yang dapat membahayakan nyawa mereka. Berbagai organisasi dan pemerintah setempat telah berupaya meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya perkawinan usia anak, namun tantangan budaya dan ekonomi masih memerlukan perhatian serius untuk mencapai perubahan yang berkelanjutan.

Secara total jumlah anak berstatus kawin berjumlah 409 anak, dimana jumlah anak perempuan berstatus kawin jauh lebih tinggi yaitu sebanyak 325 dibandingkan anak laki-laki berstatus kawin yaitu 84 anak. Kabupaten Nunukan menjadi daerah dengan anak berstatus kawin terbanyak dengan jumlah 159 anak, sedangkan Kabupaten Tana Tidung menjadi yang terendah dengan jumlah 6 anak.



Tabel 41 Jumlah Penduduk Anak Berstatus Kawin Menurut Jenis Kelamin dan Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Berstatus Kawin		
	Laki-Laki	Perempuan	Total
Malinau	2	58	60
Bulungan	5	53	58
Tana Tidung	0	6	6
Nunukan	17	142	159
Tarakan	60	66	126
Kalimantan Utara	84	325	409

Sumber: Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 28 Proporsi Perempuan Usia 20-24 Tahun Yang Berstatus Kawin Atau Berstatus Hidup Bersama Sebelum Usia 18 Tahun di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020-2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

5.1.3 HAK SIPIL KEPEMILIKAN AKTE KELAHIRAN ANAK

Akte kelahiran merupakan dokumen resmi yang dikeluarkan oleh negara bagi individu yang baru lahir. Akte kelahiran digunakan untuk mengukur banyaknya anak yang memiliki akte kelahiran sebelum melewati masa umur yang dianggap sebagai anak dan dapat memasuki dunia kerja maupun usia pernikahan. Kepemilikan akte tersebut menjadi salah satu identitas diri dan akan terdaftar dalam Kartu Keluarga (KK) serta diberikan Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai dasar untuk mengakses layanan dan jaminan sosial serta pelayanan masyarakat.

Tabel 42 Persentase Anak Berumur 0-17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran dan KIA di Kalimantan Utara Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jumlah Anak 0-17 Tahun (Jiwa)	Memiliki Akte (Jiwa)	Memiliki KIA (Jiwa)
Malinau	29.023	28.334	16.584
Bulungan	53.733	52.837	33.174
Tana Tidung	10.050	9.794	8.055
Nunukan	66.370	64.591	31.547
Tarakan	82.009	78.984	41.892
Kalimantan Utara	241.185	234.540	131.252

Sumber: Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara

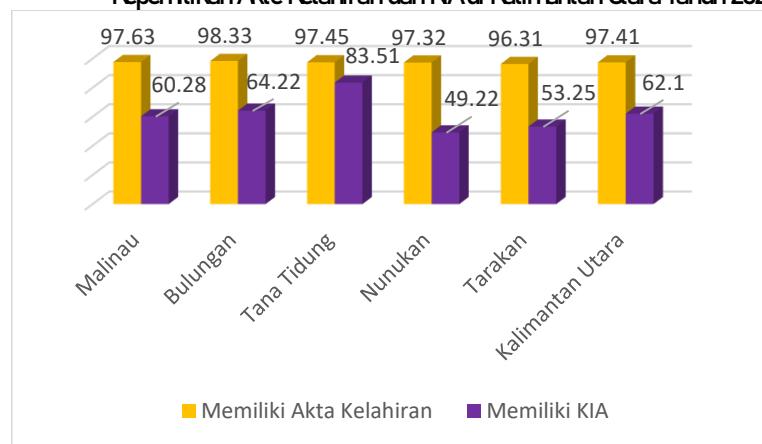
Secara total kepemilikan akte kelahiran Kalimantan Utara telah mencapai 97,41 persen atau sebanyak 234.548 orang. Dimana capaian kepemilikan akte kelahiran tertinggi berada di Kab. Malinau sebesar 97,63 persen dan capaian terendah di Kota Tarakan sebesar 96,31 persen. Sedangkan untuk



kepemilikan KIA Kalimantan Utara telah mencapai 62,1 persen atau sebanyak 131.252 orang.

Gambar 29 Jumlah Anak Berumur 0 - 17 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Kepemilikan Akte Kelahiran dan KIA di Kalimantan Utara Tahun 2023

Anak tanpa dokumen identifikasi resmi akan ditolak mendapatkan layanan kesehatan dan pendidikan. Lebih jauh, anak dapat memasuki pernikahan atau dunia kerja, dipaksa masuk dalam militer sebelum usia legal yang ditentukan ketika tidak memiliki akta kelahiran.



Sumber: Disdukcapil Provinsi Kalimantan Utara

Ketika sudah dewasa, akte kelahiran diperlukan untuk mendapat jaminan sosial atau pekerjaan di sektor formal, pembelian properti atau lahan, hak memilih dan mendapatkan paspor.

5.1.4 ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS

Anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluarbiasaan, baik fisik, mental-intelektual, sosial, maupun emosional, yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak-anak lain yang seusia dengannya.

Kondisi anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Utara masih menghadapi berbagai tantangan. Meskipun ada upaya dari pemerintah dan organisasi non-pemerintah untuk meningkatkan akses pendidikan dan layanan kesehatan, banyak anak dengan kebutuhan khusus yang belum mendapatkan perhatian yang memadai. Infrastruktur pendidikan yang inklusif masih terbatas, sehingga banyak anak kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan mereka.

Selain itu, stigma sosial dan kurangnya pemahaman masyarakat tentang kebutuhan anak berkebutuhan khusus seringkali menghambat integrasi mereka dalam lingkungan sosial. Oleh karena itu, diperlukan kerjasama antara pemerintah, masyarakat, dan lembaga pendidikan untuk menciptakan lingkungan yang lebih mendukung dan ramah bagi anak-anak.

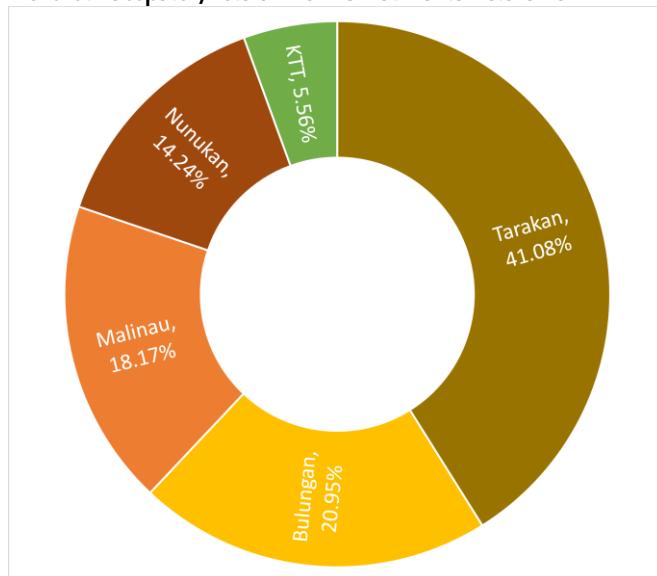


Tabel 43 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Peserta Didik	Tenaga pendidik	Rasio Pendidik: Peserta Didik	Satuan Pendidikan Kebutuhan Khusus
Malinau	111	16	1:7	1
Bulungan	128	22	1:6	3
Tana Tidung	34	9	1:4	1
Nunukan	87	11	1:8	1
Tarakan	251	32	1:8	1
Kalimantan Utara	611	90	1:7	7

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)

Gambar 30 Data Peserta Didik Anak Berkebutuhan Khusus Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Utara 2022



Anak berkebutuhan khusus terbanyak dari Kota Tarakan sebanyak 251 anak atau 41,08 persen, kemudian dari Kab. Bulungan sebanyak 128 anak atau 20,95 persen, kemudian Kab. Malinau sebanyak 111 anak atau 18,17 persen. Secara total jumlah anak berkebutuhan khusus di Kalimantan Utara sebanyak 611 anak dengan jumlah total satuan pendidikan kebutuhan khusus sebanyak 7 lembaga.

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)

5.1.5 ANAK YANG MENGGUNAKAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA (NAPZA)

Penyalahgunaan Napza (Narkotika, Psikotropika, dan Zat-zat Adiktif) merupakan suatu pola perilaku yang bersifat patologik, dan biasanya dilakukan oleh individu yang mempunyai kepribadian rentan atau mempunyai resiko tinggi, dan jika dilakukan dalam jangka waktu tertentu akan menimbulkan gangguan bio-psiko-sosial-spiritual.

Perkembangan seseorang dalam masa anak-anak dan remaja akan membentuk perkembangan diri orang tersebut di masa dewasa. Oleh karena itu, apabila masa anak-anak dan remaja rusak karena narkoba, maka masa depan mereka akan hancur. Pada masa



remaja, justru keinginan untuk mencoba-coba dan mengikuti tren dan gaya hidup. Walaupun semua kecenderungan itu wajar, tetapi hal itu bisa memudahkan remaja untuk menyalahgunakan narkoba.

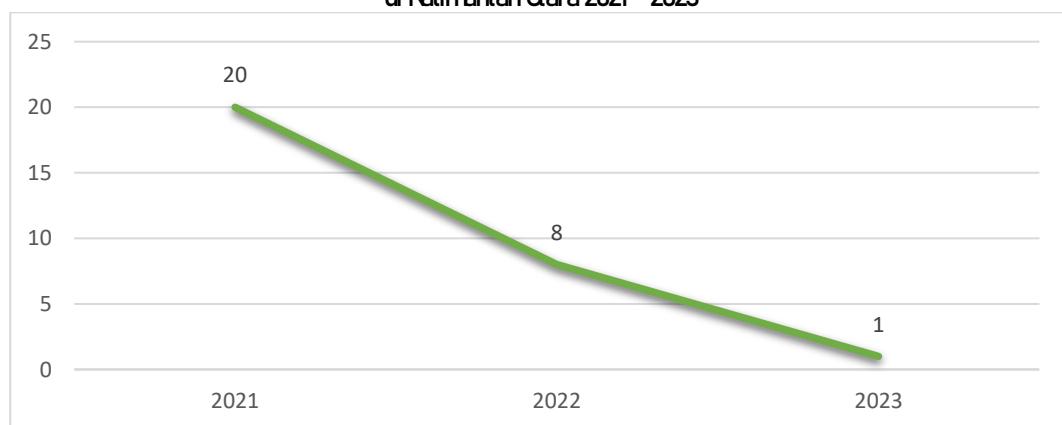
Tabel 44 Jumlah Pelajar/Mahasiswa Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) Menurut Kabupaten/Kota 2021 – 2023

Secara total pelajar/mahasiswa pengguna NAPZA di Kalimantan Utara tahun 2023 yaitu hanya berjumlah 1 orang. Dimana dari data diatas pelajar/mahasiswa pengguna NAPZA berasal dari Kota Tarakan yaitu sebanyak 1 orang. Terjadi penurunan pengguna NAPZA pada kalangan pelajar/mahasiswa secara di Kalimantan Utara pada tahun 2023 dibandingkan dengan tahun 2021 dari sebanyak 20 orang menjadi 1 orang.

Kab/Kota	Tahun		
	2021	2022	2023
Bulungan	0	4	0
Tana tidung	0	0	0
Melinau	0	0	0
Tarakan	19	4	1
Nunukan	1	0	0
Kalimantan utara	20	8	1

Sumber: BNN Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 31 Jumlah Pelajar/Mahasiswa Pengguna Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya (Napza) di Kalimantan Utara 2021 – 2023



Sumber: BNN Provinsi Kalimantan Utara

5.2 PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG KESEHATAN

5.2.1 ANGKA KEMATIAN BAYI (AKB) DAN ANGKA KEMATIAN BALITA (AKBA)

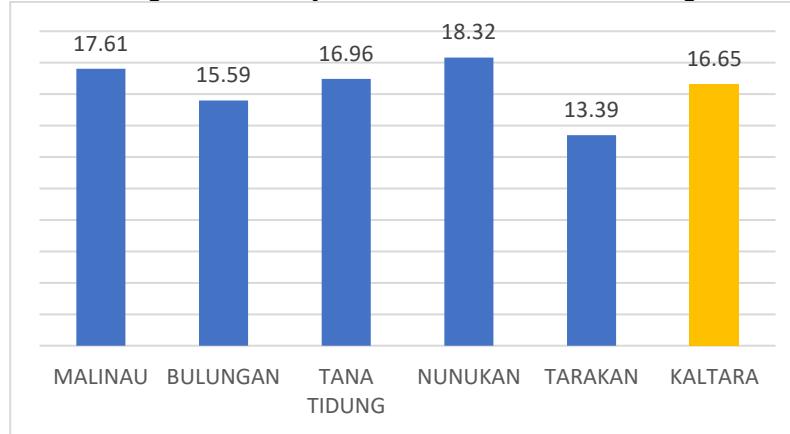
Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Karakteristik usia secara jelas mendefinisikan perbedaan yang memisahkan antara anak dari orang dewasa. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah penerus cita-cita bagi kemajuan suatu bangsa. Dari sudut pandang anak sebagai aset, anak merupakan salah satu modal sumber daya manusia, jika dipenuhi



semua kebutuhan pangan, sandang, papan, pendidikan, dan kebutuhan sosial ekonomi lainnya. Pemenuhan kebutuhan ini akan membentuk anak tumbuh menjadi manusia berkualitas. Sebaliknya jika kebutuhan anak tidak terpenuhi, dikhawatirkan akan menurunkan kualitas hidup anak atau sebagian dari mereka akan menimbulkan masalah bagi keluarga, masyarakat, maupun negara.

Angka Kematian Bayi (*Infant Mortality Rate*) Angka kematian bayi merupakan indikator yang penting untuk mencerminkan keadaan derajat kesehatan di suatu masyarakat, karena bayi yang baru lahir sangat sensitif terhadap keadaan lingkungan tempat orang tua si bayi tinggal dan sangat erat kaitannya dengan status sosial orang tua si bayi. Oleh karena itu banyak upaya kesehatan yang dilakukan untuk menekan dan menurunkan Angka Kematian Bayi (AKB). Angka kematian bayi di Provinsi Kalimantan Utara. Angka kematian bayi menunjukkan jumlah bayi yang meninggal dunia dari setiap seribu bayi yang lahir hidup pada periode tahun tertentu.

Gambar 32 Angka Kematian Bayi Provinsi Kalimantan Utara Hasil Long Form SP2020



Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

Selama periode satu dekade bonus demografi Kalimantan Utara, Angka Kematian Bayi (AKB) hasil *Long Form SP2020* tercatat 16,65 per 1000 kelahiran hidup. Peningkatan persentase bayi yang mendapat imunisasi lengkap serta

peningkatan rata-rata lama pemberian ASI menjadi sah satu yang mendorong bayi semakin mampu bertahan hidup. Angka kematian bayi di Kalimantan Utara tertinggi di Kabupaten Nunukan yaitu sebesar 18,32 per 1000 kelahiran hidup. Sedangkan angka kematian bayi terendah di Kota Tarakan yaitu sebesar 13,93 per 1000 kelahiran hidup pada *Long Form SP2020*.

5.2.2 PERSENTASE ANAK USIA 0-59 BULAN DIIMUNISASI

Upaya untuk menurunkan angka kesakitan, kecacatan, dan kematian bayi serta anak balita dilaksanakan program imunisasi baik program rutin maupun program tambahan/suplemen untuk penyakit-penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I). PD3I adalah penyakit-penyakit yang sudah tersedia vaksinnya untuk upaya pencegahannya. Penyakit-penyakit tersebut merupakan target Program Pengembangan Imunisasi (PPI).



Tujuan awal PPI adalah untuk memberikan vaksinasi seluruh bayi yang lahir secara lengkap sebelum mereka mencapai usia satu tahun.

Tabel 45 Persentase Imunisasi Pada Anak Usia 0-59 Bulan Menurut Kab/kota Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Dari tabel tersebut pemberian imunisasi dasar terbesar di Kalimantan Utara pada imunisasi Polio yaitu sebesar 87,34 persen. Kabupaten / kota yang mendapatkan imunisasi dasar terbanyak di Kota Tarakan sebesar 91,29 persen, menyusul Kabupaten Bulungan sebesar 90,09 persen dan Kabupaten Tana Tidung sebesar 89,10 persen. Sedangkan imunisasi terendah di Kalimantan Utara pada campak yaitu sebesar 70,32 persen. Kabupaten/kota dengan laporan imunisasi campak terendah di Kota Tarakan yaitu sebesar 68,62 persen.

KAB/KOTA	BOG	DPT	POLIO	CAMPAK	HB
Bulungan	89,35	86,53	90,09	69,33	90,18
Tana Tidung	89,47	84,09	89,10	70,66	84,33
Malinau	87,50	85,25	86,13	74,49	87,97
Tarakan	90,90	86,44	91,29	68,62	87,74
Nunukan	81,95	81,02	82,60	71,32	79,15
Kalimantan Utara	87,01	83,99	87,34	70,32	84,30

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

5.2.3 PERSENTASE BAYI LAHIR DENGAN BERAT BADAN RENDAH

Upaya kesehatan anak antara lain diharapkan mampu menurunkan angka kematian anak. Indikator angka kematian yang berhubungan anak adalah Angka Kematian Neonatal (AKN), Angka Kematian Bayi (AKB), dan Angka Kematian Balita (AKABA). Bayi dengan berat badan lahir rendah merupakan salah satu faktor risiko kematian bayi. Oleh karena itu sebagai salah satu upaya untuk mencegah terjadinya kematian bayi adalah penanganan BBLR. BBLR adalah bayi yang lahir dengan berat badan kurang dari 2500 gram.

Tabel 46 Persentase Bayi Berat Badan Lahir Rendah Menurut Kab/Kota Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Jumlah Bayi BBLR tertinggi pada tahun 2023 dari Kabupaten Nunukan yaitu sebesar 353 bayi. Secara keseluruhan Jumlah Bayi BBLR di Kalimantan Utara sebesar 819 bayi. Penyebab terjadinya BBLR antara lain karena ibu hamil mengalami anemia, kurang asupan gizi waktu dalam kandungan, ataupun lahir kurang bulan. Bayi yang lahir dengan berat badan rendah perlu penanganan yang serius, karena pada kondisi tersebut

Kab/Kota	Jumlah Bayi Lahir, Bayi Berat Badan Lahir Rendah (BBLR), dan Bergizi Kurang 2023	
	Berat Bayi Lahir Rendah (BBLR)	Gizi Kurang
Bulungan	237	389
Tana Tidung	28	96
Malinau	60	170
Tarakan	141	130
Nunukan	353	391
Provinsi Kalimantan Utara	819	1.176

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara



bayi mudah sekali mengalami hipotermi dan belum sempurnanya pembentukan organ-organ tubuhnya yang biasanya akan menjadi penyebab utama kematian bayi.

5.2.4 PERSENTASE PREVALENSI BALITA STUNTING

Status gizi bayi/balita merupakan salah satu indikator yang menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat. Indikator yang diukur ada 3 macam, yaitu berat badan menurut umur (BB/U), tinggi badan menurut umur (TB/U) dan berat badan menurut tinggi badan (BB/TB). Indikator yang sering digunakan adalah berat badan menurut umur (BB/U). Status gizi mempengaruhi kecerdasan, daya tahan tubuh terhadap penyakit, kematian bayi, kematian ibu dan produktivitas kerja. Masalah gizi di Indonesia yang terbanyak adalah gizi kurang. Anak balita (0-5 tahun) merupakan kelompok umur yang paling sering menderita akibat kekurangan gizi atau termasuk salah satu kelompok masyarakat yang rentan gizi.

Tabel 47 Sebaran Data Stunting di Provinsi Kalimantan Utara
Tahun 2023

Kab/kota	Jumlah Balita (Anak)	Stunting		Prevalensi (%)
		Pendek (Anak)	Sangat Pendek (Anak)	
Malinau	4.461	493	173	14,9
Bulungan	6.904	687	202	12,9
Tana Tidung	2.377	201	64	11,1
Nunukan	18.958	1.118	299	7,5
Tarakan	12.695	576	235	6,4
Provinsi Kalimantan Utara	45.395	3.075	973	8,9

Sumber : DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH - KEMENTERIAN DALAM NEGERI

Dari table terlihat bahwa Prevalensi Stunting di Provinsi Kalimantan Utara sebesar 8,9 persen dimana Kabupaten Malinau memiliki angka yang tertinggi yaitu sebesar 14,9 persen dibanding wilayah lainnya. Jumlah Balita terbanyak ada di Kabupaten Nunukan sebesar 18.958 anak dan Balita Stunting dengan kategori pendek dan sangat pendek di Kabupaten Nunukan sebesar 1.118 anak dan 299 anak.

5.2.5 RATA-RATA LAMA PEMBERIAN ASI EKSKLUSIF PADA BAYI

Cara pemberian makanan pada bayi yang baik dan benar adalah menyusui bayi secara eksklusif sejak lahir sampai dengan umur 6 bulan dan meneruskan menyusui anak sampai umur 24 bulan. Mulai umur 6 bulan, bayi mendapat makanan pendamping ASI yang bergizi sesuai dengan kebutuhan tumbuh kembangnya. ASI merupakan makanan terbaik untuk bayi yang mengandung sel darah putih, protein dan zat kekebalan yang cocok untuk bayi. ASI membantu pertumbuhan dan perkembangan anak secara optimal serta melindungi terhadap penyakit.



Persentase penduduk berumur 0-23 bulan yang pernah diberi ASI adalah indikator yang menunjukkan proporsi anak berusia kurang dari dua tahun (baduta) yang pernah menerima Air Susu Ibu (ASI) selama hidup mereka.

Tabel 48 Persentase penduduk berumur 0-23 bulan yang Pernah Diberi ASI menurut Kabupaten/Kota Tahun 2023

Dari data tabel menunjukkan bahwa 95,35 persen anak-anak Provinsi Kalimantan Utara di umur 0-23 bulan telah disusui dan diberi ASI. Kabupaten Bulungan memiliki persentase tertinggi sebesar 98,36 persen telah menyusui dan memberikan ASI terhadap anak berumur 0-23 bulan, sedangkan Tana Tidung memiliki persentase terendah sebesar 91,31 persen.

Kab/kota	Apakah Pernah disusui/diberi ASI?			
	Ya	Tidak	Tidak Tahu	Total
Malinau	94,54	4,26	1,20	100,00
Bulungan	98,36	1,64	0,00	100,00
Tana Tidung	91,31	8,69	0,00	100,00
Nunukan	94,20	5,80	0,00	100,00
Tarakan	95,50	4,50	0,00	100,00
Provinsi Kalimantan Utara	95,35	4,51	0,14	100,00

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Tabel 49 Rata-rata Lama Pemberian ASI Eksklusif Pada Bayi di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/kota	Rata-rata Lamanya Pemberian ASI		
	Laki-Laki	Perempuan	Laki-laki + Perempuan
Malinau	10,37	9,37	9,91
Bulungan	9,53	8,39	8,97
Tana Tidung	12,55	10,86	11,51
Nunukan	8,33	9,33	8,82
Tarakan	11,74	10,48	11,19
Provinsi Kalimantan Utara	10,16	9,58	9,88

Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

Ia, untuk capaian terendah di Kabupaten Nunukan selama 8,33 bulan untuk bayi laki-laki. Sedangkan untuk bayi perempuan capaian tertinggi di Kabupaten Tana Tidung yaitu selama 10,86 bulan, untuk capaian terendah di Kabupaten Bulungan yaitu 8,39 bulan.

Dari data terlihat bahwa secara total rata-rata lama pemberian ASI eksklusif pada bayi laki-laki dan perempuan di Kalimantan Utara selama 9,88 bulan. Artinya tiap bayi laki-laki dan perempuan yang dilahirkan akan mendapatkan ASI eksklusif selama 10 bulan. Dimana bayi laki-laki rata-rata lama pemberian ASI eksklusif lebih tinggi dibanding bayi perempuan, dengan capaian tertinggi di Kabupaten Tana Tidung yaitu selama 12,55 bulan untuk bayi laki-laki, untuk capaian terendah di Kabupaten Nunukan selama 8,33 bulan untuk bayi laki-laki. Sedangkan untuk bayi perempuan capaian tertinggi di Kabupaten Tana Tidung yaitu selama 10,86 bulan, untuk capaian terendah di Kabupaten Bulungan yaitu 8,39 bulan.



5.3 PROFIL ANAK KALIMANTAN UTARA BIDANG PENDIDIKAN

5.3.1 PESERTA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) JALUR FORMAL DAN JALUR NON FORMAL / PENDIDIKAN PRASEKOLAH

Pendidikan anak usia dini dapat diselenggarakan melalui jalur pendidikan formal, nonformal, dan/atau informal. PAUD jalur pendidikan formal berbentuk Taman Kanak-kanak (TK), Bustanul Athfal (BA), atau bentuk lain yang sederajat. Sementara itu, PAUD jalur pendidikan nonformal berbentuk Kelompok Bermain (KB), Taman Penitipan Anak (TPA), atau bentuk lain yang sederajat.

Tabel 50 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Menurut Kabupaten/Kota dan Keikutsertaan Pendidikan prasekolah tahun 2023

Kabupaten/Kota	Keikutsertaan Pendidikan Pra Sekolah		
	Masih/Pernah Mengikuti Pra Sekolah TA 2022/2023	Pernah Mengikuti Pra Sekolah TA 2021/2022 dan Sebelum TA 2023/2024	Tidak/Belum Pernah Mengikuti Pra Sekolah
Malinau	25,34	5,55	69,11
Bulungan	18,39	5,01	79,60
Tana Tidung	30,32	7,02	62,66
Nunukan	18,94	6,11	74,95
Tarakan	13,51	1,13	85,37
Kalimantan Utara	18,27	4,14	77,59

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara

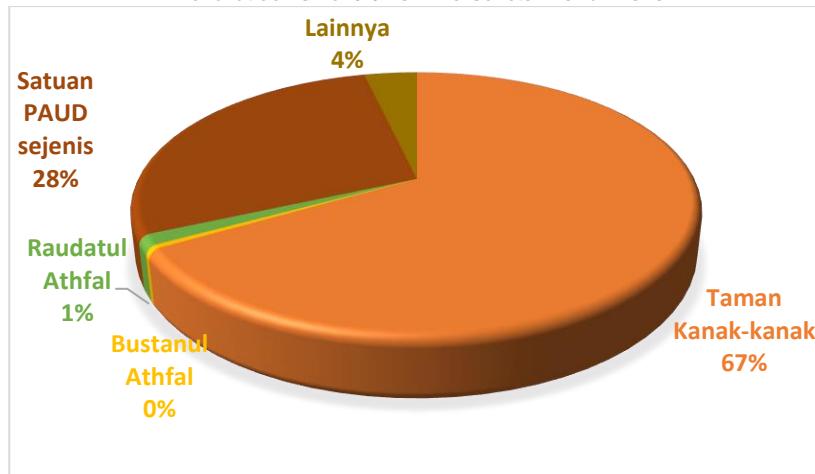
Tabel 51 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Pra Sekolah Tahun 2023

Kabupaten/Kota	Jenis Pendidikan Pra Sekolah				
	Taman Kanak-kanak	Bustanul Athfal	Raudatul Athfal	PAUD	lainnya
Malinau	55,94	0,00	1,76	34,50	7,80
Bulungan	71,76	0,00	4,87	17,89	5,48
Tana Tidung	42,24	2,29	0,00	53,25	2,23
Nunukan	59,91	0,72	0,20	38,61	0,54
Tarakan	88,47	0,00	0,00	7,59	3,93
Kalimantan Utara	66,59	0,43	1,28	28,09	3,61

Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Utara



Gambar 33 Persentase Penduduk Berumur 0-6 Tahun Yang Pernah/Masih Mengikuti Pendidikan Pra Sekolah Menurut Jenis Pendidikan Pra Sekolah Tahun 2023



Sumber: BPS Provinsi Kalimantan Utara

5.3.2 PESERTA PENDIDIKAN SD, SMP, SMA DAN SMK

Di Indonesia, program wajib belajar telah diperbarui dari yang sebelumnya hanya 9 tahun menjadi 12 tahun. Wajib Belajar Pendidikan Dasar 12 Tahun, merupakan program Pemerintah untuk menjawab kebutuhan dan tantangan jaman. Pemerintah berupaya meningkatkan taraf kehidupan rakyat dengan mewajibkan semua warga negara Indonesia yang berusia 7- 19 tahun untuk menamatkan pendidikan dasar dengan program 6 tahun di SD, 3 tahun di SMP dan 3 tahun di SMA/SMK secara merata. Tidak relevan bila di jaman modern ini masih ada anak-anak Indonesia yang tidak bersekolah dan ada pula yang masih buta huruf. Oleh karena itu pemerintah berusaha meningkatkan kualitas manusia melalui jenjang pendidikan dasar.

Tabel 52 Jumlah Peserta Pendidikan Menurut Kabupaten/Kota dan Jenis Pendidikan Tahun 2023

Secara total jumlah peserta pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA, SMK dan SLB di Provinsi Kalimantan Utara sebanyak 162.832 siswa. Dimana sebanyak 12,02 persen berada di jenjang PAUD; 49,05 persen di jenjang SD; 20,32 persen di jenjang SMP; 11,60 persen di jenjang SMA

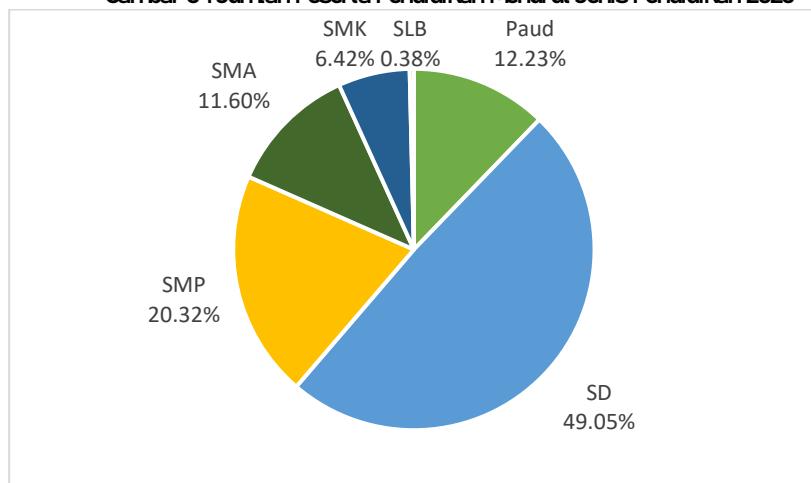
Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan						JUMLAH
	PAUD	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	
Malinau	3.413	9.818	4.599	3.093	898	111	21.932
Bulungan	5.098	18.798	7.469	3.688	2.760	128	37.941
Tana Tidung	1.300	3.448	1.356	994	52	34	7.184
Nunukan	5.821	22.297	9.083	5.440	2.248	87	44.976
Tarakan	4.276	25.516	10.586	5.671	4.499	251	50.799
Kalimantan Utara	19.908	79.877	33.093	18.886	10.457	611	162.832

Sumber: Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)



6,42 persen di jenjang SMK dan 0,38 persen di jenjang SLB. Kabupaten dengan jumlah peserta pendidikan terbanyak dari Kota Tarakan dengan jumlah 50.799 siswa.

Gambar 34 Jumlah Peserta Pendidikan Menurut Jenis Pendidikan 2023



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)

5.3.3 SISWA PUTUS SEKOLAH

Siswa putus sekolah merupakan kondisi anak yang tidak berkesempatan untuk menyelesaikan pendidikan hingga tidak memperoleh keterangan tamat belajar atau ijazah yang disebabkan oleh faktor-faktor tertentu. Dimana anak mengalami keterlantaran karena sikap dan perlakuan orang tua yang tidak memberikan perhatian yang layak terhadap proses tumbuh kembang anak tanpa memperhatikan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan yang layak.

Tabel 53 Jumlah Siswa Putus Sekolah Menurut Kabupaten/Kota Dan Jenis Pendidikan Tahun 2023

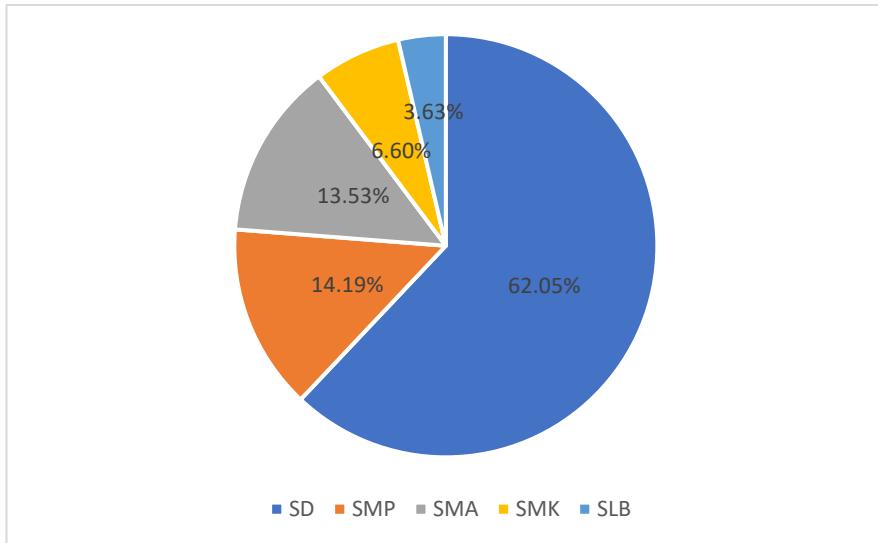
Kabupaten/Kota	Jenjang Pendidikan					Jumlah
	SD	SMP	SMA	SMK	SLB	
Malinau	28	9	7	6	0	50
Bulungan	32	3	14	3	0	52
Tana Tidung	5	0	0	0	0	8
Nunukan	83	31	8	11	0	133
Tarakan	40	0	12	0	0	52
Kalimantan Utara	188	43	41	20	11	303

Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)

Siswa putus sekolah di Kalimantan Utara sebanyak 303 siswa dengan jumlah tertinggi pada jenjang SD yaitu sebanyak 188 siswa atau 62,05 persen; SMP sebanyak 43 siswa atau 14,19 persen; SMA sebanyak 41 siswa atau 13,53 persen; SMK sebanyak 20 siswa atau 6,60 persen dan SLB sebanyak 11 siswa atau 3,63 persen. Secara total siswa putus sekolah di semua jenjang pendidikan Kabupaten Nunukan menjadi yang tertinggi yaitu sebanyak 133 siswa.



Gambar 35 Persentase Siswa Putus Sekolah Jenis Pendidikan Tahun 2023



Sumber : Neraca Pendidikan Daerah Kemendikbud (npd.kemendikbud.go.id)

5.4 PROFIL ANAK PROVINSI KALIMANTAN UTARA BIDANG HUKUM DAN HAM

5.4.1 ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT UMUR (0-17 TAHUN)

Secara total jumlah korban kekerasan anak Kalimantan Utara tahun 2023 sebanyak 151 orang. Dimana total jumlah korban kekerasan anak perempuan lebih tinggi yaitu 108 orang dibanding korban anak laki-laki yaitu 43 orang. Kasus kekerasan anak tertinggi di Kota Tarakan dengan 93 orang.

Tren kasus kekerasan anak cenderung lebih tinggi pada anak diusia 13-17 tahun terutama anak perempuan, ini terlihat dari data dimana jumlah korban kekerasan anak perempuan di usia 13-17 sebanyak 69 orang dari total keseluruhan korban anak se-Kalimantan Utara sebanyak 151 orang.

Tabel 54 Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kelompok Usia di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/Kota	Kelompok Usia Anak						Total		
	0 - 5 Tahun		6 - 12 Tahun		13 - 17 Tahun				
	L	P	L	P	L	P	L	P	L+P
Bulungan	1	0	2	9	0	20	3	29	32
Tarakan	0	13	8	13	25	34	33	60	93
Malinau	0	0	2	0	2	5	4	5	9
Nunukan	0	0	0	0	1	6	1	6	7
Tana Tidung	1	0	0	4	1	4	2	8	10
TOTAL	2	13	12	26	29	69	43	108	151

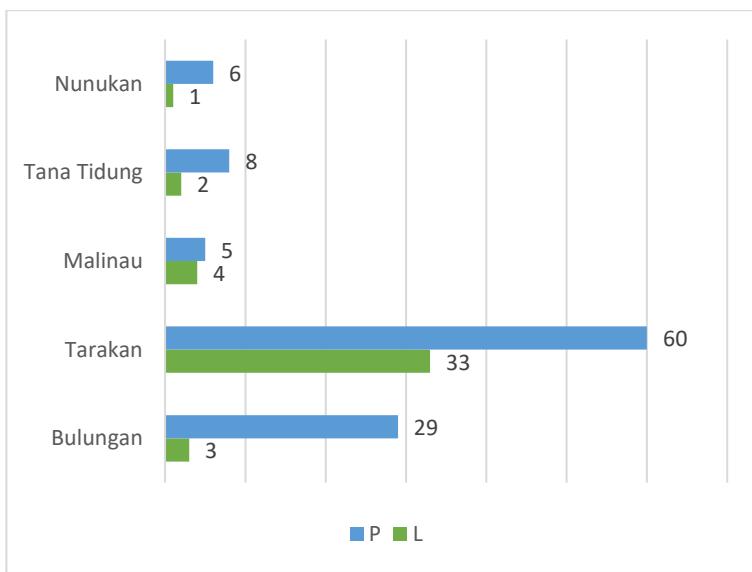
Sumber : UPTDPPA Provinsi Kalimantan Utara

Jumlah kekerasan anak tertinggi berada di Kota Tarakan, dimana sepanjang tahun 2023 ada total 93 kasus kekerasan, dimana 60 kasus kekerasan terhadap anak perempuan



dan 33 kasus terhadap anak laki-Laki. Kabupaten Bulungan dengan total 32 kasus, dimana 29 kasus terhadap anak perempuan dan 3 kasus terhadap anak laki-laki. Sedangkan untuk total kasus terendah yaitu Kabupaten Nunukan dengan total 7 kasus, dimana 6 kasus terhadap anak perempuan dan 1 kasus terhadap anak laki-laki.

Gambar 36 Jumlah Anak Korban Kekerasan Berdasarkan Jenis Kelamin Di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara

5.4.2 ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT STATUS PENDIDIKAN

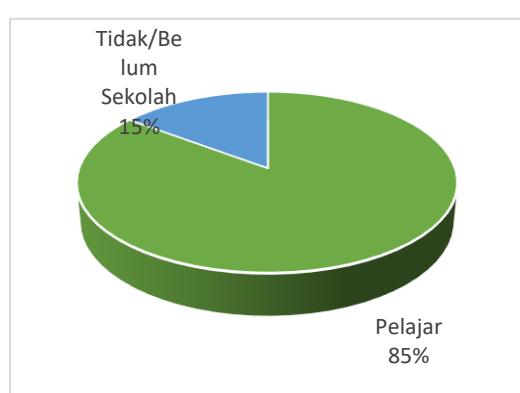
Berdasarkan data tahun 2023 jumlah kekerasan pada anak di Kalimantan Utara sebanyak 158 orang dimana sebanyak 144 orang atau 85 persen berstatus pelajar dan 25 orang atau 15 persen tidak/belum bersekolah. Kota Tarakan sebagai kota dengan pelajar sebagai korban kekerasan tertinggi yaitu 93 orang berstatus pelajar dari total 83 anak korban kekerasan di Kota Tarakan. Sedangkan Kabupaten Nunukan sebagai kabupaten dengan korban kekerasan terendah yaitu 10 orang berstatus pelajar dari total 7 anak korban kekerasan di Kabupaten Tana Tidung.

Tabel 55 Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Status Pendidikan dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/kota	Pelajar	Tidak/Belum Sekolah
Bulungan	31	2
Tarakan	83	20
Malinau	9	1
Nunukan	10	0
Tana Tidung	11	2
Kalimantan Utara	144	25

Sumber: UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 37 Persentase Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Status Pendidikan di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber: UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara



5.4.3 ANAK KORBAN KEKERASAN MENURUT TEMPAT KEJADIAN

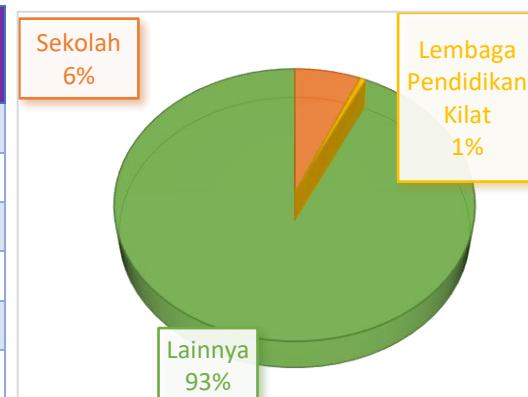
Berdasarkan data tahun 2023 tempat kejadian kekerasan pada anak di lokasi lainnya berjumlah 158 orang, di sekolah berjumlah 11 orang dan lembaga pendidikan kilat berjumlah 1 orang. Kejadian kekerasan anak sebanyak 158 orang di Lainnya membuktikan bahwa kekerasan pada anak dilakukan oleh teman dan Keluarga/Kerabat. Dimana Tarakan menempati urutan teratas kekerasan di sekolah dengan jumlah 103 orang, Bulungan 33 orang, Tana Tidung 13 orang, Nunukan 11 orang dan Malinau 10 orang.

Tabel 56 Jumlah Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Kab/kota	Sekolah	Lembaga Pendidikan Kilat	Lainnya
Bulungan	4	0	29
Tarakan	5	1	97
Malinau	0	0	10
Nunukan	0	0	11
Tana Tidung	2	0	11
Kalimantan Utara	11	1	158

Sumber : UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara

Gambar 38 Persentase Korban Kekerasan Anak Berdasarkan Tempat Kejadian Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber : UPTD PPA Provinsi Kalimantan Utara

Jika dikaitkan dengan total anak yang mengalami kekerasan, maka terdapat 144 orang diantaranya yang mengalami kekerasan berstatus pelajar dari total 155 orang anak korban kekerasan di Kalimantan Utara sepanjang tahun 2023. Dimana dari total 144 orang pelajar korban kekerasan diantaranya adalah korban kekerasan yang dilakukan di Tempat Lainnya dengan pelaku teman dan Keluarga/Kerabat.

5.4.4 ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM

Anak berhadapan dengan hukum sebagai pelaku berjumlah 43 orang, dimana 41 orang pelaku masih berstatus sebagai pelajar. Kota Tarakan dengan pelaku kekerasan berstatus pelajar terbanyak yaitu berjumlah 17 orang Sedangkan Kabupaten Bulungan dan Nunukan pelaku kekerasan berstatus pelajar berjumlah 8 orang.

Gambar 39 Jumlah Anak Sebagai Pelaku Berstatus Pelajar Berdasarkan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023



Sumber : Pengadilan Negeri se-Kalimantan Utara



Tabel 57 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Jenis Kelamin dan Kab/Kota di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Status	Jenis Kelamin	Kab/Kota				
		Bulungan	Malinau	Nunukan	Tarakan	Tana Tidung
Korban	Laki-laki	0	0	18	0	1
	Perempuan	5	0	28	8	0
Pelaku	Laki-laki	8	5	42	17	3
	Perempuan	0	0	3	0	0
Jumlah		13	5	91	25	4

Sumber : Pengadilan Negeri se-Kalimantan Utara

Sepanjang tahun 2023 anak yang berhadapan dengan hukum sebanyak 138 orang, dimana sebanyak 60 orang sebagai korban kekerasan dan sebanyak 78 orang sebagai pelaku kekerasan. Kab. Nunukan terlihat sebagai Kabupaten dengan anak yang berhadapan dengan hukum tertinggi yaitu 91 orang, dengan 46 orang sebagai korban dan 45 orang sebagai pelaku. Kemudian Kota Tarakan yaitu 25 orang, dengan 8 orang sebagai korban dan 17 orang sebagai pelaku serta Bulungan yaitu 13 orang, dengan 5 orang sebagai korban dan 8 orang sebagai pelaku kekerasan.

Tabel 58 Jumlah Anak Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Jenis Pidana di dan Pengadilan Negeri di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Jenis Pidana	PNTanjung Selor		PNMalinau	PNNunukan	PNTarakan	Jumlah
	Bulungan	Tana Tidung				
Perdagangan Manusia	0	0	0	2	0	2
Pembunuhan	0	0	0	0	0	0
UWITE	0	0	0	1	1	2
UWKesehatan	0	0	0	0	0	0
Perampokan	0	0	0	0	0	0
Kekerasan Terhadap Anak	0	0	0	1	0	1
Persetubuhan Terhadap Anak	5	0	1	23	5	34
Pencabulan terhadap Anak	0	0	0	8	3	11
Narkotika	0	0	1	0	4	5
Kecelakaan Lantas	1	0	0	0	0	1
Pengeroyokan	0	4	0	1	0	4
Penganiayaan	0	0	0	0	1	1
Perusakan	0	0	0	0	0	0
Senjata Tajam	0	0	0	0	0	0
Ketertiban	0	0	0	0	0	0
Pencurian	4	0	3	6	0	13
Pengancaman	0	0	0	0	0	0
Perjudian	0	0	0	0	3	3
Pelanggaran	0	0	0	0	0	0
Membawa Lari Anak Perempuan	0	0	0	0	0	0
Lain-lain	0	0	0	0	0	0
Jumlah	10	4	5	42	17	78

Sumber : Pengadilan Negeri se-Kalimantan Utara



5.4.5 ANAK PENGHUNI LEMABAGA PEMASYARAKATAN

Anak-anak yang menjadi penghuni Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) seringkali menghadapi kenyataan hidup yang sangat sulit, jauh dari kebebasan dan kasih sayang keluarga. Mereka mungkin terjerat dalam masalah hukum sejak usia muda, baik karena faktor lingkungan, pengaruh teman sebaya, atau bahkan karena ketidakmampuan keluarga dalam memberikan pendidikan dan perhatian yang cukup.

Kehidupan di dalam Lapas memberi mereka tantangan besar dalam hal rehabilitasi sosial dan pembentukan karakter. Meskipun kondisi mereka sulit, program-program pendidikan dan keterampilan di dalam Lapas berperan penting untuk memberikan harapan akan masa depan yang lebih baik. Pendampingan psikologis dan perhatian dari berbagai pihak sangat diperlukan untuk membantu mereka keluar dari jeratan masa lalu dan mempersiapkan diri untuk kembali ke masyarakat dengan bekal yang lebih positif.

Anak penghuni Lapas Tarakan mengalami penurunan dari 22 anak menjadi 9 anak ditahun 2023. Namun untuk Lapas Nunukan justru mengalami kenaikan dari 7 anak menjadi 11 anak ditahun 2023. Sejauh ini Kalimantan Utara belum memiliki Lapas Khusus Anak dan hanya berupa sel khusus anak.

Tabel 59 Jumlah Anak Penghuni Lapas Berdasarkan Jenis Kelamin di Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2023

Status	Jenis Kelamin	Kab/Kota			
		Tarakan		Nunukan	
		2022	2023	2022	2023
Pelaku	Laki-laki	22	9	7	11
	Perempuan	0	0	0	0
Jumlah		22	9	7	11

Sumber : Lapas Kelas IIA Tarakan dan Nunukan Kalimantan Utara



Tanjung Selor, 23 November 2023

No. : B-355/65563/OT.130/11/2023

Sifat : Biasa

Lampiran : 1 (satu) set

Perihal : Rekomendasi Kegiatan Statistik

Yth. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana

Provinsi Kalimantan Utara

Di

Tempat

Sehubungan dengan pemberitahuan rancangan penyelenggaraan kegiatan statistik sektoral melalui portal Romantik, bersama ini disampaikan pernyataan rekomendasi terkait pelaksanaan kegiatan statistik sektoral tersebut.

Instansi Penyelenggara : Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk, dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara

Judul : **Kompilasi Produk Administrasi Profil Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Utara**

Dinyatakan : **LAYAK**

No. Rekomendasi : **V-23.6500.013**
Nomor rekomendasi ini harus dicantumkan pada kuesioner/lembar kerja

Catatan : *terlampir*

Demikian disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Lampiran Surat

Nomor : B-355/65563/OT.130/11/2023
Tanggal : 23 November 2023

Rekomendasi Rancangan Kegiatan Statistik

Judul	: Kompilasi Produk Administrasi Profil Gender dan Anak Provinsi Kalimantan Utara
Penyelenggara	: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Kalimantan Utara
Resume	: https://romantik.web.bps.go.id/lihat-rekomendasi/K-23.6500.013
Rekomendasi	: <ol style="list-style-type: none">1. Melaksanakan kegiatan statistik sesuai dengan rancangan yang diajukan dan disetujui oleh BPS Provinsi Kalimantan Utara.2. Penyelenggaraan kegiatan statistik merujuk pada <i>Generic Statistical Business Process Model</i> (GSBPM) yang berlaku secara internasional.<ol style="list-style-type: none">a. Penerapan GSBPM bertujuan agar data statistik yang dihasilkan berkualitas, tata kelola proses bisnis terdokumentasi, serta dapat menyediakan suatu kerangka penjaminan kualitas pada setiap tahap kegiatan.b. Tahapan GSBPM meliputi identifikasi kebutuhan, perancangan, pembangunan, pengumpulan, pengolahan, analisis, diseminasi, dan evaluasi. Tahapan kegiatan tersebut dapat diadaptasi dan disesuaikan dengan kegiatan statistik pada masing-masing instansi.3. Sebagai salah satu bentuk implementasi prinsip Satu Data Indonesia (SDI), metadata statistik harus disusun.<ol style="list-style-type: none">a. Metadata statistik memuat informasi mengenai pelaksanaan kegiatan statistik, variabel yang digunakan, dan indikator yang dihasilkan.b. Panduan penyusunan metadata statistik merujuk pada Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik.4. Sesuai dengan Peraturan Pemerintah RI No. 51 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Statistik, setelah kegiatan statistik selesai dilaksanakan, hasil penyelenggaraan kegiatan statistik tersebut diserahkan ke BPS dalam bentuk <i>softcopy</i> publikasi dan metadata.



TIM PENYUSUN

Penanggung Jawab dan Ketua

Burhanuddin, S.Sos., M.Si



Anggota

- Hendra Kurniawan, S.Psi
- Muhammad Nurul Alam Hasyim, SST
- Anggia Firmanti Hermadita, S.Tr.Stat
- A. Muh. Alif Ranggong
- Romih, S.Sos
- Dhonny Ika Saputra
- Petma Yosia Lolo, SE
- Ramadhansyah Sulistia, S.Si, M.Si

Pengolah Data

- Rosyanti, A.Md
- Agus Juliansyah, S.ST
- Riowati, SE., M.Si
- Dwi Patri Yani
- Wirahadi, S.Sos



Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara
Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak,
Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

f Dinas Pemberdayaan Perempuan Kaltara

Instagram dp3ap2kb_kaltara

Website <https://dpppappkb.kaltaraprov.go.id>

Email dp3ap2kb.kaltara@gmail.com